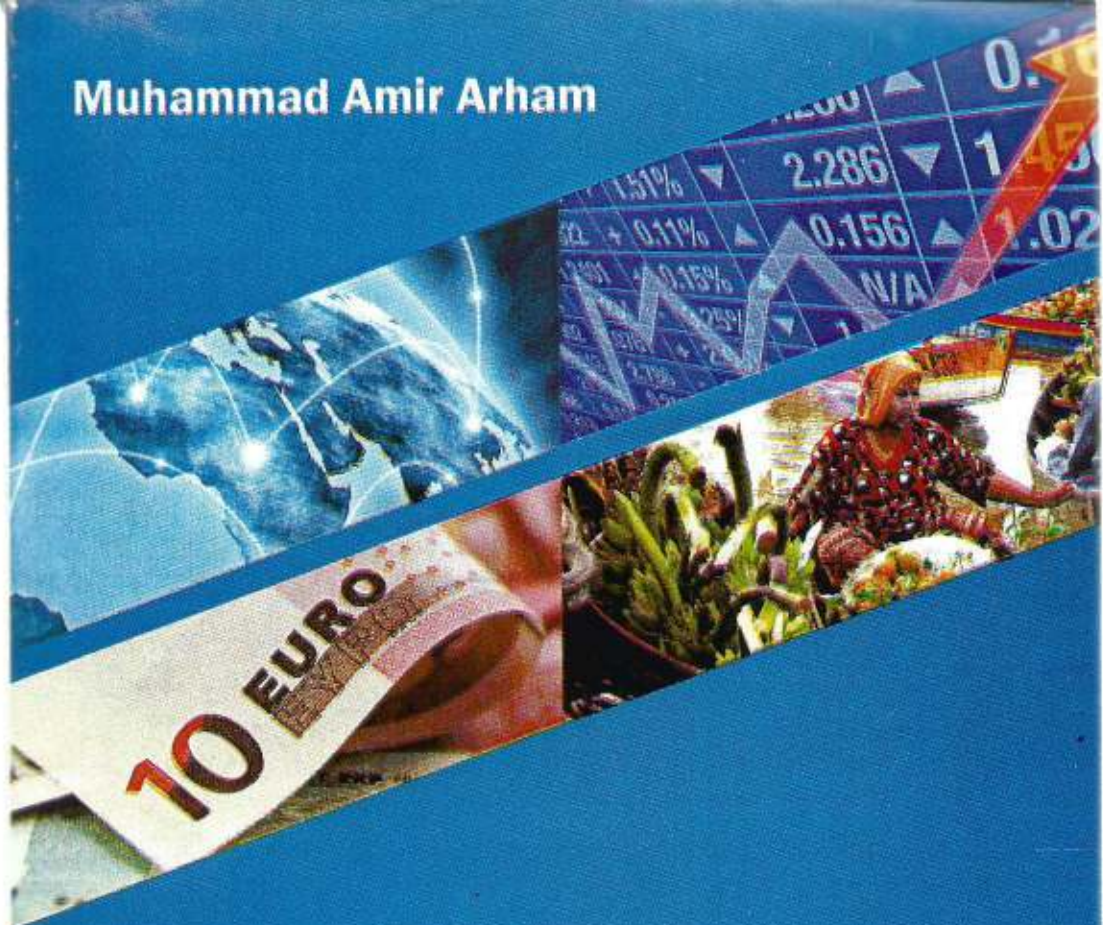


Muhammad Amir Arham



REGULASI KEBIJAKAN EKONOMI & DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN **INDONESIA**

Pengantar :
Dr. Setyanto Prawira Santosa, S.E., MA.



**REGULASI KEBIJAKAN EKONOMI
DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PEREKONOMIAN INDONESIA**

Muhammad Amir Arham



**Penerbit
UNG PRESS
Universitas Negeri Gorontalo**

Regulasi Kebijakan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia

©Muhammad Amir Arham
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Perpustakaan Nasional RI dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-602-99280-1-3

Cetakan November 2013

- I. Beberapa Regulasi dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Indonesia
 - II. Moral Hazard dan Perburuan Rente Mewarnai Perekonomian
 - III. Beberapa Kebijakan Ekonomi Kontemporer
 - IV. Jejak Langkah Arah Perekonomian Indonesia
-

Diterbitkan Oleh:

UNG Press

Universitas Negeri Gorontalo

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo

Dicetak : Percetakan "Cahaya Patra"

Jalan Bali Komp. Hafair Blok E No. 3 Kota Gorontalo

Cp. 0822 9195 9257 – 0813 569 700 45

Karya ini saya dedikasikan kepada:

Kedua orang tuaku

Rini Amir Arham

Itulah Hyvatia Dihyan Calysia

Tania Myra Landrakanti

Muhammad Merlana Tsagii Danawi

Kata Pengantar

Banyak hal yang dapat dikritisi berkaitan dengan kebijakan dan regulasi yang dijalankan pemerintah saat ini. Dalam banyak kesempatan, termasuk ketika di kelas, manakala saya memberikan perkuliahan, terutama pada program Doktorat agar para dosen muda dan mahasiswa yang berlatih belakang akademisi untuk menulis berkaitan dengan regulasi-regulasi bidang ekonomi.

Sekaitan dengan itu, saya menyambut gembira atas diterbitkannya buku ini dari kumpulan tulisan dalam bentuk bunga rampai beberapa Regulasi Ekonomi Beserta Implikasi terhadap Perekonomian Indonesia yang disusun oleh Sdr Muhammad Amir Arham peserta (alumni) Program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran.

Kemampuan penulis dalam merangkum berbagai diskusi selama mengikuti mata kuliah Ekonomi Politik dan Regulasi yang saya bimbing, benar-benar menggunakan sehingga bisa dituangkan kedalam suatu buku untuk dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan para pembaca yang tidak mengikuti perkuliahan tersebut.

Di masa lalu ekonomi politik adalah ilmu yang berusaha memberikan nasehat-nasehat kepada para negarawan tentang bagaimana cara mengelola urusan ekonomi agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. Namun sekarang telah beralih lebih menekankan kepada pengaturan pasar atau kegiatan sektor-sektor ekonomi di suatu negara.

Saya yakin bahwa pemikiran penulis yang mengaitkan landasan teori Ekonomi Politik dan Regulasi dengan fakta nyata di lapangan, akan dapat menambah perbendaharaan ilmu ekonomi khususnya yang fokus terhadap masalah regulasi. Saya berharap akan dapat mengundang minat para pembaca yang ingin lebih memperdalam masing-masing materi yang disinggung dalam buku ini.

Semoga hasil kerja sdr Muhammad Amir Arham dapat membawa manfaat bagi pembacanya serta dapat menambah wawasan kita di dalam mengembangkan pengetahuan dan ilmu yang kita tekuni.

Dr. Setyanto Prawia Santosa, S.E., MA.

(Dosen Ekonomi Politik dan Regulasi FEB Unpad,
Mantan Direktur Utama PT. Telkom Tbk.,
Mantan Direktur Utama PT. INTI (Persero),
Mantan S.kjen Memparposel RI dan
Mantan Deputy Meneg BUMN)

Pengantar Penulis

Tidak dapat dipungkiri, kondisi makro ekonomi nasional pasca krisis lebih dari satu dasawarsa yang lalu terus mengalami perbaikan. Meskipun akar masalahnya belum tertangani dengan baik, masalah-masalah itu sifatnya klasik seperti pelayanan belum efisiensi, mata rantai birokrasi masih panjang, kondisi infrastruktur masih minim dan sebagian mengalami kerusakan, kondisi sosial politik dan kelembagaan pemerintah daerah belum memberikan kontribusi signifikan untuk mendorong perkembangan ekonomi, kasus korupsi dan pungutan yang membebani pelaku usaha masih terus berjalan secara masif.

Hal ini berdampak terhadap peringkat daya saing nasional belum beranjak dari posisi paling bawah dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Selain itu, sebagian kebijakan yang ditelorkan oleh pemerintah belum mampu menjawab secara keseluruhan masalah-masalah klasik. Meskipun diakui oleh banyak kalangan perekonomian Indonesia memberikan ekspektasi yang cukup besar ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, terutama pasca krisis global. Indonesia bersama China dan India mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri sekitar 6 (enam) persen, akan tetapi dari realita yang ada pertumbuhan belum banyak memberikan dampak secara luas. Malahan cenderung bersifat anomali, karena daya saing masih sangat rendah ditambah peringkat indeks pembangunan manusia masih berada di bawah level beberapa negara Asia lainnya.

Elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja sangat rendah, atau mengalami penurunan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Ini indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang berkualitas, lebih banyak didorong pada konsumsi, atau sektor-sektor *non tradable*. Sementara industri manufaktur relatif mengalami penurunan, sekaligus memberikan signal bahwa terjadi deindustrialisasi. Antisipasi terhadap hal ini tentu perlu

dilakukan perbaikan dari aspek kebijakan publik melalui regulasi beberapa aturan atau payung hukum terhadap kegiatan ekonomi nasional maupun perekonomian daerah.

Upaya ke arah itu sudah ada, regulasi maupun paket kebijakan insentif untuk mendorong perkembangan ekonomi sudah banyak dilakukan. Namun hasilnya belum optimum, atau sebagian regulasi itu tidak berjalan pada implementasinya karena banyak kendala atau benturan yang belum dibenahi secara terintegrasi. Daftar negatif investasi belum tuntas, rupiah cenderung mengalami pelemahan beberapa bulan terakhir, pada akhirnya pertumbuhan ekonomi terkoreksi.

Kaitannya dengan hubungan keuangan pusat dan daerah, pemerintah memiliki *political will* untuk membuat atau mereformulasi kembali UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), arah reformulasi UU tersebut adalah memperluas basis pendapatan daerah. Selain itu perbaikan infrastruktur, terutama listrik yang selama ini menghambat daya tarik investasi. UU kelistrikan juga sudah dilakukan revisi setelah ada pembatalan dari MK karena dianggap terlalu liberal, dalam jangka panjang dapat merugikan rakyat (konsumen), dan bententangan dengan konstitusi negara.

Selanjutnya, masalah pekerja migran dan TKI seolah tidak berkesudahan, kekerasan dan kematian seolah masih menjadi pemandangan biasa. Kebijakan pemerintah terhadap perlindungan sudah sangat jelas melalui UU Ketenagakerjaan, tapi masalahnya lagi-lagi pada implementasinya. Akar masalah dorongan dan tarikan pekerja migran juga seolah tidak terjamah, sepanjang itu tidak terselesaikan persoalan pekerja migran dan TKI bermasalah selalu hadir. Setidaknya penulis berasumsi pokok persoalannya, yakni kemiskinan dan perlindungan yang lemah.

Dengan perbaikan beberapa masalah pokok di atas diharapkan secara keseluruhan perekonomian kita makin membaik dan kompetitif untuk menghadapi pasar bebas, terutama penerapan ASEAN – China Free Trade Area (AC-FTA) yang mulai berlaku efektif 1 Januari 2010. Masalahnya ada kekuatan dari sebagian akademisi maupun pelaku usaha, AC-FTA secara konsepsional amat baik, tapi dalam implementasinya terutama penekanan prinsip kompetisi,

kemungkinan Indonesia lebih cenderung menjadi konsumen ketimbang sebagai produser. Pada akhirnya produk-produk luar negeri, terutama China akan mendominasi pasar Indonesia. Jauh sebelum AC-FTA berlaku, produk-produk China yang murah sudah menyerbu pasar Indonesia. Ini nyata akan merugikan Indonesia dalam sistem perdagangan internasional, karena itu di dalam buku ini juga dibahas sekilas dampak dari penerapan AC-FTA.

Sekalipun AC-AFTA belum efektif berlaku beberapa tahun yang lampau, persoalan bangsa yang cukup "kronis" yang mengancam perekonomian dalam jangka panjang, yakni makin membanjirnya barang impor produk pertanian. Padahal bangsa ini dikenal sebagai bangsa agraris, memiliki lahan yang cukup luas nan subur. Potensi perikanan dan hasil laut sangat besar, tapi kenyataannya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat kebijakan impor masih tetap jalan. Tentu saja kegiatan impor cukup mengganggu *balance of payment* negara kita dengan negara lain, terutama China. Kegiatan impor akan cenderung makin kuat jika sekiranya UU Pangan akan diterapkan karena daerah diberikan kewenangan yang luas untuk merancang, mengelola maupun kegiatan ekspor-impor pangan, juga pedagang memiliki keleluasaan mengelola ketahanan pangan, pada saat yang bersamaan badan penyanggah dikurangi kewajibannya.

Persoalan nyata, dan ini menjadi hambatan serius dalam perekonomian kita, sekalipun pemerintah terus melakukan regulasi, munculnya masalah-masalah penyalahgunaan wewenang dari sebagian aparat pemerintah. Kasus pengemplang pajak, korupsi dan penyelewengan menjadi ganjalan perbaikan ekonomi, regulasi tentang remunerasi belum membuahkan hasil yang optimal malah menciptakan ketimpangan pendapatan dengan aparat lain. Belum lagi muncul modus operandi untuk menggerogoti uang negara, dimana banyaknya makelar kasus untuk sektor hukum dan ekonomi sangat mengganggu pemulihan ekonomi.

Ditambah hasrat dan "syahwat" perilaku elit politik berkeinginan memperbesar anggaran untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah konstituenya, namun caranya kurang elegan yang justru dapat menciptakan distorsi

ekonomi, terutama ketimpangan antar wilayah, serta bertentangan dengan aturan-aturan lainnya yang sudah dibuat.

Kebijakan-kebijakan lain yang kerap dikeluarkan pemerintah terkadang tidak memiliki urgensi, pada akhirnya akan menimbulkan biaya yang tinggi. Kebijakan redenominasi rupiah oleh BI barangkali menjadi contohnya, kebijakan ini tidak terlalu urgen dan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi sangat kecil. Sementara itu untuk mendorong badan usaha negara, pemerintah menempuh kebijakan privatisasi. Kebijakan ini pada dasarnya baik, namun terkadang dalam implementasinya menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, seperti penjualan saham Krakatau Steel lewat *Initial Public Offering (IPO)* ditengarai dijual dengan harga murah.

Kita berharap di tengah kondisi perekonomian yang terus membaik, perhatian pemerintah terhadap pelaku ekonomi kecil dan menengah makin kuat. Tapi dalam realitasnya, dari segi kebijakan publik porsi perhatian UMKM masih kecil dibandingkan dengan usaha-usaha besar, meskipun pada kenyataannya UMKM memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDB nasional lebih dari 50 persen. Sembari memperhatikan kebijakan pengelolaan BBM sebagai komoditi strategis, tidak jarang pemerintah kerap dalam posisi yang serba salah. Bilamana harga minyak dunia meroket, pilihannya tidak banyak, yakni menambah porsi subsidi atau menaikkan harga BBM.

Tapi terbaca selama ini, pemerintah lebih menjaga kebijakan populis dengan mempertahankan harga yang berlaku, berarti konsekuensinya menambah subsidi. Tingginya subsidi jika dibiarkan akan mengganggu *sustainable* fiskal, serta menciptakan kondisi anggaran yang tidak sehat. Hal ini tidak banyak berubah pada APBN 2013 dimana nilai subsidi begitu besar sementara belanja publik jauh di bawah yang justru subsidi lebih banyak dinikmati oleh masyarakat *decile* atas. Penyusunan APBN, elit politik cenderung menghindari resiko dengan mempertahankan subsidi, sekalipun UU APBN memandatkan bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga, namun mereka tetap ragu dan maju mundur. Apalagi dalam tahun politik menaikkan harga BBM resiko politik lebih

menjadi pertimbangan utama ketimbang resiko ekonomi dan *sustainable fiscal*.

Pada akhirnya kelihatan pemerintah maju mundur mengambil keputusan terkait dengan kenaikan harga BBM, kebijakan yang lamban justru dapat menciptakan masalah baru, terutama inflasi. Respon kebijakan pemerintah yang lamban juga akan merugikan posisi Indonesia, sentimen negatif muncul dari pihak asing dalam memandang perekonomian, karena itu Indonesia dipandang bukan tujuan utama investasi. Peringkat utang menurun dari *positive outlook* menjadi *stable outlook*, artinya *investment grade* makin menjauh dari Indonesia. Padahal kenaikan harga BBM merupakan keharusan, dalam perspektif ilmu ekonomi hitung-hitungannya teramat jelas. Meski kita semua menyadari dalam jangka pendek menaikkan harga BBM cenderung menciptakan *shock* ekonomi, tetapi jangka panjang justru akan menyelamatkan perekonomian. Namun bila kebijakan menaikkan BBM tidak dilakukan tepat waktu (lewat momentum) akan menciptakan inflasi, serta tingginya konsumsi BBM akan mendorong peningkatan impor minyak yang memiliki efek terhadap tekanan rupiah.

Konsumsi BBM seperti ini akan naik secara terus menerus setiap tahunnya, hal ini akan memberikan efek negatif meningkatnya impor BBM. Cadangan dollar akan terkuras untuk membiayai impor, implikasi selanjutnya terhadap defisit neraca perdagangan. Defisit yang besar, akan berpengaruh terhadap nilai uang domestik, langkah kebijakan otoritas moneter atas kondisi ini dengan melakukan pelambatan ekonomi, bersamaan dengan paket kebijakan fiskal. Tapi nampaknya paket kebijakan fiskal belum terasa sehingga pertumbuhan ekonomi melambat, apalagi gambaran APBN 2014 kurang mencerminkan pro pertumbuhan dalam menghadapi momentum politik tahun depan.

Hal-hal inilah yang digambarkan dalam buku ini. Meskipun penulis sadar bahwa buku yang ada di tangan para pembaca yang budiman masih banyak yang belum diulas secara tuntas. Tapi paling tidak apa yang terpaparkan dalam buku ini merupakan potret perjalanan perekonomian kita. Terutama masalah-masalah regulasi dan kebijakan sepanjang tahun 2009 sampai 2013. Tentu saja ada banyak paket kebijakan

atau UU maupun peraturan yang memberikan relasi terhadap perkembangan ekonomi nasional luput dari perhatian penulis.

Luputnya perhatian itu sebagai indikasi bahwa itulah keterbatasan manusia. Tapi ini nikmat dan hidayah yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah kepada penulis, sebab di tengah keterbatasan dan kesibukan masih dapat menyisakan waktu luang. Sebagai catatan, sebagian artikel ini dibuat semasa masih aktif kuliah S3 dan yang lainnya terekam setelah kembali aktif mengajar. Kegelisahan dan keingintahuan hal-hal yang bersifat *up to date* masih dapat direkam walau tidak utuh. Sembari disibukkan dengan studi S3 disilipkan waktu untuk menulis, selain dari hasil bacaan maupun informasi dari perkuliahan memunculkan ide dan gagasan yang segar. Tulisan yang dibuat ini sengaja lebih difokuskan pada kajian-kajian ekonomi kebijakan dan regulasi, karena memang menjadi minat penulis. Sekaligus merefleksikan apa yang sesungguhnya terjadi dalam perekonomian kita kurun waktu tersebut.

Sebagai orang yang dalam tahap belajar, tentu masih banyak kekurangan untuk merefleksikan pikiran-pikiran. Atas kesadaran itu, penulis membuka ruang yang lebar untuk diberikan masukan dan koreksi yang konstruktif untuk memperbaiki diri dan penyempurnaan karya-karya berikutnya, terutama isi buku ini. Semoga sumbangsih pikirannya memberikan manfaat dan perbaikan.

Sembah sujud kepada Allah SWT., atas karunia, rahmat dan hidayahNya sehingga buku ini dapat disusun dan dicetak. Terima kasih yang tidak bertepi kepada kedua orang tuaku yang selalu mendoakan anaknya untuk sukses dalam meraih cita-cita. Istri dan anak-anaku, ketabahannya sangat luar biasa, di tengah keterbatasan ekonomi mereka sangat *survive* mendukung kelanjutan studiku, meski mereka saya tinggalkan. Terima kasih, spesial kepada bapak Dr. Setyanto P. Santosa, S.E., MA., selama memberikan perkuliahan mata kuliah Ekonomi Politik dan Regulasi banyak menyiapkan ruang untuk berdiskusi dengan beliau, pengalamannya sebagai praktisi (mantan Dirut PT. Telkom Tbk (Persero), Mantan Dirut PT. INTI (Persero), Sekjen Departemen Parpostal, maupun mantan Deputy Meneg BUMN) sangat kaya dan informatif berkaitan dengan masalah-masalah regulasi.

Pak Setyanto dalam banyak kesempatan mengugah kami sebagai akademisi untuk selalu "gelisah" melihat realitas yang ada. Hasil "Kegelesahan" dan ketidaknormalan keadaan (*governmentless*), terutama beberapa kebijakan pemerintah dalam implementasinya tidak berjalan harus ditulis. Bagi saya, menulis bukan karena anjuran beliau tapi justru makin memberikan pelumas apa yang sudah saya lakukan selama ini. Setidaknya meskipun tidak sesering mungkin menulis tapi sudah dilakukan sebagaimana yang ada di tangan pembaca yang budiman. Berkaitan dengan itu, beliau dengan tangan terbuka di tengah kesibukannya meluangkan waktunya untuk memberikan kata pengantar buku ini.

Demikian pula, terima kasih kepada sejawat dan relasi yang selalu memberikan inspirasi pemikiran, tidak dapat saya sangkal kontribusi mereka, sehingga buku ini dapat disusun. Inilah secuil tanggungjawab sebagai seorang akademisi untuk membuat buku, meski buku ini sifatnya bunga rampai. Tapi apapun bentuknya, sebuah buku adalah jendela dunia dan pintu ilmu. Jendela tempat titik horizon memandang luasnya cakrawala keilmuan, sementara pintu adalah rongga untuk masuk ke perhelatan dunia kecendekiaan. Semoga buku ini dapat menjadi pematik lahirnya karya-karya yang lain dari kolega saya di UNG, untuk menghadapi tahun buku (2014). Sekaligus dapat memberikan syafaat bagi umat dan orang banyak, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang banyak.

Corontalo, November 2013

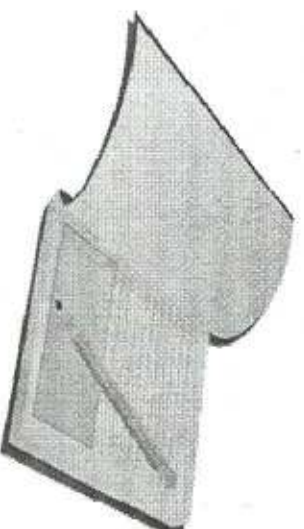
Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Pengantar Penulis	vi
Daftar Isi	xiii
MAGIAN PERTAMA: BEBERAPA REGULASI EKONOMI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA	1
Dampak Perubahan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Perekonomian	3
Regulasi Kebijakan Kelistrikan, Menghapus Monopolistik PLN	9
Regulasi Ketenagakerjaan, Akar Masalahnya Kemiskinan dan Lemahnya Perlindungan TKI	18
Implikasi Penerapan AC-FTA Tahun 2010	27
Negeri Importir: Implikasi Kebijakan yang Kurang Berpihak	37
Undang-Undang Pangan, Kebijakan Untuk Melindungi Kepentingan Siapa?	54
BAGIAN KEDUA: MORAL HAZARD DAN PERBURUAN RENTE MEWARNAI PEREKONOMIAN	58
Korupsi Pajak dan Kegagalan Kebijakan Reformasi Birokrasi	59
Negeri Makelar, Dampaknya Terhadap Perekonomian	65
Dana Aspirasi Konstituen, Kemungkinan Makin Memperparah Kesenjangan Fiskal	69
Penguasaan Sumberdaya Lokal dan Ketimpangan Distribusi Pemacu Kekerasan	76
Pola Penganggaran dan Kebijakan Koruptif	81
Politik Berwajah Ganda Dalam Kebijakan Ekonomi	86

BAGIAN KETIGA: BEBERAPA KEBIJAKAN EKONOMI KONTEMPORER	91
Kebijakan Redenominasi Rupiah, Apa Dampaknya Terhadap Perekonomian?	92
Perubahan Peraturan Bank Indonesia; Kemungkinan Dampaknya	96
Kebijakan Privatisasi BUMN; Kasus Krakatau Steel	101
Kebijakan Pengembangan UMKM; Anak Tiri yang Menghidupi Perekonomian Nasional	107
Memperhatikan Kebijakan Populis di Tengah Meroketnya Subsidi BBM	112
Kebijakan Subsidi, Pemerintah Seperti Menari "Poco- Poco"	117
Rumitnya Kebijakan Subsidi BBM di Tahun Politik	122
Kebijakan Menaikan Harga BBM, Upaya Mendorong Perbaikan Kesejahteraan	127
Paket Kebijakan Ekonomi, Efektifkah Menstabilkan Rupiah?	133
BAGIAN KEEMPAT: JEJAK LANGKAH ARAH PEREKONOMIAN INDONESIA	139
APBN Tidak Sehat, Elit Politik Menghindari Resiko	140
Peringkat Utang Indonesia Menurun, Apa Dampaknya?	145
Perekonomian Stabil: Peringkat IPM Turun dan Daya Saing Melorot	151
Jangan Bangga Dengan Capaian Target Pertumbuhan Ekonomi	155
Membaca Arah Perekonomian Menjelang Tahun Politik	160



BAGIAN PERTAMA: BEBERAPA REGULASI EKONOMI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA



Dampak Perubahan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Perekonomian

Revisi (reformulasi) Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) menjadi UU No. 28 Tahun 2009 telah disahkan oleh pemerintah bersama DPR RI. Reformulasi UU PDRD diperlukan sebagai konsekuensi dari penerapan desentralisasi fiskal, meskipun jika dilihat dari jangka waktu pelaksanaan desentralisasi sudah cukup lama yang mulai berlaku efektif 1 Januari 2001 lalu. Hakekatnya, pemerintah menginginkan basis penerimaan daerah lebih diperluas untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan membuka ruang memperkecil ketergantungan transfer dari pusat.

Di dalam UU PDRD, dijelaskan reformulasi dilakukan untuk meningkatkan PAD dengan mengeluarkan lima paket kebijakan baru. *Pertama*, menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor dari 5 persen menjadi 10 persen, serta menerapkan pajak progresif. Dasar penilaian progresifitas tarif adalah nilai jual kendaraan bermotor, kepemilikan, usia kendaraan bermotor, dan jenis bahan bakar. *Kedua*, tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dinaikkan dari 10 persen menjadi 20 persen. Penerapan pajak progresif juga diterapkan di jenis pajak ini. Ukurannya adalah nilai jual kendaraan bermotor, kepemilikan, dan usia

kendaraan bermotor. Selain untuk meningkatkan PAD, kebijakan ini sekaligus sebagai disinsentif untuk membeli kendaraan bermotor sehingga mampu menghemat konsumsi BBM. *Ketiga*, menaikkan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari 5 persen menjadi maksimum 10 persen. Pajak jenis ini menganut diskriminasi tarif, yakni dibedakan untuk kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan jenis bahan bakar. Kebijakan *keempat* adalah pemberlakuan pajak parkir dengan menaikkan tarif maksimum dari 20 persen menjadi 30 persen. Kebijakan *kelima* adalah pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas.

Dari lima paket kebijakan (reformulasi) UU PDRD tersebut secara substantif memiliki empat sasaran utama; Sasaran *pertama* pemerintah menginginkan daerah berperan optimal dalam menurunkan konsumsi BBM, sasaran *kedua* memperbaiki moda transportasi darat yang semrawut sebagai sumber kemacetan lalu lintas, sasaran *ketiga* yaitu meningkatkan produktifitas masyarakat dengan adanya penurunan kemacetan, dan sasaran *keempat* meningkatkan PAD.

Berkaitan dengan peningkatan PAD, dalam UU PDRD juga dilakukan reformulasi pajak rokok dan hiburan. Dalam pasal 29 ditentukan tarif pajak rokok ditetapkan 10 persen dari cukai rokok, pajak rokok berdasarkan ketentuan dalam UU PDRD akan dibagikan berdasarkan proporsi jumlah penduduk, semakin besar jumlah penduduk suatu daerah makin besar proporsi penemuannya, sedangkan hasil penerimaan pajak ini provinsi dan kabupaten/kota minimal mengalokasikan 50 persen untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwewenang.

Sementara yang terkait dengan pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35 persen, khusus untuk hiburan berupa permainan ketangkasan, disko/klub malam, karaoke, mandi uap, panti pijat dan pagelaran busana, serta konteks kecantikan, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi 75 persen. Sedangkan hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan maksimal 10 persen. Ketentuan lain di dalam UU PDRD dan penerapannya motor tahun 2014 dibandingkan dengan tarif pajak

daerah lainnya yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan kedua jenis pajak itu tercatat dalam APBN hanya sebagian kembali ke daerah, mulai tahun 2014 secara langsung akan dipungut oleh daerah.

Melihat sasaran pertama kebijakan di atas, menurunkan konsumsi BBM memang perlu terus dilakukan karena Indonesia termasuk negara yang boros mengkonsumsi BBM, sebagai contoh pada tahun 2006 saat konsumsi BBM di negara-negara lain berada di bawah 1 juta bph, konsumsi BBM Indonesia mencapai 1,84 juta barrel per hari (bph). Meskipun tidak dapat dipungkiri pemerintah telah mengupayakan untuk menurunkan konsumsi BBM, sehingga tahun 2008 sedikit turun menjadi 1,6 juta bph, dan diharapkan tahun ini turun sebesar 1,5 juta bph. Tapi usaha ini tidak gampang. Meskipun pemerintah tetap optimis dengan target jangka panjang seperti disampaikan oleh Dirjen Migas Departemen ESDM, bahwa tahun 2025 pemerintah menargetkan konsumsi BBM di bawah 1 juta bph. Di tahun 2025 di bawah 1 juta barrel atau setidaknya sama dengan Jepang dan Jerman di 2006.

Dengan adanya gerakan hemat BBM, maka penggunaan energi fosil dapat ditekan sehingga bisa mengurangi impor BBM, sebab Indonesia sudah termasuk negara net imported BBM. Dengan adanya kebijakan reformulasi UU PDRD daerah turut memikul beban untuk menurunkan konsumsi BBM. Hanya saja kebijakan penurunan konsumsi ini sejatinya dibarengi dengan kebijakan yang simultan untuk mendorong penggunaan energi alternatif seperti penggunaan biodiesel. Program ini nampaknya sudah tidak menggemakan lagi sehingga dikuatirkan konsumsi BBM tetap tinggi.

Sedangkan berkaitan dengan kemacetan lalu lintas terutama di ibukota bukan merupakan problem yang tidak berdiri sendiri, tapi banyak hal yang terkait di dalamnya terutama masalah kebijakan transportasi di tanah air. Bila menengok kebelakang pertumbuhan kendaraan bermotor merupakan dampak langsung dari kemajuan ekonomi masyarakat, selaras dengan itu kepemilikan kendaraan pribadi terus naik. Kemudian

jumlah kendaraan yang beredar di jalan makin bertambah, sementara volume jalan tidak tumbuh secara signifikan. Misalkan perbandingan pertumbuhan kendaraan di Jakarta sebesar 12,2 persen sementara pertumbuhan volume jalan hanya tumbuh sekitar 0,01 persen. Jadi sekalipun pertumbuhan pembangunan arus jalan di Jakarta tidak akan mampu mengikuti laju pertumbuhan kendaraan.

Selain itu, kemacetan lalu lintas di ibukota tidak dapat dipisahkan dari dampak kebijakan transportasi yang bersifat kolusif, banyak ahli transportasi merekomendasikan serta melihat pengalaman di negara-negara yang sukses mengatasi kemacetan lalu lintas alternatif yang paling baik, yakni mengembangkan *mass transportation*, seperti monorel, kereta api komuter dan kereta api dalam kota. Namun yang terjadi jenis moda transportasi ini diabaikan, bahkan beberapa jalur kereta api di ibukota telah dihapus, justru memberikan ruang yang lebih lebar pada pengadaan bus-bus AKAP milik beberapa konglomerat. Pada akhirnya kemacetan sudah menjadi pemandangan keseharian, Kompas pernah merilis kerugian lebih dari Rp 28,1 triliun per tahun (nilai waktu, pemborosan bahan bakar, dan biaya kesehatan) akibat kemacetan di Jakarta.

Beberapa kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membatasi kepemilikan kendaraan pribadi yang dianggap sebagai penyumbang tertinggi kemacetan, seperti penerapan *three in one* tapi program ini tidak berjalan efektif karena dipenuhi perijinan; program *waterway* di Jakarta dengan memanfaatkan Kali Ciliwung tapi mandek, sungai ini makin dangkal dan dipenuhi sampah; pembangunan monorel masih macet karena tidak didukung oleh pendanaan yang memadai dan dukungan kebijakan yang setengah hati, bahkan akhirnya program ini dihentikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Tiang pancang yang tertanjur dibangun menambah ketidak elokan wajah ibukota, karena tidak ada fungsinya sama sekali.

Kini pemerintah mencoba mengatasi kemacetan dan kepemilikan kendaraan pribadi dengan menerapkan pajak progresif dengan mengubah UU Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. Hanya saja pelaku industri otomotif tidak setuju dengan didukung oleh Departemen Perindustrian, juga pihak kepolisian sendiri. Menurut pelaku usaha industri otomotif, pengenaan pajak progresif kendaraan akan memperlambat industri otomotif (mobil), padahal industri otomotif penopang utama pertumbuhan ekonomi, selain sektor pertanian dan komunikasi.

Khusus berkaitan dengan peningkatan PAD, pemerintah sendiri memproyeksikan reformulasi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) mampu meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD) sekitar 41 persen – 83 persen untuk provinsi dan 37 persen untuk kabupaten/kota. Dapat dibayangkan dari hitung-hitungan pihak pemerintah, jika bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 50 persen, potensi peningkatan PAD sebesar 42 persen atau Rp. 75,56 triliun. Jika tarif rata-rata sejumlah pajak tersebut dinaikkan 100 persen, maka potensi PAD mencapai 83 persen atau mencapai Rp 90,96 triliun.

Asumsi saya dari empat sasaran reformulasi UU PDRD, paling mungkin optimal sasaran peningkatan PAD, sementara sasaran lain sulit diwujudkan.

Secara teoritis keinginan mendorong daerah ikut serta menghemat BBM mengurangi kepemilikan kendaraan pribadi, tapi jumlah kendaraan pribadi yang paling banyak justru berada di pusat-pusat kota yang membutuhkan mobilitas tinggi. Sementara daya dukung transportasi massa yang nyaman, aman, bersih dan tepat waktu tidak tercipta, sehingga sasaran itu sulit tercapai. Konsumsi BBM dipastikan penurunannya tidak signifikan, karena pemilihan kendaraan pribadi tidak berubah.

UU PDRD ini secara substansi kelihatan ideal, terutama untuk mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah, sebab sebagian besar kemampuan kapasitas fiskal daerah amat kecil.



Target jangka panjangnya daerah makin mengurangi ketergantungannya terhadap transfer dari pusat (seperti DAU). Namun kalau dicermati UU PDRD yang akan diterapkan setelah masing-masing daerah (provinsi, kabupaten/kota) membuat Perda sebagai penjabaran UU, saya menduga kurang berjalan optimal. Apalagi masing-masing daerah memiliki kapasitas ekonomi yang berbeda dampaknya terhadap penerimaan (*revenue*) berbeda pula. UU PDRD ini hanya menguntungkan provinsi dan daerah perkotaan, sebab pajak kendaraan ditangani oleh provinsi, sementara pajak hiburan dan turunannya lebih menguntungkan kota-kota yang sudah mapang. Sehingga asumsinya daerah tetap akan bergantung banyak terhadap DAU. Dalam pandangan Yustika (Investor Daily, 18/8/2009) UU PDRD kemungkinan akan menyelesaikan masalah alokasi, tapi problem keterbatasan anggaran tetap muncul. 



Regulasi Kelistrikan, Menghapus Monopolistik PLN

 listrik bukan lagi sebagai barang mewah (*luxurious goods*) dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi sudah menjadi barang normal (*normal goods*), dimana umumnya jenis barang seperti ini jika *income* kelompok masyarakat mengalami kenaikan, permintaan terhadap barang tersebut juga meningkat. Tidak mengherankan jika kemudian permintaan kebutuhan listrik terus meningkat, sementara *supply* daya, pertumbuhannya melambat. Hal ini berdampak terhadap terjadinya disparitas antara *supply* dan *demand*, adanya disparitas mengakibatkan kelangkaan. Normalnya, jika terjadi kelangkaan banyak perusahaan tertarik memproduksi barang (*supply*) jika tidak ada hambatan (*barrier to entry*).

Pertanyaan yang patut kita ajukan, apa hambatannya sehingga listrik *supply*-nya terbatas sementara pasar (konsumsi) potensinya sangat besar?. Jawabnya tidak perlu terlalu canggih untuk menjelaskan, sederhana saja karena adanya struktur pasar monopoli dari PLN. Perusahaan lain penyedia jasa kelistrikan tidak dapat masuk ke



T. ALVA EDISON 1847 - 1931

industri ini karena ada hambatan (*barrier to entry*), hak monopoli PLN dipayungi undang-undang.

Hak monopoli diberikan pada PLN karena salah satu asumsinya, listrik menyangkut hajat hidup orang banyak (dalam teori ekonomi disebut *public utility*) karena itu perlu diurus sendiri oleh negara berdasarkan konstitusi negara. Jika pun ada perusahaan jasa listrikkan, hanya sebatas pada pembangkitan, sementara distribusi tetap dimonopoli PLN. Praktek pasar monopoli sudah barang tentu menimbulkan biaya sosial, dan masyarakat (konsumen) mengalami beberapa kerugian, terjadi kehilangan surplus konsumen dan surplus produsen, apalagi listrik yang dihasilkan oleh PLN hampir tidak ada substitusinya.

Beda halnya dengan bahan bakar minyak, ada beberapa substitusinya, jika harga BBM tinggi masyarakat dapat beralih menggunakan kayu bakar, atau konversi ke gas. Sementara listrik, apalagi sudah menjadi barang normal (kebutuhan) jika harganya tinggi, tidak ada pilihan konsumen, walaupun ada substitusi penerangan paling menggunakan lilin atau lampu teplok, tapi dalam kondisi modern seperti ini apa kita akan kembali pada zaman batu?.

Dengan adanya struktur monopoli, biaya sosial pasti muncul, kondisi ini disadari oleh pemerintah karena itu listrik diberikan subsidi, subsidinya kepada produsen (PLN) agar mereka menjual listrik ke konsumen lebih murah atau disebut dengan tarif dasar listrik (TDL). Selisih subsidi ke PLN setidaknya dilihat dari biaya pokok produksi (BPP), selama ini BPP listrik berada di kisaran Rp1.300 per kWh, sementara itu harga jual berupa TDL yang dinikmati konsumen berada di kisaran Rp. 630 per kWh. Sedangkan nilai total subsidi listrik tahun anggaran 2009 sebesar Rp 60,43 triliun dari APBN. Dilihat dari prognosa keuangan setiap tahun, terkesan PLN selalu menempati urutan pertama BUMN yang dikategorikan selalu merugi. Muncul pertanyaan berikut, kok monopoli tapi merugi terus? Fasilitas dan gaji karyawan PLN termasuk yang "gemuk", kantor PLN dimana-mana *executive class*, apalagi kantor pusatnya, apa yang salah?

Dampak lanjutan dari PLN yang terus merugi, pelayanannya menjadi tidak maksimal dimana-mana terjadi pemadaman listrik, termasuk Gorontalo. Bahkan pemadaman listrik sudah berskala massif dan intensitas pemadaman makin sering. Muncul joke-joke dimasyarakat, PLN bukan lagi perusahaan listrik negara tapi sudah menjadi perusahaan lilin negara, karena kinerja PLN yang tidak optimal, lilin akhirnya jadi laku. Dengan sering terjadi pemadaman disamakan dengan orang minum obat tiga kali sehari, pagi, siang dan malam terjadi pemadaman. Lalu ada juga joke lain yang tak kalah lucu dan menyegarkan, kalau mau bayar listrik di PLN, tanya yang dibayar konsumen itu nyalanya, atau matinya listrik? Biaya sosial lain yang ditanggung konsumen (baca masyarakat), sekalipun kerap terjadi pemadaman listrik, tapi biaya tagihan justru melonjak, belum lagi banyak alat-alat elektronik rumah tangga yang rusak.

Dalam konteks lebih luas, pemadaman listrik juga akan mengganggu kinerja industri nasional. Infrastruktur listrik yang minim tentu menjadi hambatan serius dalam kegiatan perekonomian, sebab salah satu variabel penting untuk menjadi daya tarik investasi, yaitu ketersediaan pasokan listrik yang memadai. Percuma saja pemerintah ambisius ingin menarik investasi sebanyak-banyaknya, sementara infrastruktur listrik sangat minim.

Dari kalangan internal PLN sendiri berulang kali menyampaikan alasan pemadaman bergilir, salah satunya karena biaya operasional yang minim, hal yang sama dikemukakan oleh serikat pekerja PLN, menurut mereka permasalahan PLN dan listrikkan muncul karena adanya kebijakan direktur keuangan yang memotong anggaran biaya operasi, termasuk biaya pemeliharaan sebesar 30-40 persen. Terjadinya pemadaman bergilir hampir seluruh wilayah bukan semata-mata kesalahan PT PLN, melainkan karena kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif dasar listrik sampai akhir tahun 2009 ini, dan subsidi yang diberikan pemerintah sangat terbatas. Jadi tidak mencukupi untuk biaya operasi dan investasi yang diperlukan PLN sesuai pertumbuhan permintaan listrik (Kompas Online, 11-12-2009).

Jika itu alasannya, apa iya? Sebab fakta dilapangan menunjukkan minat untuk berinvestasi pada sektor kelistrikan cukup tinggi, justru kendalanya lebih banyak dari PLN itu sendiri, karena mereka berfungsi sebagai regulator dan operator sekaligus. Dalam aktifitas ekonomi, suatu lembaga selain monopoli juga merangkap peran, kecenderungannya yang muncul yaitu inefisiensi, bahkan cenderung korupif karena besarnya kewenangan yang dipegang.

Pro Kontra Amandemen UU Ketenagalistrikan

Masalah kelangkaan listrik sudah dicoba diatasi oleh pemerintah, dengan diterbitkannya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2002, akan tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU tersebut pada tahun 2004. Alasan pemohon (serikat pekerja PLN) dikabulkan oleh MK, karena UU ini sarat dengan muatan alat kampanye ekonomi, terutama menarik investor di sektor ketenagalistrikan. MK berpendapat bahwa UU ini cenderung kurang melindungi kepentingan konsumen (masyarakat) karena lebih kuat alasan ekonominya, suatu UU harus mengacu pada UUD 1945. Masalah ekonomi acuannya pada pasal 33 yang dapat diterjemahkan bahwa setiap komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Alasan pemohon, UU Nomor 22 Tahun 2002 akan menjadikan produk listrik sebagai komoditas yang dapat dikompetisikan. Dampak yang timbul adalah akan mengurangi tingkat kesejahteraan rakyat karena harga listrik menjadi lebih mahal lagi.

Karena itu kemudian pemerintah melakukan amandemen UU Ketenagalistrikan dan telah disahkan oleh DPR pada tanggal 8/09/2009 lalu. UU Ketenagalistrikan yang baru (UU No. 30 Tahun 2009) memang masih cenderung "liberal", PLN bukan lagi sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Dalam UU tersebut pemerintah dan pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi regulasi dalam UU ketenagalistrikan. Meskipun bukan lagi pemegang PKUK, sebagai BUMN, PLN tetap akan mendapatkan prioritas sebagai pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk

kepentingan umum, namun jika PLN tidak sanggup maka swasta akan masuk dan PLN boleh melaksanakan proses bisnis *Business to Business* untuk menyediakan listrik bagi daerah-daerah tertentu. Pemerintah berkeyakinan bahwa UU Kelistrikan yang baru tidak akan membebani masyarakat, justru akan membantu meningkatkan elektrifikasi daerah-daerah yang kekurangan daya listrik. Selain itu, juga diatur regionalisasi tarif, asumsinya tarif regionalisasi akan membantu pemerintah untuk mengurangi subsidi dan menyalurkan subsidi kepada rumah tangga yang memang membutuhkan alokasi subsidi.

Akan tetapi sebagian pengamat masalah kelistrikan cenderung menolak UU yang baru ini, tapi substansi penolakannya juga kurang tegas, seperti dipermasalahkanya desentralisasi pengaturan penyediaan ketenagalistrikan. Dalam hal ini Pemda diberikan kewenangan lebih besar terutama dalam pengusahaan. Hal yang sama dilakukan oleh serikat pekerja PLN mereka menolak UU ini, anggapan mereka UU yang sekarang secara substansi tidak berbeda jauh dari UU sebelumnya yang dibatalkan MK. Persepsi yang dibangun oleh serikat pekerja PLN, masalah kelistrikan harus ditangani satu badan (pembangkitan sampai distribusi), jika dipecah-pecah justru akan menimbulkan konflik dan permasalahan baru. Selain itu, ada kecenderungan pemahaman yang dibangun oleh serikat pekerja PLN, dan tentu saja dikalangan internal PLN itu sendiri dengan disahkannya UU baru, maka potensi tarif listrik akan mengalami kenaikan (mahal) karena akan dikompetisikan. Belum selesai disitu, sekarang serikat pekerja PLN tengah berupaya membangun opini termasuk menolak pergantian direksi PLN, apalagi munculnya orang luar sebagai calon dirut cukup resistensi dari mereka.

Klaim persepsi sebetulnya masih merupakan asumsi yang kemungkinan dua-duanya salah atau justru benar. Tapi tergantung dari pelaksanaan dan juga kita lihat dari aspek teoritisnya. Umumnya perusahaan yang terbiasa disusui (subsidi) selamanya akan menikmati kondisi itu, tidak terbiasa berkompetisi. Semenjak PLN berdiri sejak itu pula disubsidi, hingga hari ini belum pernah ada cerita yang indah (baca: *profit*)

tentang PLN, yang ada kerugian terus mendera, sementara mereka monopolistik. Secara teoritik, sebagaimana diuraikan pada awal tulisan ini, praktek monopoli pasti akan selalu menimbulkan biaya sosial yang tinggi, kurangnya daya saing (kompetisi), inefisiensi dan sebagainya.

Sekarang yang perlu kita tanyakan kepada yang kontra terhadap UU yang baru, mau mereka apa? Apakah akan tetap bertahan dengan kondisi sekarang dan selamanya mau disubsidi? Padahal UU yang baru ini cenderung lebih terbuka memberikan peran kepada pihak swasta dan Pemda sebagai regulator, saya memakai kata cenderung sebab UU ketenagalistrikan yang baru masih memberikan peran yang luas terhadap PLN dalam kegiatan bisnis listrik. Swasta "belum" dimungkinkan masuk terutama di daerah pedesaan jika PLN masih mampu. Itupun swasta masih dititikberatkan pada pembangunan, sementara distribusionalnya tetap dalam kendali PLN.

Demikian halnya keterlibatan Pemda dan pemberlakuan tarif regional ada yang menolak, sementara praktek ini sebelumnya sudah berjalan lama. Pemerintah Kota Tarakan sejak tahun 2001 sudah menerabas rigiditas aturan pemerintah pusat (Kepres) tentang TDL, sebagai antisipasi seringnya pemadaman di kota itu, kemudian Pemkotnya berusaha menaikkan TDL. Status PLN cabang kemudian dirombak menjadi anak perusahaan PLN yang hingga saat ini terus mendapatkan profit. Hal yang sama dicoba dilakukan oleh Pemkot Palu dengan berupaya mendatangkan investor dari China untuk membangun PLTU, perusahaan ini telah berjalan beberapa tahun. Pada awal pengoperasiannya, para *stakeholders* (Pemkot Palu dan pemilik perusahaan) cukup lelah menunggu izin operasional dari PLN.

Setelah berjalan beberapa tahun, PLTU ini tidak optimal, sebab harga pembelian PLN dianggap terlalu murah (Rp. 505 kWh) harga /kWh yang ditawarkan oleh perusahaan minimal Rp. 550 kWh untuk tetap bisa *survive*, tapi PLN tetap *kenekuh* pada harga pembelannya. Pemkot Palu dan Pemrov Sulteng sudah beberapa kali melakukan mediasi antara PLN dan PLTU tetap mengalami jalan buntu, bahkan sudah dibawa ke pemerintah

pusat, tapi sepertinya PLN memiliki kerajaan sendiri, yang tidak mau patuh terhadap saran-saran pemerintah.

Dari kapasitas terpasang PLTU Palu sebelumnya kebutuhan listrik dapat terpenuhi secara minimal, akan tetapi yang saya tangkap justru memang PLN kurang memberikan apresiasi terhadap keberadaan PLTU tersebut, justru mereka mengusulkan kepada Pemrov Sulteng agar membeli PLTU itu, kemudian PLN yang akan mengoperasikannya. Jika tidak, untuk mengantisipasi pemadaman bergilir yang terus terjadi di Kota Palu dan sekitarnya ada usulan untuk membeli genset baru.

Saya patut menduga, jika PLN berpikir tentang kesejahteraan masyarakat, karena memang BUMN dibentuk membawa misi sosial bukan hanya orientasi profit, kenapa keberadaan PLTU di Palu tidak dioptimalkan, malahan cenderung "dirusak" keberadaannya oleh PLN itu sendiri, atau justru kenapa PLN lebih suka memakai genset ketimbang membeli daya dari PLTU. Tidak salah kemudian saya beranggapan, jika daya dibeli dari swasta maka peluang manipulasi makin sedikit, sebaliknya jika menggunakan genset, maka subsidi akan terus jalan, artinya biaya subsidi itu bisa "diatur" penggunaannya untuk kepentingan orang PLN.

Pemadaman listrik cukup memprihatinkan, pelaku industri pun kerap mengeluh dengan kondisi ini. Program 10.000 mw yang sudah dibangun oleh pemerintah yang dulu dikomando oleh Jusuf Kalla untuk sementara belum dapat diharapkan mengatasi kelangkaan pasokan listrik, awalnya ditargetkan akan beroperasi tahun 2009 bergeser ke tahun 2010. Sementara perencanaan pasokan listrik dan energi jangka panjang belum ada *blue print* yang jelas, terutama pemanfaatan sumber energi (gas dan batu bara). Kedua sumber energi ini pasokan untuk pasar internasional lebih diprioritaskan ketimbang pasar domestik. Hal yang sama program *biofuel* yang pernah digelorkan oleh pemerintah yang bersumber dari tanaman pohon jarak, justru mati suri. Anti klimaknya muncul skandal "*blue energy*" yang diprakarsai oleh staf khusus presiden, ternyata pesanan kosong.

Pemadaman listrik juga mencerminkan ironi, sebab pada umumnya daerah lumbung energi juga mengalami pemadaman yang intens, ini membuktikan bahwa PLN tidak bisa diharapkan

sendirian menyediakan listrik. Keberadaan UU Ketenagalistrikan yang baru harus disambut dengan baik, sembari masyarakat terus mengawasi pelaksanaannya. Peran swasta atau masyarakat dalam penyediaan energi listrik harus terus didorong, disamping itu diharapkan PLN membenahi diri karena peluang kompetisi memang ada dalam UU yang baru.

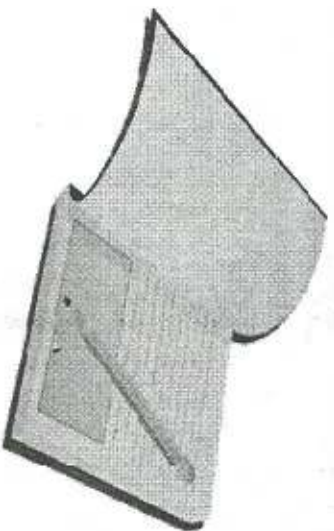
Bagi kita, dengan terbukanya pemain baru praktik monopoli yang memang terbukti tidak menguntungkan semua pihak akan terhapus. Kekuatan munculnya biaya tarif listrik akan semakin mahal tidak beralasan, justru disitulah pentingnya peran pemerintah baik pusat maupun daerah membuat regulasi penetapan tarif melalui kebijakan *floor price* atau *ceiling price*. Jika serikat pekerja PLN menolak UU Ketenagalistrikan yang baru, pertanyaannya mereka membela siapa, masyarakat atau kepentingan monopoli yang mereka nikmati puluhan tahun?

Kaitannya dengan pembenahan PLN, pemerintah melalui Kementerian BUMN akan melakukan perombakan direksi PLN. Lagi-lagi serikat pekerja PLN menolak rencana ini, termasuk menolak direksi dari luar. Apakah serikat pekerja PLN ini tidak sadar jika PLN adalah BUMN milik pemerintah (pemegang saham), pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan itu. Selain itu, tidak ada UU yang melarang orang luar PLN menjadi direksi. Orang luar yang memimpin PLN memang bersifat hipotetik, kemungkinan sukses atau gagal, tapi hal itu perlu dilakukan sebab telah bertahun-tahun orang internal yang memimpin PLN kinerjanya tidak lebih baik.

Sebaliknya sebagian besar BUMN yang berkinerja baik justru jarang dipimpin oleh orang dalam, tapi dari kaum profesional yang terkadang tidak sesuai dengan bidang yang digeluti. Anehnya lagi, serikat pekerja PLN beranggapan bahwa bisnis PLN orang internal PLN yang paling tahu, lagi-lagi kita patut bertanya bukankah selama ini PLN dipimpin orang internal PLN sendiri, tapi kinerja tetap buruk? Intinya, penolakan UU Ketenagalistrikan yang baru dan penolakan calon direksi PLN dari luar oleh serikat pekerja PLN cukup aneh? Pertanyaan saya makin bertambah, serikat pekerja PLN menjalankan agenda siapa? Bukankah selama berpuluh-puluh tahun PLN dipimpin dari

keluarga internal tapi tak kunjung mengalami perbaikan kinerja, malahan sebaliknya praktik *good corporate* masih jauh dari yang diharapkan. Wallahu 'alam!!





Regulasi Ketenagakerjaan, Akar Masalahnya Kemiskinan dan Lemahnya Perlindungan TKI

KI bermasalah yang bekerja di berbagai negara masih saja terus terjadi, penyiksaan dan pembunuhan seolah tidak mengenal perikemanusiaan. Kasus teranyar, pemancungan Suyati karena membunuh majikannya menyita energi sebagian masyarakat yang *care* terhadap kasus ini. Jika kasus-kasus semacam ini muncul, terutama jika menjadi *headline* pemberitaan media oleh pemerintah seolah sigap, terkesan sangat memperhatikan kepada mereka yang mengalami kekerasan. Sehingga yang nampak adalah penanganan yang reaktif, ibarat pemadam kebakaran ia bekerja jika terjadi kebakaran. Setelah padam apiinya, para petugasnya kembali ke markas mereka, dan sepanjang tidak ada kebakaran, mereka lebih banyak berdiam diri.

Kasus Sumiati, TKW dari Dompu NTB yang mengalami penyiksaan, mulutnya di gunting oleh majikannya di Arab Saudi, serta pembunuhan Kikim Komalasari TKW dari Cianjur kemudian jasadnya dibuang di tempat sampah yang mencuat akhir tahun lalu bukan kasus baru dan pertama. Peristiwa yang memulikan ini menggambarkan bahwa TKI begitu hinanya, seolah tidak memiliki martabat sama sekali, jika ia dianggap sebagai budak sekalipun semestinya tidak diperlakukan seperti sampah, atau binatang. Ini sudah berulang kali terjadi, bahkan kasus yang sama banyak terjadi hanya saja tidak terekspose secara luas oleh media.

Kasus pemancungan Suyati, dari segi usia, merunut pada aturan semestinya Suyati tidak bolehkan lagi menjadi TKI, ia menghadapi hukuman pancung seolah seorang diri, karena negara tidak hadir di sana. Pada saat dihukum pancung, pemerintah tidak mengetahui sama sekali, tak jauh berbeda saat proses persidangan kendati diklaim oleh pemerintah sudah dilakukan pendampingan hukum. Tapi faktanya keringanan hukum tidak didapatkan, bahkan makin mengindikasikan perhatian terhadap Suyati yang semestinya bertanggung-jawab tidak maksimal karena upaya banding tidak ada, sehingga pemerintah kerajaan Arab Saudi mengeksekusinya.

Jika ada kasus TKI serupa muncul seperti ini, tipikal pemangku kepentingan bersilat lidah, tindakannya defensif membela diri seolah sudah berbuat, bahkan ada Kementerian yang menangani masalah ini menterinya rajin mengiklan diri setiap usai menandatangani MoU tentang ketenagakerjaan sebagai bukti "keberhasilannya" membenahi regulasi ketenagakerjaan. Namun begitu masalah TKI muncul, pilakunya menganggap bahwa yang memiliki jangkauan kewenangan pelaksanaan, lembaga lain. Kasus pemancungan Suyati, sudah direpson oleh presiden meski sangat terlambat bila dibandingkan respon terhadap permasalahan yang mendera diri dan keluarganya, seperti SMS fitnah, pemberian negatif dari media asing, atau merasa jadi sasaran teroris.



Ini indikasi bahwa pemerintah begitu lemah memberikan perlindungan terhadap warganya, diplomasi terhadap negara tujuan pengiriman TKI begitu lemah, terutama TKW yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga (pekerja migran). Padahal mereka sangat berjasa

mendatangkan remitansi (devisa) terhadap negara, karena itu disandangkan gelar, TKI sebagai pahlawan devisa. Berdasarkan data Worl Bank, pada tahun 2009 remitansi yang didatangkan para TKI di luar negeri memberikan kontribusi sekitar 1,3 persen terhadap PDB atau sekitar 6.793 dollar AS. Keberadaan mereka menyumbang remitansi terhadap negara asal dan ekonomi global, sangat signifikan peran mereka, sekali pun hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga memungkin produksi barang dan jasa, implikasinya terhadap perputaran ekonomi global terus berjalan.

Dampak ikutan ekonomi atas kehadiran mereka cukup luas, menggiatkan bisnis perbankan, pengiriman barang dan uang, industri penerbangan dan firma hukum. Kondisi ini tentu saja menggiatkan banyak pihak, tidak hanya bagi TKI itu sendiri akan tetapi juga banyak berkepentingan, terutama Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTki). Jumlah PJTKI terus mengalami penambahan, jasa TKI (pekerja migran) seperti menjadi "tambang emas" buat mereka. Calo dan kepanjangan tangan para PJTKI bergentayangan keluar masuk kampung. Tempat-tempat sasaran beroperasi mereka di kampung-kampung jumlah penduduknya relatif padat, dan di kantong-kantong kemiskinan. Mereka beroperasi mencari calon tenaga kerja dengan menjanjikan bekerja di luar negeri dengan gaji besar.

Di tengah himpitan ekonomi, dan lingkaran setan kemiskinan terus melilit tidak ada pilihan lain, tawaran itu cukup menggiatkan. Kendati para pekerja migran (TKW) meninggalkan anak dan suami selama bertahun-tahun. Hal ini sejalan dengan hasil survey nasional pola remitansi TKI yang dirilis oleh Bank Indonesia, bahwa motivasi terbesar para pekerja migran yakni mencari penghasilan yang lebih besar, mengumpulkan modal untuk membuka usaha, menambah penghasilan karena penghasilan suami kurang, terbatasnya lapangan pekerjaan dan diajag tetangga, teman atau keluarga.

Jika ada pilihan lain profesi yang dapat dijalani untuk mencukupi biaya hidup mereka, menjadi buruh migran tidak akan menjadi pilihan. Pekerja migran yang bekerja di luar negeri terlahir banyak resiko dan pengorbanan, tapi kenyataannya tidak dapat

dibedakan karena tuntutan ekonomi. Selain alasan ekonomi, pekerja migran muncul karena ada faktor pendorong dan penarik di dalamnya. Khudori (2010) menyebutkan bahwa fenomena buruh migran tak ubahnya proses urbanisasi, faktor penariknya peluang kerja di luar negeri dan contoh-contoh pendahulu yang "sukses". Sebaliknya, lapangan pekerjaan di desa, kemiskinan dan marginalisasi menjadi faktor pendorong.

Asumsi saya, faktor pendorong dan penarik dapat di atasi dengan cara menghentikan pengiriman TKI (pekerja migran) untuk sektor non formal, karena merekalah yang rentan terhadap kekerasan. Cara lain dengan membangun industri pertanian, atau memperluas lapangan kerja di desa. Tapi sayang pemerintah, melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berasumsi bahwa menghentikan pengiriman pekerja migran "melanggar" hak azasi manusia untuk mendapatkan pekerjaan. Tanpa di sadari bahwa pemerintah justru lalai atau bahkan gagal memberikan penghidupan yang layak bagi warganya, pemerintahlah yang menunggunya melanggar hak azasi masyarakat.

La lupa bahwa menjadi pekerja migran dipilih karena ketiadaan lapangan kerja di desa mereka, indikasinya bisa dilihat sekalipun secara nasional angka kemiskinan terus menurun, namun pada saat yang bersamaan angka kemiskinan di pedesaan justru meningkat. Meningkatnya kemiskinan di pedesaan sebagai akibat makin menurunnya produktivitas sektor pertanian (baik lahan, maupun petani). Demikian halnya kepemilikan lahan makin menyusut, rata-rata kepemilikan lahan bagi petani saat ini sekitar 0,25 Ha. Pembangunan yang terus digalakkan justru membuat mereka makin terdesak (terpinggirkan). Dengan kondisi itu, daripada mereka menganggur, menjadi pekerja migran menjadi pilihan untuk mengangkat martabatnya sekalipun dibayar-banyangi kemiskinan dan kekerasan.

Kebijakan pembangunan ekonomi selama ini yang ditempuh, memarginalisasi pembangunan pedesaan. Para pemilik modal terus memburu lahan dipinggiran kota untuk diperuntukkan pembangunan industri dan properti. Akibatnya lahan produktif terus menyusut, sekalipun sudah banyak aturan

bahkan UU yang mengatur penggunaan lahan, maupun revitalisasi sektor pertanian tidak memberikan resonansi sama sekali. Terlebih selama implementasi otonomi daerah, tata guna lahan makin tidak teratur, sehingga mereka yang bekerja di sektor pertanian makin terpuruk. Tidak ada pilihan bagi pemerintah untuk menurunkan kemiskinan di pedesaan harus membalikkan keadaan dengan memprioritaskan sektor industri yang berbasis pertanian. Membalikkan arah pembangunan dari industri atau sektor *non tradable* seperti sektor keuangan yang makin menggelenbung, sektor jasa, properti yang makin tumbuh, komunikasi dan transportasi yang lebih banyak menggunakan *capital intensive*, ke sektor-sektor *labor intensive*.

Pilihan lain yang dapat memberikan peluang menurunkan angka kemiskinan di pedesaan atau pulau yang padat penduduknya menggalakkan kembali program transmigrasi. Pada umumnya kantong-kantong transmigrasi sangat sukses mengembangkan sektor pertanian dan ekonomi lokal. Tapi seperti yang Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak hanya gagal dalam manajemen ketenagakerjaan para pekerja migran, program transmigrasi pun seperti ini tidak lagi menjadi agenda penting. Padahal program transmigrasi diberbagai daerah cukup sukses mengubah keadaan ekonomi daerah tujuan, seperti di Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Papua.

Mereka sukses karena pada dasarnya sudah memiliki etos kerja dari kampung asalnya, hanya saja selama ini tidak ada lahan yang dapat digarap. Dengan keuletan para transmigran, memberikan transformasi etos kerja, pada akhirnya berdampak terhadap penduduk setempat. Hanya saja program transmigrasi menghadapi banyak rintangan. Penyebabnya, banyak daerah tujuan transmigrasi yang menolak, dengan alasan sangat politis terutama setelah otonomi daerah. Cukup rasional, para transmigran solidaritas dalam banyak hal membuat penduduk setempat merasa terancam, apalagi kalau sudah masuk ke ranah politik. Ada banyak contoh, daerah-daerah transmigrasi kalau mau jadi pemenang Pilkada maka gendenglah pemimpin (tetua

adat) mereka, seperti di Sumatera Utara, atau daerah transmigrasi di Papua, umumnya wakil kepala daerah adalah warga transmigran.

Dalam pandangan saya, program transmigrasi harus diduplikan kembali, meski harus menyesuaikan dengan kondisi asal dan tujuan transmigrasi, sebab ini juga penting diperhatikan. Tidak dapat dipungkiri, ada juga transmigran gagal memanfaatkan program ini karena tadinya bekerja di sektor informal, kemudian ikut program transmigrasi menjadi pengolah lahan pertanian tidak cakap, akhirnya bantuan berupa lahan dan perumahan dijual dan kembali menggeluti pekerjaannya semula. Kehadiran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibutuhkan disini, menyambungkan kepentingan daerah asal dan daerah tujuan transmigrasi. Meskipun urusan ketenagakerjaan berbasis transmigrasi sudah diserahkan ke daerah, tidak berarti pemerintahan ini membiarkan begitu saja. Program ini tetap membutuhkan intervensi pemerintah pusat, sekaligus untuk menciptakan keseimbangan demografi antar wilayah dan antar pulau.

Lemahnya Perlindungan TKI

Kemauan, kekerasan dan pemancunguan para pekerja migran maupun TKI secara keseluruhan masih tetap muncul. Bahkan ada 23 kasus yang sama dialami semacam Suyati menanti di Arab Saudi. Seharusnya lembaga yang menangani mereka bekerja keras membantu, dan terpenting mengatasi sumber masalahnya, sebab hukuman dan tindakan bagi TKI adalah akibat bukan sebab. Dari segi kelembagaan yang menangani TKI di luar negeri sudah lebih dari cukup, ada Kemenakertrans, BP2TKI, Kemenlu, PTTKI dan Kementerian Hukum HAM. Tapi untuk mengatasi masalah TKI seperti lembaga ini, presiden merasa tidak cukup, karena itu pihaknya yang terbiasa menyelesaikan masalah lewat Satuan Tugas (Satgas). Pembentukan Satgas sudah barang tentu memiliki implikasi, baik penganggaran maupun personil, kenapa tidak memaksimalkan saja lembaga yang sudah ada?

Permasalahan TKI di luar negeri begitu banyak dan beragam, akan tetapi yang kerap muncul kepermukaan kasusnya yang menonjol yaitu di Arab Saudi dan Malaysia. Meski demikian, kasus per kasus mengalami penurunan seperti klaim pemerintah termasuk yang memegang otoritas penempatan TKI di luar negeri (BNP2TKI) bahwa jumlah pekerja migran (TKI) bermasalah terus menurun. Manajemen penempatan dan perlindungan bagi mereka makin membaik. Tidak tanggung-tanggung presiden pun membanggakan perbaikan ini yang disampaikan lewat pidatonya dihadapan peserta konferensi ILO awal bulan ini. Lain halnya dari pandangan LSM seperti Migran Care, menurutnya angka TKI bermasalah masih tinggi, data mereka menunjukkan bahwa TKI (TKW) bermasalah, khusus di Arab Saudi sebanyak 5.563 orang baik karena penganiayaan, sakit, dan korban kekerasan seksual maupun tidak digaji. Sementara data pemerintah (BNP2TKI) hanya mencatat ratusan orang. Perbedaan angka statistik ini sebetulnya sudah menjadi masalah, tidak ada salahnya pemerintah dan LSM yang memiliki kompetensi melakukan advokasi terhadap pekerja migran bekejasama, dan saling bersinergi.

Tidak dapat disangkal, justru pemerintah terkesan menegasikan peran LSM seperti data-data yang di lansir Migran Care. Dalam dialog yang cukup panas di salah satu televisi swasta nasional makin memperkuat dugaan saya ini, data Migran Care menunjukkan bahwa pekerja migran yang menghadapi masalah di Malaysia saja ada sekitar 4.000-an, sementara data BNP2TKI melansir "hanya" seratusan. Terkesan, data pemerintahlah yang paling sah seperti yang diungkapkan oleh kepala BNP2TKI (Jumhur Hidayat) bahwa data Migran Care itu mungkin dari langit ketujuh.

Kekerasan yang dialami para pekerja migran jauh sebelum Sumiati maupun Kokom sudah banyak, tapi penyelesaian secara hukum tidak tuntas, peristiwa serupa terus berulang. Afirmasinya, pemerintah sangat lemah melakukan diplomasi terhadap perlindungan TKI. Kebijakan moratorium pengiriman pekerja migran ke Malaysia misalnya tidak berjalan efektif, karena pekerja

migran ini tetap banyak yang berangkat. Demikian juga LU No. 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri menetapkan usia minimal bekerja sebagai pembantu rumah tangga diluar negeri adalah 21 tahun. Tapi nyatanya banyak berusia dibawah 21 tahun dipekerjakan melalui perdagangan manusia (*trafficking*) untuk bekerja diluar negeri dengan memanipulasi umur mereka.

Sementara peristiwa kekerasan yang mendera para pekerja migran di wilayah Timur Tengah, juga menunjukkan titik lemah pemerintah karena tidak ada perjanjian bilateral dengan negara-negara tujuan penempatan TKW. Pekerja migran hanya dihubungkan dengan penyalur tenaga kerja melalui agen. Status pekerja migran untuk pekerja rumah tangga dianggap urusan internal rumah tangga bagi majikannya, karena pekerja migran bukan dianggap sebagai pekerja (*buruh*). Penanganan dan pengawasan berada di kementerian dalam negeri tempat bekerja para TKI, bukan kementerian tenaga kerja. Implikasinya, mereka tidak terikat dengan aturan-aturan ketenagakerjaan.

Secara antropologis kultur orang Arab dan Indonesia sangat berbeda, relasi gender sangat tidak setara. Bagi orang Arab, pembantu rumah tangga adalah budak, jika ia seorang wanita maka berhak dimiliki oleh tuannya (*pria*). Kepemilikan dokumen dan alat komunikasi TKW berhak dikontrol oleh majikannya. Kultur semacam ini sulit diubah, termasuk persepsi bagi pemerintah dinegara-negara Timur Tengah.

Dengan melihat kondisi itu, rasanya kebijakan pemerintah untuk membekali alat komunikasi (*handphone*) bagi para pekerja migran bukan solusi jitu untuk mengurangi kekerasan bagi mereka. Paling penting dari semua itu adalah bentuk perlindungan yang jelas dan tegas. Ada hukum tertulis secara terintegrasi melalui perjanjian kerja antar kedua negara. Selama ini tidak ada mekanisme dan konstruksi hukum yang permanen untuk melindungi pekerja migran.

Persoalan perlindungan pekerja migran, patut kita belajar dari Filipina cara melindungi pekerja migran mereka. Para pekerja

migran Filipina selain mereka dibekali keterampilan memadai, klausul perlindunganpun dimuat dalam kontrak kerja standar yang ditandatangani antar pekerja migran asal Filipina dan majikannya di Malaysia, antara lain jam kerja tidak lebih dari 10 jam, dengan waktu istirahat tidak kurang dari delapan jam berturut-turut. Paspot dipegang pekerja migran, akomodasi yang layak dan makan tiga kali sehari, bebas biaya kesehatan dan rumah sakit jika pekerja migran sakit, hingga pengesahan kontrak kerja oleh kedutaan Filipina dan divalidasi oleh Philippine Overseas Employment Agency (Kompas, 26/11/2010).

Selain perlindungan, bentuk rekrutmen, pengawasan dan penempatan perlu dibenahi dan diperketat. Umumnya calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan pembekalan kemampuan keterampilan maupun berbahasa semua diserahkan kepihak penyalur tenaga kerja yang melakukannya. Pemerintah lebih banyak bertumpu pada administratifnya saja, seperti sertifikasi calon tenaga kerja. Persoalan administrasi di Indonesia, termasuk sertifikasi relatif mudah diperoleh. Kasus Sumiati menjadi cermiin yang terang, ia tetap diberangkatkan ke Arab Saudi kendati tidak dapat berbahasa Inggris dan Arab, meski hanya bahasa pasif. Dengan kemampuan bahasa yang terbatas, komunikasi antara majikan dan pekerja migran dipastikan menimbulkan masalah tersendiri, tentu saja para majikan merasa dirugikan karena sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Mereka merasa kecewa karena pekerja rumah tangga yang didapat tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dugaan saya, kekecewaannya kerap diungkapkan kepada TKW, bahkan dengan kekerasan yang berulang-ulang, pada akhirnya seperti kasus Suyati tidak tahan lagi diperlakukan kasar pada akhirnya ia bertindak nekat. Yakinihlah, selama penataan dan pembinaan calon tenaga kerja tidak dilakukan perbaikan secara optimal, serta lapangan kerja dalam negeri minim. Calon tenaga kerja selamanya tetap akan berusaha mengais rezeki diluar negeri kendati memiliki resiko yang tinggi. ▣



Implikasi Penerapan AC-FTA Tahun 2010

Sejarah perdagangan bebas merupakan bagian penting dari sistem sejarah perdagangan internasional yang sudah ada sejak lama, menekankan pasar terbuka.

Diasumsikan, perdagangan bebas akan menciptakan efisiensi, perdagangan bebas juga menunjukkan keragaman atau bermacam kebudayaan yang dapat menciptakan kemakmuran. Sepanjang sejarah telah membuktikan bahwa mereka yang bertransaksi dalam sistem perdagangan dengan dunia luar (terbuka) lebih makmur.

Inilah yang menjadi dasar pijakan teori dan rasionalisasi kebijakan kegiatan perdagangan bebas, memberikan ekspektasi menguntungkan negara-negara yang terlibat dalam kegiatan pasar bebas baik negara maju maupun negara-negara berkembang sepanjang waktu. Munculnya teori ini (perdagangan bebas), dan keberlanjutan sampai hari ini, merupakan koreksi langsung kebijakan dari merkantilisme yang telah berkembang di Eropa di tahun 1500. Jika ditelaah historisnya, Ekonom yang paling awal menolak sistem merkantilisme adalah Adam Smith dan diperkuat oleh David Ricardo.

Konsep dasar dari merkantilisme yaitu perlunya dilakukan perdagangan antar negara untuk memperbesar devisa, namun

konsep ini bersifat *unfair* sebab kaum merkantilis menganjurkan ekspor harus lebih besar daripada impor. Untuk memperbesar ekspor dan memperkecil impor proteksi dalam negeri (kerajaan pada zaman itu) menjadi keharusan. Adam Smith menganjurkan, agar suatu negara sejahtera dan memiliki devisa yang banyak maka setiap negara harus mengembangkan *free trade*, proteksi justru akan menciptakan inefisiensi dan kemampuan kompetisi menjadi rendah. Karena itu diperlukan *free trade*, keuntungannya setiap negara akan memiliki keunggulan absolut (*absolute advantage*), dengan adanya keunggulan absolut setiap negara melakukan spesialisasi, yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan kompetisi.

Dalam perkembangannya, David Ricardo juga merupakan seorang ekonom klasik mengembangkan teori apa yang disebut dengan keunggulan komparatif (*comparatif advantage*), Ricardo berpandangan bahwa keunggulan absolut tidaklah cukup harus dimiliki suatu negara dalam sistem perdagangan internasional, akan tetapi, keunggulan komparatif jauh lebih penting terutama mendorong produktifitas tenaga kerja.



ADAM SMITH 1723-1790

Pada akhirnya konsep perdagangan bebas terus berkembang, perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada *Harmonized Commodity Description and Coding System (HS)* dengan ketentuan dari *World Customs Organization* yang berpusat di Brussels, Belgia. Penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda (Wikipedia).

Meskipun teoritisnya ideal, akan tetapi dalam implementasinya menimbulkan polemik. Banyak ekonom yang berpendapat bahwa perdagangan bebas meningkatkan standar hidup melalui teori keuntungan komparatif dan ekonomi skala besar. Sebagian lain berpendapat bahwa perdagangan bebas memungkinkan negara maju untuk mengeksploitasi negara berkembang dan merusak industri lokal, dan juga membatasi standar kerja dan standar sosial. Sebaliknya pula, perdagangan bebas juga dianggap merugikan negara maju karena ia menyebabkan pekerjaan dari negara maju berpindah ke negara lain dan juga menimbulkan perlombaan serendah mungkin yang menyebabkan standar hidup dan keamanan yang lebih rendah.

Kendati muncul polemik, hampir semua pemerintah (negara) memiliki keyakinan keuntungan dari perdagangan bebas. Arus utama perdagangan bebas tetap mengalir, bukan saja negara maju ikut di dalamnya akan tetapi negara berkembang pun tidak mau ketinggalan. Dalam konsep ekonomi internasional, ada beberapa bentuk perdagangan internasional yaitu multilateral (didalamnya seperti *World Trade Organization*), untuk tingkat regional dikenal *Free Trade Area (FTA)* dan *Free Trade Agreement* (bersifat bilateral). Sementara dilihat dari teori tahapan integrasi ekonomi regional, ada beberapa model kerjasama ekonomi diantaranya; *Trade Preference Arrangement*, *Free Area Trade*, *Customs Union*, *Common Market*, *Economic Union* dan *Monetary Union*.

Beberapa bentuk organisasi yang dikemukakan ini, Indonesia sebagai negara berkembang juga menceburkan diri, menjadi anggota WTO, APEC, FTA yang memiliki nuansa perdagangan bebas. Dengan penuh keyakinan, pemerintah Indonesia menjadi anggota APEC, dalam konsep awalnya akan diberlakukan mulai tahun 2020. Sedangkan FTA ASEAN sudah berlaku dan ASEAN-China-FTA (AC-FTA) pemerintah sudah melakukan agreement mulai berlaku efektif 1 Januari 2010.

Jadi pertanyaan, apa itu FTA? *Free Area Trade* adalah suatu bentuk kerjasama ekonomi regional yang perdagangan produk-produk orisinalnya negara-negara aggotanya tidak dipungut bea masuk atau bebas bea masuk. Dengan kata lain "internal tariff"

antara negara anggotanya menjadi 0 persen, sedangkan masing-masing negara memiliki "external tariff" sendiri-sendiri. Contohnya AFTA (ASEAN Free Trade Area). Jika dihitung dari sekarang pemberlakuan ASEAN-China FTA berarti tinggal tujuh hari (hitungannya ini dilakukan pada saat artikel ini ditulis, *red*).

Lalu apa dampak dari implementasi dari ASEAN-China FTA bagi Indonesia? Secara teoritis manfaat perdagangan bebas sudah dikemukakan di atas, tapi dampaknya yang muncul bagi Indonesia secara negatif sangat banyak. Karena itu banyak pihak menganggap bahwa pemerintah terlalu nekat menyetujui ASEAN-China FTA. Dalam konteks negara ASEAN sendiri, kita tidak terlalu kuatir implementasi FTA tersebut, kendati beberapa produk negara ASEAN lain seperti Vietnam untuk produk tekstil dan mebel sangat kompetitif, akan tetapi dengan China akan memberikan dampak yang serius. Dalam kenyataannya implementasi perdagangan bebas dengan China jauh sebelumnya, produk-produk China sudah menembus pasar Indonesia. Apalagi jika sudah diberlakukan, maka produk China akan memukul produk lokal Indonesia.

Lalu, apa salahnya dengan produk China? Di sinilah persoalannya. Sudah bukan rahasia lagi, selama ini mutu produk China yang menembus pasar kita tidak jauh berbeda dengan produk dalam negeri, bahkan lebih buruk. Produk China juga masih diragukan keamanannya bagi kesehatan. Selain itu, barang dari 'Negeri Tirai Bambu' itu kelewat murah sehingga produk dalam negeri kalah bersaing dan akhirnya mati. Saat ini hampir semua jenis produk China melenggang bebas masuk ke negeri ini. Padahal, pada era 1970-an produk China yang diimpor hanya produk yang tidak bisa dibuat di Indonesia (Media Indonesia, 22/12/2009).

Ada beberapa dampak yang akan timbul dengan ASEAN-China FTA, jika dilihat dari transaksi perdagangan, defisit perdagangan China selama lima tahun dengan Indonesia membengkak, dan Indonesia merugi puluhan triliun dengan China. Indonesia hanya mengalami surplus perdagangan dengan China pada 2003. Tahun-tahun berikutnya, Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan Indonesia. Neraca perdagangan

Indonesia-China menjadi jomplang dan Indonesia mengalami defisit US\$ 3,61 milyar pada tahun 2008. Perdagangan di sektor manufaktur mencapai defisit terbesar yakni US\$ 7,61 miliar pada tahun 2008 (*inilah.com*).

Dengan demikian, perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China amat jelas bakal lebih menguntungkan China daripada negara-negara ASEAN, dan sangat jelas terutama sangat merugikan Indonesia. Data resmi dari Badan Pusat Statistik menunjukkan saat ini saja ekspor kita ke China hanya 5,91 persen, sedangkan importnya mencapai 8,55 persen. Kelak, ketika perdagangan bebas sudah dijalankan, diprediksi ekspor kita hanya naik 2,29 persen menjadi 8,20 persen. Tapi, sebaliknya impor kita dari China bakal naik 2,81 persen menjadi 11,37 persen.

Menghadapi pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China FTA pada 2010, Indonesia sepertinya harus siap-siap kehilangan uang senilai Rp15 triliun. Uang ini adalah jumlah pemasukan yang biasanya diterima Kantor Bea dan Cukai tiap tahunnya menurut Dirjen Bea dan Cukai Depkeu. Kemudian, terjadi ketimpangan besar jika FTA diimplementasikan, karena terhitung 1 Januari 2010, bea masuk (BM) 8,097 pos tarif dari 17 sektor industri akan dibebaskan menjadi 0 persen. Kesejahteraan pembebasan bea masuk impor justru akan memperlemah posisi UMKM sebagai tulang punggung industri di Indonesia, selain itu akan mengancam sebelas sektor industri. Sebelas sektor industri tersebut diantaranya industri tekstil, makanan dan minuman, alat dan hasil pertanian, petrokimia, sintetik fiber, besi dan baja dan manufaktur, serta otomotif. Jika kelompok industri ini kolaps maka akan menciptakan ledakan pengangguran.

Ragilila (2009) mengemukakan Industri plastik, misalnya, diperkirakan pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga 88.000 orang. Hasil riset Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia bahkan menyebutkan tujuh sektor industri berpotensi merugi hingga Rp. 35 triliun per tahun. Mereka terdiri dari petrokimia, tekstil dan produk tekstil (TPPT), alas kaki dan barang kulit, elektronik, keramik, makanan dan minuman, serta besi baja. Ketujuh industri itu akan kehilangan pangsa pasar lokal cukup besar.

Kemudian industri baja nasional juga mengalami hal yang sama, dipastikan bakal kalang kabut karena diserbu baja buatan China. Betapa tidak? Dibentengi dengan bea masuk pun, China yang paling mampu menjual dengan harga *dumping*. Contoh lain sudah lama industri TPT di Tanah Air termek-mekah gara-gara sebuhan buatan China yang murah-murahnya minta ampun.

Kekuatan yang sama ditemukan ekonom dan Ketua Focus Group Koordinasi Fiskal dan Moneter, Sri Adiningsih, kalau Indonesia tidak siap, bisa terjadi keresahan sosial. Jangan sampai terjadi pengalaman seperti di Afrika Selatan, dimana produk tekstil tiarap dan tidak bisa bersaing dengan China, sehingga dapat menimbulkan keresahan sosial. Efeknya semakin besar, jika yang menjadi korban adalah usaha padat karya yang menyerap banyak kesempatan kerja.

Kekuatan penerapan AC-FTA bukan hanya dikemukakan para politisi, *civil society*, dan ekonom akan tetapi pelaku usaha juga amat pesimis. Para pengusaha sangat yakin produk nasional akan dilibas produk-produk asal China yang sangat kompetitif, bila kesepakatan perdagangan bebas AC-FTA tetap dilanjutkan. Ada beberapa pandangan yang mengemukakan bahwa pelaku usaha siap dengan AC-FTA paling cepat 2014, itu pun ada beberapa persyaratan untuk mendukung kelangsungan dan daya saing usaha mereka.

Merespon keberatan dan keinginan pelaku usaha, pemerintah akan mengusahakan penundaan penerapan kebijakan Free Trade Agreement (FTA) terhadap 303 sub sektor usaha. Dari sisi pengambilan kebijakan, pemerintah sepertinya tidak mempedulikan keberatan yang disampaikan berbagai pihak jauh hari sebelumnya. Idealnya kebijakan itu ditempuh berdasarkan *assessment* dari berbagai *stakeholders*. Keberatan yang disampaikan berbagai pihak bukan mengada-ada, tapi dampaknya sudah terasa seperti yang sudah digambarkan di atas (dampak perdagangan Indonesia - China). Kalangan internal pemerintah sendiri sedari awal berjalan sendiri-sendiri, keinginan Departemen Industri untuk menunda penerapan AC-FTA sudah disuarakan, tetap

Departemen Perdagangan juga memiliki agenda sendiri terkait dengan AC-FTA.

Saat ini pemerintah melalui Departemen Perindustrian mengidentifikasi beberapa jenis industri akan diajukan revisi penundaan implementasi AC-FTA. Ini menandakan bahwa pemerintah sendiri tidak konsisten dengan kebijakannya, kasarnya menyalah sudah sendiri. Ada beberapa jenis industri yang diusulkan untuk direvisi, yaitu industri tekstil, baja, alas kaki dan petrokimia.

Mengapa Produk China Murah?

China (Tiongkok) termasuk negara unik, menarik banyak kalangan ilmuwan yang kerap melakukan kajian tentang idiologi. Asumsi yang menjadi keyakinan bersama bahwa demokrasi politik merupakan cara untuk membangun negara menjadi lebih sejahtera. Saya tidak berkesimpulan bahwa China sudah menjadi negara makmur (sejahtera), tapi harus diakui China sudah menjadi pemain utama ekonomi dunia. Jutaan warganya menjadi *millioner* dalam sepuluh tahun terakhir ini. Itu pertanda bahwa negara ini sedang bergerak maju. Pada saat krisis global tahun 2008, hampir semua negara mengalami pertumbuhan minus, sementara China tetap tumbuh sekitar 8 persen.

Pertanyaan saya, apakah demokrasi politik akan menjamin demokrasi ekonomi (negara lebih sejahtera)? Atas pertanyaan ini, China mungkin menjadi salah satu negara pengecualian asumsi ini. Betapa tidak, China menganut liberalisasi ekonomi yang sangat massif, sementara perilaku demokrasi politik masih jauh. Kekuasaan politik China masih didominasi oleh partai komunis, tidak ada proses pemilihan umum. Semua kritik dibungkam secara keras, pers tidak bisa bersuara kritis, ini yang saya maksudkan negeri yang unik secara idiologi.

Liberalisasi ekonomi yang dipilih China, tentu sulit dicerna dengan sederhana logika teori yang memadukan antara kapitalisme ekonomi dan komunisme politik, tapi itu bisa terjadi di China. Liberalisasi ekonomi dan praktek ekonomi pasar yang dijalankan mendorong China makin agresif sebagai pelaku dan

konsumen terbesar dunia. Karena itu hampir semua *multi national company* (MNC) membuka cabang di China, bahkan sebagian besar justru memindahkan kantor pusatnya ke negeri itu.

Hasilnya, hampir semua produk China merajai semua pasar-pasar. Kemampuan melakukan produk massal mengakibatkan industriya lebih efisien dan kompetitif sehingga produk-produk China lebih murah, kendati dari segi kualitas sebetulnya tidak lebih baik dari produk lokal Indonesia sendiri. Mengapa China begitu hebat membangun ekonominya?, sudah ratusan buku dan tulisan yang mengulas kehebatan China dari segi ekonomi, bahkan kemampuan militernya juga makin maju.

Secara sosiologis, China begitu cepat maju karena tidak terlepas dari apa yang disebut oleh Wibowo (2006) memiliki jaring laba-laba keluar. Pedagang-pedagang China berhasil menembus pasar kemana-mana karena menggunakan jaringan ini. Selain itu kemampuan kepercayaan mereka juga dijiaga dengan baik diantara mereka, serta ikatan keluarga sangat kuat. Jika dikaji lebih mendalam, investasi di China bukan datang dominan dari orang Jepang, Eropa dan Amerika tapi didominasi oleh investor dari China perantauan.

Terkait dengan kemampuan China menghasilkan barang-barang murah, banyak faktor yang menyebabkan produk China bisa begitu murah. *Pertama* adalah biaya uang (*cost of fund*). Dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan di Indonesia, pengusaha China akan jauh lebih diuntungkan. *Kedua*, infrastruktur yang ada di China lebih tersedia sehingga bisa membuat perusahaan lebih efisien. *Ketiga*, Pemerintah China memberikan insentif pengurangan pajak hingga 15 persen kepada perusahaan yang berorientasi ekspor. *Keempat*, kepastian berusaha di China jauh lebih kondusif sehingga segala macam proses perizinan bisa berjalan cepat.

Hal lain yang patut dicermati mengapa produk China begitu murah? Umumnya industri-industri biaya komponennya yang paling besar terletak pada biaya riset dan pengembangan. China mampu menyiasati pada variabel *research and development*

ini dengan memanfaatkan apa yang disebut *reverse engineering*. *Reverse engineering* merupakan suatu kegiatan membuat kembali produk yang sudah ada dengan menggunakan *part*, material, serta cara pembuatan yang sama seperti produk aslinya. Dengan kata lain menurut *Reverse Engineering* ada dua (2) jenis, yaitu: Menurut material, bentuk sesuai dengan aslinya. Menurut material, bentuk tetapi dilakukan modifikasi. Dengan memanfaatkan metode produk China dapat memanfaatkan beragam jenis produk dalam waktu yang singkat.

Setidaknya, Apa yang Harus Dibenahi Pemerintah?

Penerapan pasar bebas di kawasan regional ASEAN dan China sudah *kadung* berjalan, artinya kita siap atau tidak siap harus siap menghadapi realitas --globalisasi--. Dalam konteks *free competition* pasti ada pemenang (dominan) dan pihak yang merugi, secara normatif permainan diarena globalisasi relatif ideal. Hanya saja perlu dukungan dan kesiapan yang memadai, ibarat orang bertanding dalam dunia olah raga, mustahil akan jadi juara tanpa pernah latihan. Aktifitas latihan perlu dukungan infrastruktur dan SDM yang tangguh.

Dalam ranah perdagangan bebas, tentu juga membutuhkan kesiapan. Jika tidak jangka panjangnya kita sekedar jadi penonton saja, membeli karcis untuk menonton pertandingan di lapangan luas (pasar) kita, dan yang bermain negara lain. Banyak hal yang mendasar yang harus dibenahi oleh pemerintah menghadapi realitas ini. Dalam banyak hasil studi menunjukkan daya saing kita relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, karena pelayanan birokrasi yang belum optimal, masalah-masalah perbankan yang belum terlalu kompetitif dibandingkan dengan perbankan di luar, masalah infrastruktur, pasokan listrik dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Belum lagi kasus korupsi dan penyelundupan yang banyak merugikan produsen lokal, sehingga daya saing kita makin melemah.

Terkait dengan rendahnya daya saing industri

manufaktur, antara lain akibat kegagalan PLN dalam menjaga pasokan listrik dan tingkat harga. Ironisnya, tingginya biaya produksi terjadi karena PLN tidak mendapat dukungan pasokan energi murah baik batu bara maupun gas dari pemerintah. Padahal Indonesia memiliki kekayaan energi alam yang tidak kalah jika dibandingkan dengan China. Tetapi pemerintah Indonesia memilih menjadikan batu bara dan gas sebagai komoditas ekspor, bukan modal untuk membangun industri. Kendati pemerintah telah berulang kali mempublis secara luas, bahwa energi kita lebih diutamakan *domestic oriented*, tapi dalam implementasinya tidak jalan. 



Negeri Importir, Implikasi Kebijakan yang Kurang Berpihak

 ndonesia sudah dikenal sejak dahulu karena kekayaan alamnya, potensi itu menjadi incaran negeri-negeri Eropa. Lama kelamaan kekayaan dikuasai oleh mereka, berlanjut pada sistem kerja rodi untuk memproduksi komoditi yang dibutuhkan di pasar Eropa, sekaligus menjadikan nusantara ini sebagai negara kolonial. Penguasaan sumberdaya alam, serta kekayaan lainnya terus berlanjut hingga kini meskipun dengan metode yang berbeda.

Jika ditelaah, lalu dikelompokkan, setidaknya ada dua potensi utama Indonesia yang dapat dijadikan sebagai "keunggulan komparatif", yakni sumberdaya alam dan jumlah penduduk yang besar, selain China, India dan USA. Kekayaan sumberdaya alam berada di atas tanah, di bawah permukaan tanah maupun di dalam laut. Meski demikian kekayaan sumberdaya cenderung menjadi kutukan bangsa ini, sebab hasilnya belum mampu memberikan kesejahteraan secara optimal, malahan bangsa lain yang banyak menikmati.

Kefakiran (miskin) masih begitu mudah kita menemukan di setiap sudut-sudut kota besar sampai di pelosok desa, anak

putus sekolah disetiap perempatan jalan, penduduk desa bermigrasi masuk kota mencari penghidupan yang layak, TKI jutaan di luar negeri yang tidak terlindungi dengan maksimal, karena minimnya ketersediaan lapangan kerja dalam negeri.

Dalam perspektif lain, berulang kali pemerintah mengklaim sukses dalam bidang ekonomi, terutama mengatasi stabilitas makroekonomi, cadangan devisa meningkat, inflasi yang terkendali, nilai tukar rupiah cenderung menguat, angka kemiskinan menurun, serapan tenaga kerja meningkat, serta kesuksesan-kesuksesan lainnya. Pada kenyataannya memang, secara statistik sulit kita bantah.

Banyak cerita di bidang perekonomian, pada saat yang bersamaan dibalik cerita itu menyimpan potensi "duka" dan amat membahayakan perekonomian nasional dalam jangka panjang. Meski eleknya sudah merasa saat ini, seperti yang pemerintah tidak beranjak dari model kebijakan konvensional yang ditempuh dari tahun ke tahun. Dalam PDB, jika dikelompok persektor ada sembilan sektor sebagai kontributor perekonomian, setidaknya bila dibedah satu persatu permasalahannya mungkin akan memristikan hati sebagai bangsa yang kaya sumberdaya dan berpenduduk besar. Mulai dari sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik gas dan air bersih, sektor bangunan/konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa.

Namun dari keseluruhan sektor yang disebutkan di atas, tulisan ini hanya hendak mengulas masalah yang dihadapi sektor pertanian dan turunannya, sebab sektor paling banyak digeluti angkatan kerja kita. Sektor ini juga sesungguhnya memiliki keunggulan daya saing, namun justru terpuruk. Tidak sekedar itu saja, akan ditelaah berbagai implikasinya secara luas, bahkan kedalam sub sektor.

Dari konstruksi masalah yang ada, tidak menutup kemungkinan ada pemikiran alternatif sebagai bantalan kebijakan,

sebab pada dasarnya kekayaan yang dimiliki bangsa ini begitu besar, hanya saja pemanfaatannya kurang optimal. Bahkan kebijakannya cenderung eksploitatif yang kurang menguntungkan secara ekologis, lebih melihat pada aspek ekonomi dan mengabaikan faktor sosial, apalagi masalah keadilan untuk kepentingan bangsa.

Pada level pengambil kebijakan biasanya abai terhadap kelaparan perangkat pendukung, keberpihakan terhadap bangsa (nasionalisme) seringkali dikalahkan dengan pragmatisme kebijakan. Selain itu mafioso ekonomi turut bermain pada kegiatan ekspor-impor yang kurang peduli dengan kepentingan bangsa, mereka sesungguhnya pemburu rente yang banyak mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Negara Agraris dan Membanjirnya Produk Impor Pertanian.

Indonesia dikenal sebagai zamrud khatulistiwa, kekayaan sumberdaya alam sangat melimpah. Akan tetapi kekayaan itu belum memberikan kesejahteraan secara maksimal bagi masyarakat secara luas. Ada banyak masalah yang dihadapi bagi sektor dan subsektor pertanian. Sektor pertanian yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan hortikultura.

Meski pada kenyataannya sektor pertanian memiliki peran penting memberikan lapangan kerja bagi hampir separuh angkatan kerja Indonesia. Bahkan sektor tersebut juga memberikan kontribusi yang nyata terhadap total nilai ekspor dan produk domestik bruto (PDB), atau malahan menjadi sektor andalan dalam kegiatan ekspor, terutama komoditi karet, sawit, kakao, kayu dan rotan di tengah lesunya ekspor industri olahan.

Namun perkembangan sektor ini masih lebih rendah dari potensi yang ada, dan pertumbuhannya berkejaran dengan pertumbuhan populasi. Kegiatan sektor pangan dan sub sektor pertanian lainnya sebagian besar masih terfokus pada aktivitas di lahan pertanian (*on-farm*), padahal peningkatan kesejahteraan

petani hanya bisa didukung dengan pengembangan kegiatan di luar pertanian (*off-farm*).

Perkembangan kegiatan ekonomi pangan dan pertanian diperhadapkan oleh berbagai kendala, seperti buruknya sistem pendukung sarana publik terutama yang di dalamnya ketersediaan air irigasi di lahan petani, jaringan jalan perdesaan untuk distribusi pasokan bahan dan produk usahatani, dan ketersediaan dukungan permodalan. Belum lagi diperhadapkan pada penurunan kuantitas dan kualitas lahan terutama karena banyaknya lahan produktif beralih fungsi menjadi lahan komersil di luar kegiatan pertanian.

Dari sekian banyak masalah yang dihadapi sektor pertanian terutama sub sektor pangan, pada akhirnya petani yang menggeluti sektor ini kerap diidentikkan dengan kemiskinan. Karena itu banyak dari mereka beralih profesi bekerja serabutan di kota-kota besar, padahal sektor dan subsektor pertanian cukup memberikan peluang untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak itu saja, lahan pertanian tersebar luas di hampir semua pulau-pulau besar di Indonesia, lahan tidur ratusan hektar tidak dimanfaatkan dengan baik. Pada saat yang bersamaan banyak lahan produktif beralih fungsi.



Selain itu politik pertanian, dalam hal ini berkaitan dengan kebijakan publik di sektor pertanian sejak orde baru, sampai saat ini menunjukkan adanya keterlempasan keterkaitan antar sektor. Dalam konteks transformasi struktural, diasumsikan bahwa peranan sektor pertanian makin menurun seiring dengan perkembangan industri. Meski demikian, pengembangan industri tidak boleh melupakan basis sumber daya terutama di sektor pertanian, sebab bagaimana pun juga Indonesia merupakan negara agraris. Sektor pertanian tetap dibutuhkan, karena itu diperlukan sentuhan teknologi melalui riset dan pengembangan

terutama untuk meningkatkan produktifitas.

Minimnya prasarana dan sarana pendukung sektor pertanian, serta dukungan kebijakan dengan sektor yang terkait, seperti industri pupuk dan bahan bakunya kerap kali tidak beres. Karena itu sulit akan meraih kembali predikat yang pernah di raih, Indonesia sukses mencapai swasembada beras seperti pada tahun 1984.

Sebaliknya, dari periode ke periode pemerintahan kebijakan politik pertanian begitu elok didengar, namun dalam implementasinya tidak seindah dengan "dongeng" dalam kampanye. Khusus untuk komoditi beras sendiri, jangkakan untuk mencapai swasembada malahan impor beras tetap berjalan. Pernyataan pejabat publik yang menangani sektor pangan, tidak jarang kita terkesima mendengarnya namun dalam kesempatan yang berbeda mengkerutkan kening kita mendengarnya.

Simak misalnya pernyataan menteri pertanian, mereka menjamin pada tahun ini (2010) produksi beras nasional melampaui tingkat kebutuhan dalam negeri sehingga Indonesia tak perlu mengimpor dari luar (Matanews, 4/3/2010). Malahan sesumbar akan melakukan ekspor beras. Beberapa bulan kemudian, pernyataan itu bertolak belakang dengan pernyataan pejabat publik lainnya, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia untuk memenuhi stok pangan dalam negeri dilakukan impor beras. Bahkan Selama 2010 ini total impor beras yang dilakukan pemerintah jumlahnya bakal mencapai 1,33 juta ton, setelah terakhir disetujui penambahan impor lagi sebanyak 250 ribu ton (Dettfinance, 22/12/2010).

Masih berkaitan dengan sub sektor pangan, misalnya kedelai meski lahan tersedia tapi kebijakan pendukung dari pemerintah cenderung kurang, sehingga untuk pengadaan kedelai sebagai bahan baku produk makanan olahan (peragian) ditutupi dengan kebijakan impor. Kedelai sebagai bahan dasar untuk pembuatan makanan tempe, tahu, susu, kecap dan lain-lain tingkat konsumsi trendnya meningkat setiap tahun. Sebab protein yang terkandung oleh kedelai cukup tinggi, dan bahkan sudah

menjadi menu favorit bagi masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan stok nasional, solusinya impor.

Produksi kedelai dalam negeri kendati mengalami peningkatan, tapi relatif kecil, hasil produksi petani kedelai hanya sekitar 400 ton, atau hanya mampu memenuhi kebutuhan nasional sekitar 20 persen dari total kebutuhan 2,2 juta ton per tahun (www.kuliah-lagi.com). Dengan demikian impor kedelai mencapai 1,8 juta ton. Sebagai komoditi pokok, seharusnya ada kebijakan afirmatif yang dapat mendorong produksi lokal yang berdampak terhadap penghasilan petani, apalagi lahan untuk produksi kedelai cukup tersedia. Upaya peningkatan produksi itu perlu di dukung oleh sektor hilir (*off farm*), misalnya kebijakan yang membuat harga kedelai dipasaran stabil dan pengendalian jumlah kedelai impor.

Peningkatan produksi kedelai tentu dapat mengurangi jumlah impor kedelai kedalam negeri. Sebab impor kedelai cenderung meningkat sejak 1975, dan berlanjut hingga saat ini. Sedangkan permintaan yang lebih besar akan impor juga telah diamalkan jauh sebelumnya, peningkatan impor kedelai yang mencolok belakangan ini menunjukkan bahwa produksi dalam negeri ketinggalan di bawah permintaan.

Amerika Serikat telah menjadi negara pengeksport kedelai yang penting bagi Indonesia. Kendati permintaan kedelai terus meningkat selama 15 tahun terakhir, namun tidak mampu diimbangi oleh produksi dalam negeri, bahkan upaya meningkatkan produksi dalam negeri cenderung tidak ada, kalaupun ada petani enggan menanam kedelai, karena kurangnya insentif atau stimulasi yang dapat menarik bagi petani untuk menanam kedelai. Apalagi harga kedelai impor yang murah (terutama dari Amerika Serikat) dan tidak adanya tarif impor menyebabkan tidak kondusifnya pengembangan kedelai di dalam negeri.

Untuk menekan laju impor diperlukan strategi peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, peningkatan efisiensi produksi, penguatan

kelembagaan petani, peningkatan kualitas produk, peningkatan nilai tambah, perbaikan akses pasar, perbaikan sistem permodalan, pengembangan infrastruktur, serta pengaturan tata ligan dan insentif usaha.

Agar tujuan dan sasaran pengembangan kedelai dapat tercapai, diperlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh stakeholder: (i) kebijakan pemerintah, mulai dari subsisten hulu hingga ke subsistem hilir; (ii) komitmen dari stakeholder swasta/ pengusaha untuk berpartisipasi dalam menekan ketergantungan pangan dari impor; (iii) partisipasi aktif pemerintah daerah dan aparat pertanian (penyuluh) serta masyarakat pertanian dalam pengembangan budidaya kedelai.

Tidak jauh berbeda, gandum sebagai bahan dasar pembuatan terigu sejak zaman orde baru hingga saat ini belum ada program pengembangan budidaya gandum, sementara kebutuhan terigu setiap tahunnya meningkat, bahkan diperkirakan setiap tahunnya konsumsi gandum nasional naik sekitar 6 persen. Sebagai negara yang berpenduduk besar, bagi produsen gandum, Indonesia merupakan potensi pasar yang paling baik, belum lagi kegiatan impor komoditi ini dimonopoli oleh perusahaan yang sudah menguruti dan linkage dengan industri makanan olahan lainnya. Untuk tahun 2010 realisasi impor gandum menembus 5,85 juta ton atau setara dengan konsumsi terigu 4,3 juta ton (Detikfinance, 24/01/2011).

Porsi terbesar impor gandum untuk terigu, ekuivalen dengan 1 juta ton. Permintaan terigu setiap tahunnya juga meningkat karena permintaan produk olahan berbahan baku terigu naik. Jadi meski terjadi peningkatan impor gandum tidak 100 persen untuk konsumsi domestik, sebagian diekspor produk turunan terigu. Sampai disitu, bagi bangsa Indonesia cukup menguntungkan karena negara ini sudah menjadi sentra produk makanan olahan berbahan terigu. Tapi industri hulunya (produsen gandum) tetap menguntungkan bagi mereka, apalagi produk dalam negeri tidak mampu mengimbangi impor. Saatnya nanti jika negara penghasil gandum mengalami gagal panen, maka suplai pasti terganggu dan berdampak terhadap kenaikan

harga-harga produk turunan terigu (gandum).

Selama ini pengembangan budidaya gandum belum berjalan efektif, alasan utamanya gandum kurang cocok dikembangkan di daerah tropis. Kalaupun ada, luas lahan produktivitas gandum tropis relatif masih rendah atau tak memenuhi skala ekonomis, selain itu pemerintah menganggap sangat sedikit lahan yang cocok untuk gandum, karena berbeda dengan tanaman padi. Gandum lebih cocok ditanam di daerah kering dan tinggi.

Jika ini menjadi kendala utamanya, terasa agak apolojik untuk mencari lahan seperti itu bukan perkara sulit. Saya menduga lebih karena perhatian pemerintah belum ada, kendati garbarnya sudah menjadi kebutuhan pokok. Padahal penanaman gandum di Indonesia sudah ada sejak awal abad 20 secara terbatas di Jawa yaitu di Pengalengan, Dieng, Tengger, dan Amanumbang. Luas tanaman gandum di Indonesia tak pernah berkembang dan tak pernah melampaui luas lahan 2.000 hektar per tahun. Menurut Asosiasi Produsen Terigu Indonesia (APTINDO), penyebabnya pengembangan gandum di Indonesia tak berkembang karena tidak ada penampungan hasil gandum, tak ada upaya khusus dari pemerintah untuk mengembangkan gandum dan tanaman gandum ditanam di dataran tinggi sehingga harus bersaing dengan tanaman sayuran yang lebih menjanjikan (Detik-Finance, 26/10/2010)

Bagaimana dengan gula, kondisinya tidak berbeda jauh. Sebagai bahan pokok, permintaan untuk konsumsi langsung dan industri makanan terus meningkat setiap tahunnya. Totalnya secara nasional kebutuhan gula dalam negeri mencapai 4,8 juta ton, sekitar 2,7 juta ton untuk konsumsi langsung dan 1,8 juta ton untuk industri. Sedangkan produksi gula dalam negeri hanya 2,8 juta ton. Artinya, untuk memenuhi kebutuhan nasional tidak ada alternatif lain harus mengimpor, karena untuk mengandalkan pasokan domestik sangat mustahil. Sementara impor gula juga bukan perkara gampang, gula sangat bergantung dari siklus untuk menunggu musim giling.

Selama ini, impor gula diambil dari India dan Thailand, atau alternatifnya dari Brazil. Sebagai negara yang masuk kategori *emerging market*, India justru defisit gula sekitar 6 juta ton. Sementara Thailand secara umum terkendala dengan musim giling. Brazil sebagai salah satu negara produsen utama memang punya stok gula yang lumayan besar, kendalanya jarak ke Indonesia cukup jauh waktu tempu pengangkutan lebih dari sebulan. Walau ada kebijakan dari pemerintah untuk menurunkan bea masuk, tapi secara umum importir sulit memenuhi karena stok gula di pasar internasional kerap kekurangan.

Selain itu, Brazil sudah mulai mengurangi ekspor gula tebu karena mereka mengembangkan industri etanol. Dengan melihat keruwetan pergulaan, untuk jangka panjang industri gula harus dilakukan revitalisasi. Industri gula di Indonesia hampir tidak ada perkembangan, terutama yang dikelola PTPN (BUMN), sebagian besar pabriknya peninggalan Belanda.

Produksi gula yang dikelola oleh PTPN makin mengalami *increasing return to scale*, tidak ekonomis lagi. Disamping itu, diperlukan ekstensifikasi, perluasan lahan gula di beberapa daerah. Karena itu semestinya swasta diberikan insentif, tengok saja sudah banyak swasta berminat untuk investasi industri gula tetapi mereka terkendala lahan. Sebagian lahan milik masyarakat, idealnya yang membebaskan lahan adalah pemerintah, terutama pemerintah daerah dengan dukungan penuh pemerintah pusat. Inilah bentuk insentif bagi investor, tidak boleh dibiarkan swasta yang membebaskan lahan, karena itu akan berpotensi munculnya konflik agraria.

Secara umum, masalah pergulaan yang setiap saat dapat mengerek harga gula karena tata niaga gula tidak ada bedanya dengan komoditi lain. Ada banyak tangan yang bermain, sehingga masalah pokoknya ada pada sistem perdagangan dan distribusinya. Konkritnya, untuk menekan laju impor dan meningkatkan produksi dalam negeri diperlukan pemetaan yang konkrit berapa kebutuhan nasional gula, berapa produksi dalam negeri. Perluasan tanaman tebu menjadi jalan paling tepat, mengingat sebetulnya jika pemerintah bersinergi dengan

pemerintah daerah peluang industri ini cukup besar, apalagi lahan masih cukup lebar. Pertama daerah yang penduduknya masih kurang. Revitalisasi industri gula menjadi mendesak, dengan target jangka panjang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, akan tetapi juga pasar internasional.

Sementara komoditi pangan tradisional lainnya yang semestinya dapat menggantikan beras dan gandum semakin lama diabaikan keberadaannya. Produk umbi-umbian dan sagu yang merupakan makanan pokok bagi orang yang berada di belahan timur Indonesia, perlahan mulai ditinggalkan. Politik pangan pemerintah cenderung menggerus kebiasaan masyarakat dengan beralih ke komoditi beras, pada akhirnya pangan alternatif yang sudah menjadi makanan pokok perlahan-lahan ditinggalkan, dan mendorong permintaan terhadap konsumsi beras meningkat.

Sementara pada saat yang bersamaan produksi beras dalam negeri berfluktuatif, dan pemenuhan kebutuhan stok dilakukan dengan mengimpor dari Vietnam, Thailand, bahkan dari Jepang. Pengembangan sumber pangan lokal pada skala ekonomi menghadapi berbagai kendala, terutama pada wilayah pegunungan. Salah satu kendala tersebut adalah tidak adanya infrastruktur dan lembaga pemasaran hasil pertanian. Petani biasanya menjual produk pertanian mereka ke pasar desa yang hanya buka 1-2 hari seminggu. Produk pertanian yang dijual antara lain adalah umbi-umbian dan sayuran. Pemasaran hasil pertanian dalam skala agribisnis sangat jarang dijumpai karena produk belum memenuhi kuantitas yang layak dipasarkan (*marketable product*) selain lemahnya sarana transportasi (Rauf dan Suradisastira, 2008).

Tidak jauh berbeda, komoditi jagung sebagai sumber pangan dan bahan baku berbagai makanan olahan serta sebagai sumber minyak nabati. Selain itu, selama tiga dekade terakhir permintaan jagung untuk bahan baku pakan domestik terus meningkat seiring dengan berkembangnya pabrik pakan dan industri perunggasan. Kebutuhan jagung domestik meningkat pesat sebesar 6,6 persen per tahun, sementara produksi hanya mengalami laju peningkatan sekitar 2,5 persen per tahun.

Meskipun ada beberapa wilayah melakukan kegiatan ekspor, seperti Gorontalo akan tetapi kebutuhan jagung nasional masih lebih besar, dibandingkan dengan ekspor. Pada tahun 2010 saja, ditargetkan produksi jagung akan mencapai 19,8 juta ton, namun kenyataannya hanya mencapai 17,9 juta ton. Jadi produksi jagung tahun 2010 masih ada kekurangan sekitar 2 juta ton. Dengan tidak tercapainya target produksi jagung nasional sebanyak 19,8 juta ton, maka untuk memenuhi kebutuhan jagung industri pakan ternak telah melakukan impor jagung (Business News, 22 Nov 2010).

Kelihatannya, harga jagung domestik cenderung berfluktuatif sementara harga jagung di pasar internasional trennya meningkat, bahkan diperkirakan harga jagung di bursa komoditi bejangka internasional untuk penyerahan sampai tahun 2012 sudah mencapai di atas US\$ 550/busel. Perkembangan harga jagung di pasar internasional tersebut, bisa dijadikan peluang bagi Indonesia, dengan catatan ada kebijakan pendukung yang memadai. Sebab kendala selama ini yang dihadapi para petani jagung sulitnya mendapatkan bibit yang baik, serta produktivitas lahan masih rendah, baru mencapai 4 ton/ha.

Menurut data Dewan Jagung Nasional (DJN), Amerika dengan menggunakan benih jagung hibrida dan transgenik, produktivitas jagung rata-rata mencapai 8-9 ton/ha. Dengan menggunakan benih jagung transgenik bisa diperoleh kepastian produksinya tinggi, karena teknologi transgenik bisa menghasilkan benih jagung yang disesuaikan dengan iklim dan lahan yang akan ditanami jagung transgenik.

Hal ini menggarisbawakan bahwa pengembangan komoditi jagung, tidak lepas dari sentuhan teknologi dan dukungan kebijakan pemerintah yang memadai. Penggunaan bibit hibrida, masih menurut DJN hanya sekitar 30 persen dari seluruh lahan jagung yang ada. Pemasaran bibit jagung hibrida masih fokus di daerah-daerah yang *existing*, sementara lahan untuk pengembangan jagung masih begitu luas di beberapa daerah. Untuk meningkatkan produktivitas jagung, jelas diperlukan eksentifikasi ke daerah-daerah yang memiliki lahan yang potensi,

senbani dilakukan penyuluhan penggunaan bibit unggul (hibrida). Jika perlu, bibit hibrida digratiskan kepada petani jagung, dan mengubah pola tanam dari satu kali musim tanam menjadi dua kali musim tanam setiap tahunnya.

Untuk sektor perkebunan, selain sawit dan karet kebutuhan domestik masih begitu besar, terutama sebagai bahan baku sandang, seperti kapas. Secara nasional kebutuhan kapas yaitu sekitar 500.000 ton kebutuhan serat kapas nasional per tahun. Kapas impor kebanyakan digunakan untuk industri tekstil, dan sebagian besar produk tekstilnya diekspor. Sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 25 ribu ton (Business News, 27 Juli 2010). Sehingga Indonesia saat ini masih impor 99 persen dari total kebutuhan nasional.

Ketergantungan kapas impor yang tinggi, berdampak terhadap industri garmen. Pada tahun 2010 lalu harga kapas melonjak hingga 100 persen berimbas pada kenaikan harga benang dan polyster. Kenaikan harga kapas dunia, setidaknya menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), diakibatkan oleh imbas pemanasan global dan banjir yang terjadi di berbagai negara penghasil utama kapas seperti India, Pakistan dan China. Selain itu, seiring dengan makin majunya perekonomian China, terjadi lonjakan konsumsi tekstil di negeri tirai bambu itu yang mencapai 20 persen jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini memicu meningkatnya permintaan kapas. Malahan, China telah menyebabkan kepanikan pasar dunia.

Industri tekstil di Indonesia yang bergantung dari kapas impor tentu sulit bersaing, akibatnya industri tekstil mengurangi produksinya, tidak menutup kemungkinan berlanjut terhadap pengurangan pekerja. Kondisi ini jelas memperkuat indikasi bahwa deindustrialisasi di sektor garmen makin meningkat, apalagi setelah AC-AFTA berlaku, industri garmen banyak gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan tekstil dari China dan India dengan harga yang kompetitif, selain masuknya tekstil ilegal.

Dengan melihat luas lahan yang tersedia, seharusnya

komoditi kapas ini dapat dibudidayakan di Indonesia, akan tetapi kebijakan pendukung untuk memproduksi komoditi amat minim. Karena itu, bagi industri garmen yang masih bertahan mereka mengandalkan pasokan kapas dari China dan Afrika, bagi industri garmen yang tidak mampu bertahan, mereka beralih menjadi pedagang tekstil, terutama dari India dan China dengan harga yang miring.

Sementara sub sektor peternakan, tidak jauh berbeda. Siapapun menteriya atau pejabat publik yang menangani sektor ini kerap bersuara lantang akan membuat program swasembada daging. Bahkan kementerian pertanian menargetkan tahun 2010 lalu sebagai tahun swasembada daging, target tersebut meleset. Saat ini target swasembada daging bergeser ke tahun 2014, dugaan saya targetnya sangat politis, karena tahun tersebut merupakan akhir periode pemerintahan saat ini. Karena itu pemerintah berupaya meningkatkan populasi sapi, sehingga produksi daging juga diharapkan bisa naik dari 250.800 ton tahun 2009 menjadi 420.400 ton tahun 2014. Dari total kebutuhan daging, sekitar 30 persen masih diimpor.

Kegiatan impor daging tidak lepas dari praktek kolusi, yang cenderung menguntungkan partai pengendali kementerian yang berkaitan dengan komoditi ini. Permainan kongkalikong impor daging dari Australia pernah mencuat di media nasional, karena ada pemain baru dalam bentuk yayasannya mendapatkan kuota impor melebihi dari kuota pemain lama yang sudah berpengalaman.

Tekad untuk mengurangi impor atau bahkan mencapai swasembada daging tidak cukup, akan tetapi butuh komitmen yang kuat sebab akan berdampak luas bagi petani peternak. Target swasembada daging tidak hanya menguntungkan bagi pemodal saja, akan tetapi juga melibatkan petani kecil. Sebab potensi dan lahan untuk pengembangan peternakan tersebar di seantero Indonesia.

Selain itu, daging unggas perlu dikembangkan dan mendapatkan perhatian sebagai substitusi dari daging sapi. Sebab

daging unggas meski belum dibuka lebar kran impor, namun banyak beredar terutama di supermarket. Bahkan impor daging unggas yang kerap menimbulkan kontroversi, masih ingat dengan prahara impor paha ayam dari USA pada zaman menteri perindustrian dipimpin oleh Rini M. Suwandi. Umumnya, orang-orang USA, tidak suka mengkonsumsi paha ayam karena itu agar produsen tidak mengalami kerugian, pengusaha peternakan ini biasanya mendekati pengambil kebijakan untuk memasukkan paha ayam sebagai komoditi impor.

Mungkin yang paling menghentakkan nalar sehat kita sebagai bangsa yang dikenal sebagai bangsa maritim, setelah penahanan ribuan ton ikan impor beku dan segar yang masuk ke Indonesia. Sebanyak 200 kontainer berisi 5.300 ton ikan beku diarahkan di Pelabuhan Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Mas di Semarang, dan di Bandar Udara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Ikan beku itu diarahkan karena tidak memiliki izin impor (Kompas, 29/3/2011).

Bagaimana mungkin jika di tarik dalam garis ekuasinya, panjang pantai Indonesia yaitu 95.181 KM. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang keempat di dunia setelah Rusia. Sedangkan negara pemilik garis pantai terpanjang diduduki Amerika Serikat (AS), lalu Kanada. Sebagai negara yang memiliki garis pantai yang panjang dan sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas lautan tiga per empat dari luas daratan, dari hasil studi yang ada disebutkan bahwa sektor kelautan mampu menyumbang US\$ 140 miliar per tahun. Potensi ikan begitu melimpah, potensi produksi lestari ikan laut Indonesia 6,4 juta per ton per tahun, sedangkan luas laut Indonesia 5,8 juta kilometer persegi. Tapi ironisnya, ternyata impor ikan tidak sedikit.

Dari segi kuantitas, Indonesia tidak kekurangan ikan tapi faktanya kegiatan impor tetap berlangsung, bahkan mencenggang bukan karena volume ikan impor besar, melainkan juga karena jenis-jenis ikan itu sesungguhnya banyak dihasilkan di dalam negeri. Jenis ikan yang diimpor diantaranya adalah ikan kembung, layang, lele, teri, tongkol kecil dan ikan asin. Ikan-ikan tersebut merupakan ikan laut utama (dominan) yang selama ini dihasilkan

dari kegiatan penangkapan. Jenis ikan-ikan tersebut bagi kalangan masyarakat banyak dikonsumsi karena harganya relatif terjangkau dan murah. Sebagai ilustrasi, harga ikan kembung impor dari China berkisar Rp 5.000 per kilogram, sedangkan ikan kembung lokal Rp 20.000 per kilogram. Harga lele dari Malaysia Rp 8.000 - Rp 15.000 per kilogram, sedangkan harga lele di Kalimantan Barat Rp 20.000 - Rp 25.000 per kilogram.

Impor ikan yang melanda negeri ini sungguh menciderai para nelayan, ini jelas berdampak terhadap kehidupan mereka. Walau sudah ada peraturan yang menjadi payung hukum mengenai pengaturan ikan impor, namun tidak diatur pembatasan jenis ikan, yang ada hanya uji mutu. Sehingga impor ikan yang sejenis dengan ikan lokal pun terjadi. Kebijakan di sub sektor perikanan ini memang cukup pelik, sebagai negara maritim memestinya para nelayan sudah sangat sejahtera, namun kondisinya berbanding terbalik.

Kehidupan nelayan setali tiga uang dengan kehidupan para petani, mereka identik dengan kemiskinan dan ketelabelakang. Kemampuan nelayan semakin menurun, mereka kalah bersaing dengan nelayan-nelayan yang dimodali oleh pengusaha, dan bahkan kalah bersaing dengan nelayan dari luar karena dilengkapi dengan alat tangkap yang modern. Belum lagi dukungan lembaga keuangan untuk sektor perikanan cukup rendah, sementara kebutuhan konsumsi ikan begitu tinggi.

Tidak jauh berbeda, meskipun dikenal sebagai negara kepulauan tapi garam pun sebagian besar diimpor. Kebutuhan negara kita akan garam mencapai sekitar 3,5 juta ton per tahun, sementara produksi garam nasional hanya mampu dipenuhi sekitar 2 persen dari total kebutuhan. Kemenperin mencatat, impor garam konsumsi mencapai 384.210 ton pada tahun 2010. Ini jelas memprihatinkan, apalagi PT Garam Indonesia yang seharusnya perusahaan ini membuat garam untuk masyarakat atau produsen garam untuk diekspor, malahan perusahaan ini hanya melakukan kegiatan impor.

Agak klise rasanya, alasan rendahnya produksi garam nasional karena terbelat lahan dan infrastruktur pendukung. Disamping itu, ada anggapan proses pembuatan garam relatif sulit, memang semua sulit jika komitmen sangat rendah untuk mengembangkan komoditi yang sesungguhnya punya potensi untuk dikembangkan. Justru ada indikasi, praktek impor ingin dipertahankan karena komoditas ini sudah dikuasai para mafioso garam (importir garam). Ataukah bangsa ini memang hanya mau cari yang gampang saja, yang penting dapat keuntungan?

Sedangkan sub sektor hortikultura, untuk sayur mayur tidak terlalu menjadi persoalan karena kebutuhan domestik dapat dipenuhi oleh produksi lokal, akan tetapi berkaitan dengan tenaga buah-buahan, saat ini yang dikonsumsi kebanyakan buah impor, seperti buah apel, durian, jambu, pear, jeruk dan sebagainya. Produksi lokal masih minim, walaupun ada kalah bersaing dengan produk Thailand, China, New Zealand maupun produk pertanian USA.

Sebagai negara tropis, buah-buahan sebetulnya dapat dikembangkan dengan baik. Namun kondisinya tidak jauh berbeda dengan produk pertanian lainnya. Buah impor, seperti jeruk ponkam dari China dulunya hanya bisa didapat di super market, tapi saat ini dipedagang kaki lima dengan mudahnya didapat, bahkan lebih banyak jeruk ponkam di jual ketimbang jeruk produk lokal, seperti jeruk medan. Selain harganya murah, suplai ke pedagang kontinu serta rasanya lebih manis.

Selain jeruk ponkam yang diimpor dari China, masih ada jenis buah lainnya yang memenuhi pasar Indonesia, seperti Apel Fuji dan Pear Shandong. Semenjak diberlakukan ASEAN-China AFTA impor buah-buahan dari China makin melonjak. Malahan kementerian pertanian merilis sepanjang tahun 2010 neraca perdagangan buah-buahan makin jomplang, hingga mencapai US\$ 600 juta, bila dibandingkan tahun 2009 impor buah China baru mencapai US\$ 390 juta.

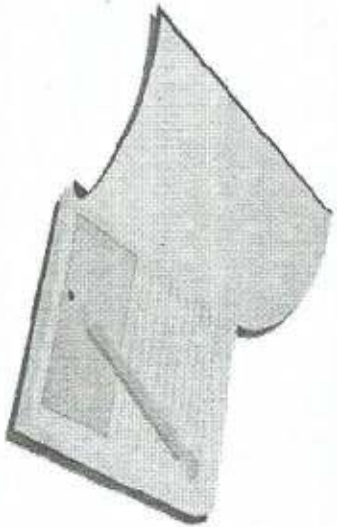
Jika kondisi ini dibiarkan begitu saja, tanpa ada tindakan konkrit maka negara agraris yang subur hanya menjadi cerita Cinderella, dongeng untuk turunan kita kelak. Karena sepertinya bukan hanya produk pertanian yang menyerbu Indonesia, akan tetapi produk lain pun dari China dengan harga yang murah. Kemanapun kita belanja barang akan ditemukan made in China, kenapa begitu sulit menemukan produk made in Indonesia, seperti "made" dari Bali saja yang banyak.

Nafsu untuk ikut kompetisi di pasar bebas begitu besar, akan tetapi perangkat pendukung tidak begitu siap. Hambatan disana-sini tak kunjung dibenahi, maka pasar bebas ini hanya melahirkan pedagang, bukan industrialis. Dampaknya lebih luas, serapan tenaga kerja sangat minim.

Untuk pasar bebas, hanya bangsa yang siap dan pemerintahan yang memiliki komitmen yang kuat dapat meraih manfaat. Begitu mudah bangsa ini mengadopsi "idiologi" liberalisme, tapi sulit belajar tentang praktek dagang dari negara yang menganjurkan liberalisasi. Bagi mereka, sektor pertanian mendapatkan perlindungan dan dukungan kebijakan yang maksimal, serta penguatan kerja sama lembaga-lembaga riset untuk menghasilkan produk pertanian yang baik dan murah.

Pada akhirnya, di negara penganjur liberalisasi pendapatan per kapita yang tinggi, serta distribusi pendapatan antar sektor tidak terlalu lebar. Harga produk pertanian cukup stabil, mencukupi kebutuhan domestiknya, serta mengurangi ketergantungan impor. Tentu saja berdampak terhadap penghematan devisa, dan *balance of payment* makin baik. Terjadi perbaikan alokasi sumberdaya domestik, dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi terus berjalan, pada akhirnya stabilitas politik lebih terjamin, karena rakyatnya kenyang. Kecenderungannya, negara miskin dan terkebelakang gejolak sosial-politik seringkali terjadi ketimbang negara-negara makmur. Selain karena negara terkebalakang, kekuatan negara lemah juga karena pengelolaan kekayaan sumber daya tidak terdistribusi merata baik. 





Undang-Undang Pangan, Kebijakan Untuk Melindungi Kepentingan Siapa?

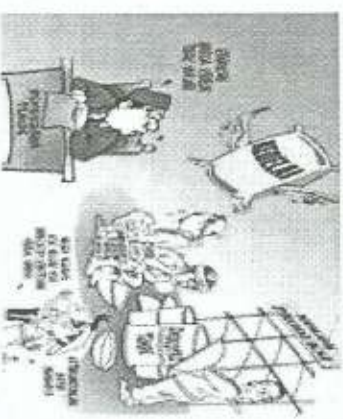
Rangan merupakan komoditas strategis yang perlu dijaga keberlanjutannya, karena ia menyangkut hajat hidup dasar rakyat. Kebijakan pendukungnya senantiasa *adaptable* terhadap berbagai perkembangan sosial politik, bahkan budaya. Tidak hanya melihat dari aspek ekonomi semata. Kecenderungan berpikir ekonomi semata terhadap komoditi pangan biasanya melahirkan kebijakan pragmatis dengan menekankan pada efisiensi. Karena itu, bila terjadi kekurangan pangan, jalan mudahnya dilakukan impor. Bukan hanya disitu, kebijakan produksi pangan yang dianggap praktis cenderung mendominasi keputusan pemerintah, karena itu padi (beras) lebih dianggap efisien pengadaannya ketimbang jenis pangan lainnya, maka pada masa lalu semua rakyat "dipaksakan" mengkonsumsi beras.

Secara historis, terutama kultur masyarakat kebiasaan mengkonsumsi pangan di luar beras sudah terjadi turun temurun pada daerah tertentu. Namun kebijakan melakukan "mewajibkan" konsumsi beras, perlahan sumber pangan lain ditinggalkan. Implikasinya, terjadi hukum permintaan yang diakibatkan dengan

bertambahnya jumlah konsumen untuk mengkonsumsi beras. Sejalan dengan itu, lahan pertanian produktif terus menyusut, yang terjadi kemudian kelangkaan pangan (beras). Untuk memenuhi permintaan pangan, impor menjadi pilihannya. Dibalik kebijakan ini melahirkan berbagai macam pemain yang lebih berorientasi profit ketimbang menjaga ketahanan pangan nasional. *Moral hazard* para importir tumbuh dimana-mana, yang diuntungkan tentu masyarakat, terbuka peluang importir memasukkan beras ilegal atau menghindari bea masuk.

Tahun 1984 kita berhasil menciptakan swasembada beras, setelahnya yang terjadi defisit (kelangkaan). Instrumen kebijakan pemerintah tidak jauh dari impor, sementara untuk mendorong peningkatan produksi pangan lebih banyak muatan politis (jani kosong) yang sulit direalisasikan. Diversifikasi pangan pun tak berjalan baik, masyarakat tetap cenderung mengkonsumsi beras. Upaya mendorong produksi pangan belum terlihat, masalah-masalah klasik penghambat tidak dilakukan perbaikan, seperti revitalisasi irigasi, penyuburan lahan dilakukan secara instan yang mengakibatkan ongkos produksi pertanian meningkat. Akibatnya penghasilan petani cenderung menurun, banyak diantara mereka beralih profesi dengan melakukan urbanisasi. Ini menjadi akumulasi sehingga ketergantungan terhadap impor beras, maupun jenis pangan lainnya yang didatangkan dari luar makin tinggi.

Ditengah kondisi seperti itu, DPR berupaya membuat kebijakan (Undang-Undang Pangan) yang merupakan hak inisiatif, dianggap banyak kalangan terutama akademisi lebih berorientasi liberal. Juga cenderung mendesentralisasi kewenangan ke daerah terhadap pengadaan pangan, idealnya pangan yang merupakan komoditas strategis harus



"dijauhkan" dari mekanisme pasar. Tapi didekatkan pada jaringan pemerintah pusat untuk mengaturnya, sebab komoditi pangan yang dihasilkan tidak semua daerah bertindak sebagai produsen. Bila cenderung diliberalisasi, daerah surplus akan diuntungkan karena memiliki kewenangan untuk mengekspor, daerah miskin atau bukan produsen pangan selamanya akan mengimpor dan bergantung. Apalagi jika kewenangan pemerintah pusat hilang, maka daerah surplus pasti lebih cenderung mencari pasar yang memberikan *gain* yang lebih besar, ketimbang mengantarpulaukan ke daerah kekurangan pangan dengan harga yang kurang kompetitif.

Pemerintah daerah bukan hanya diberikan keleluasaan melakukan ekspor impor tapi juga diberikan diskresi untuk merancang dan mengelola pangan sendiri. Belum lagi, nampak peran Bulog makin direduksi, karena lembaga ini tidak diberikan "beban" untuk menyerap produksi gabah yang dihasilkan oleh petani. Dengan tidak ada kewajiban seperti itu, maka kebijakan pemerintah yang selama ini kerap menolong para petani melalui penetapan harga dasar (*floor price*) akan hilang, berarti para tengkulak akan lebih leluasa menetapkan harga dilingkungan petani. Kewajiban Bulog menyerap hasil panen petani saja, petani tidak berdaya terhadap permainan harga yang dilakukan para tengkulak, apalagi Bulog tidak diwajibkan. Dengan jelas, petani kecil makin terpuruk dan tak berdaya jika UU Pangan yang baru ini diimplementasikan. Peran Bulog direduksi, peran pedagang diperbesar dengan memberikan keleluasaan mengelola cadangan pangan.

Kelahiran UU Pangan ini tentu menyisakan banyak masalah yang sangat serius, tidak saja di hulunya tapi juga di hilirnya. Petani jelas makin kurang berdaya, posisi tawarnya makin turun, sementara keleluasaan pedagang makin besar yang tentu memiliki kapital, bahkan mungkin saja akan dilindungi kekuatan politik yang cenderung memburu rente. Apalagi kewenangan daerah pun diperluas, sementara kita paham bahwa umumnya kepala daerah tidak serius mengurus masalah pangan mulai dari hulu hingga hilirnya. SDM di daerah untuk merancang, mengelola dan kegiatan ekspor-impor masih begitu lemah, maka

peluang yang akan muncul, yakni kekacauan pangan yang berimplikasi pada masalah sosial-politik.

Kewenangan yang ada pada daerah saat ini saja masih sulit untuk diurus dengan baik, apalagi menambah kewenangan untuk pengelolaan pangan. Daerah saat ini lebih cenderung menumpuk dana di lembaga keuangan, yang umumnya bersumber dari transfer pusat ketimbang menggunakan untuk kegiatan produktif.

Sementara hasil kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat yang nyaris tanpa sentuhan pemerintah semua dikenakan pungutan untuk memperbesar penerimaan. Apalagi jika kewenangan merancang dan mengelola pangan diberikan keleluasaan kepada daerah, dugaan saya mereka (Pemda) akan berkolaborasi dengan para pedagang yang diberikan kewenangan juga mengelola pengadaan pangan yang memberikan *gain* untuk digunakan pada pembiayaan politik.

Maka itu artinya ketersediaan pangan memang akan dilakukan akan tetapi lebih cenderung pada nuansa politiknya, ketimbang pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat secara ekonomi. Lalu untuk apa UU Pangan dibuat jika kecenderungan merugikan petani (masyarakat), atau justru akan melahirkan hukum timba siapa yang kuat akan menang, siapa yang lemah selamanya akan miskin dan bergantung pada impor pangan dengan harga yang dimainkan oleh daerah produsen.

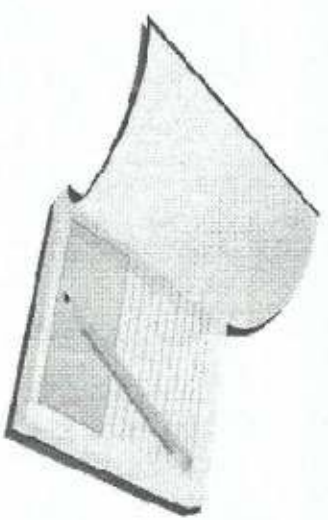
Kitapun patut curiga, rancangan UU Pangan yang baru ini pesanan siapa? Siapa yang diuntungkan? Apakah DPR yang berinisiatif menyusun UU Pangan punya perspektif yang luas atau sekedar memenuhi target legislasi? Jangan-jangan UU ini akan berujung di Mahkamah Konstitusi, pada akhirnya akan dibatalkan. Jika itu terjadi maka uang rakyat yang digunakan membahas UU akan menguap, dinikmati segelintir orang saja yang diklaim sebagai orang terhormat. Ini pertanyaan yang wajib dijawab bagi yang berkepentingan terhadap penyusunan UU tersebut. 





BAGIAN KEDUA:

**MORAL HAZARD DAN PERBURUAN
RENTE MEWARNAI PEREKONOMIAN**



Korupsi Pajak dan Kegagalan Kebijakan Reformasi Birokrasi

Rajak merupakan sumber penerimaan utama untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dalam APBN-P 2010, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 733,238 triliun atau kontribusi pajak terhadap APBN sekitar 78 persen. Pajak sekaligus sebagai indikator instrument fiskal negara, yang berkaitan dengan penerimaan. Potensi penerimaan dari pajak sebagai gambaran langsung terhadap perkiraan pengeluaran pemerintah (*government spending*). *Government spending* tentu diperlukan tidak saja untuk pembiayaan rutin akan tetapi juga untuk belanja publik untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Dan pada kenyataannya setiap tahun APBN kita meningkat sekaligus menunjukkan *government spending* juga naik. Makin meningkatnya *government spending* maka sumber penerimaan negara (terutama pajak) terus didorong dan target penerimaannyaapun terus dinaikkan. Konsekuensinya, pemerintah akan terus menambah basis pajak dan menyisir para wajib pajak. Upaya untuk menambah basis pajak dan memperbesar wajib pajak, pemerintah (Depkeu) terus melakukan sosialisasi di media. Iklan yang sangat akrab dipendengaran setiap hari di media elektronika

maupun cetak "hari gini gak bayar pajak, apa kata dunia?", "bayar pajak dan awasi penggunaannya" seolah menjadi menu keseharian.

Tidak itu saja sepanjang tahun 2008 sampai awal tahun 2009 Direktorat pajak melaksanakan penghapusan biaya (*sunset policy*) pengurusan NPWP bagi wajib pajak. Turunan dari kebijakan *sunset policy* juga memberikan keringanan bagi masyarakat yang hendak bepergian keluar negeri yang akan dibebaskan pembayaran fiskal, selama ini dikenakan sebesar Rp. 2.000.000/keberangkatan. Kebijakan *sunset policy* bertujuan untuk mendorong masyarakat dan para wajib pajak untuk memiliki NPWP.

Selain pajak penghasilan, juga ada banyak jenis pajak lainnya yang dipungut oleh pemerintah sifatnya "memaksa", bersifat memaksa karena pungutan pajak itu tidak ada timbal balik secara langsung diberikan kepada wajib pajak. Dengan status "memaksa" tidak jarang pemerintah pusat maupun daerah untuk melayani urusan-urusan publik, masyarakat harus memperhatikan bukti pembayaran PBB pada tahun berjalan. Bila bukti pembayaran PBB tidak ada, atau masih menunggu, umumnya si wajib pajak tidak akan mendapatkan pelayanan. Pertanyaannya mengapa pemerintah bersifat "memaksa" untuk memungut pajak? Karena niscaya hampir semua individu maupun badan tidak ada yang mau bayar pajak secara sukarela. Sedangkan sifatnya wajib dan "memaksa" masih banyak yang mangkir dari pembayaran pajak.

Lalu kenapa harus ada NPWP? Salah satu ketentuan yang berlaku dalam pemungutan pajak di Indonesia adalah dengan mewajibkan orang pribadi untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Awalnya, kewajiban untuk memiliki NPWP ini tidak



ditaati oleh sebagian besar orang yang seharusnya menaati aturan ini. Sampai dengan tahun 2007 jumlah orang pribadi yang memiliki NPWP baru sekitar lima juta orang. Jumlah ini meningkat pesat pada awal tahun 2009 yang sudah mencapai lebih dari dua belas juta orang (Portal Pajak, 2009). Akan tetapi, orang bersedia mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP tidak atas dasar suka rela, tetapi didasarkan pada keterpaksaan.

Di samping itu, banyak juga keluhan dan kebingungan di kalangan masyarakat yang sudah memiliki NPWP. Terlebih-lebih tiba saatnya untuk melaporkan kewajiban perpajakannya melalui SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Kerumitan pengisian SPT juga kerap menjadi keluhan wajib pajak, karena itu tidak sedikit individu atau badan menggunakan jasa konsultan pajak. SPT merupakan penerapan *self assessment system*. Dalam *self assessment system*, negara (pemerintah) memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan sistem ini diharapkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk pembayaran pajak tiap tahun semakin meningkat. Tapi dengan sistem ini memungkin wajib pajak tidak berlaku jujur, terutama pada korporasi-korporasi.

Pajak akan tetap menjadi andalan penerimaan pemerintah, dalam konteks itu, pemerintah selain terus melakukan penyisiran wajib pajak, peningkatan penerimaan bakal didukung dengan realisasi sejumlah kebijakan, seperti perbaikan basis perpajakan, baik melalui reformasi maupun modernisasi pajak dan kepekaan dalam negeri. Sedangkan untuk meminimalkan resiko kebocoran pajak, Depkeu berupaya terus melakukan reformasi birokrasi dengan menerapkan remunerasi (perbaikan penggajian) bagi petugas pajak dan bea cukai. Standar gaji pegawai di Direktorat pajak untuk golongan III A gaji pokok dan tunjangan totalnya sekitar Rp. 2,5 juta, kemudian remunerasi Rp. 8,2 juta/bulan dan imbalan prestasi kerja. Pada kenyataannya memang penerimaan negara dari pajak terus meningkat dari tahun ke tahun, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak terus tumbuh.

Kendati demikian, masyarakat yang bersusah payah membayar pajak kembali membuncahkan apriori dengan munculnya kasus Gayus Tambunan seorang petugas pajak golongan III A melakukan penggelapan pajak sekitar Rp. 395 juta serta memiliki rekening yang mencurigakan sebesar Rp. 25 miliar. Belakangan ditemukan di safety box Bank Mandiri ia menyimpan uang sebesar Rp. 75 M, dan masih menyimpan uang tunai di rumahnya sebesar Rp. 7 M. Dengan jumlah gaji yang disebutkan di atas mustahil orang ini punya rekening sebesar itu, rumah mewah harga miliaran plus kendaraan mewah.

Kasus ini diyakini tidak berdiri sendiri, Gayus bukan *single actor* boleh jadi komplotan. Maka wajar muncul gerakan sosial untuk memboikot bayar pajak, meski pihak direktorat jenderal pajak melakukan *defence* bahwa priaku Gayus bukan cermin dari pegawai pajak secara keseluruhan. Tapi logika masyarakat tidak serta merta menerima argumentasi itu, justru masyarakat makin yakin bahwa kasus korupsi tidak mungkin dilakukan oleh seorang Gayus pegawai golongan III A. Pegawai "rendahan" saja seperti itu, apalagi pegawai yang lebih tinggi, harta mantan seorang dirjen pajak sebesar Rp. 36 miliar yang menurutnya adalah hibah mungkin termasuk cerminan itu.

Dalam perspektif lain, Gayus ini patut kita curiga sebagai operator lapangan, sekaligus anjungan tunai mandiri dari aparat. Kasus rekening Rp. 25 miliar sudah lama diendus oleh PPATK dan bahkan sudah empat kali dilaporkan ke pihak kepolisian, tapi kasus ini baru mulai mencuat tatkala Susno Duadji menyanyikan lagu sendu di luar panggung Mabes Polri. Pasal yang dikenakan kepada Gayus awalnya penggelapan, *money laundry* dan korupsi. Belakangan *money laundry* dan korupsi "tidak terbukti" dipersidangan sehingga uang Rp. 25 miliar disimpulkan halal oleh polisi dan jaksa.

Nyanyian sendu Susno Duadji yang dianggap sebagai nista terhadap lembaga Polri justru menjadi pembuka kotak pandora, bahwa rekening Rp. 25 miliar itu memang penuh keanehan sebagaimana halnya diakui oleh Kapolri dan Jaksa Agung. Pada awalnya mereka bersikukuh bahwa rekening itu

tidak bermasalah. Dalam konteks ini Susno layak dapat tambahan "bintang", sebab tanpa nyanyian Susno, kasus ini tidak akan diketahui oleh publik. Kita menunggu kelanjutan kasus ini jangan sampai hanya jadi sandiwara penegakan hukum, kalau itu terjadi tagline "*hari gini gak bayar pajak, apa kata dunia?*" diganti menjadi "*hari gini bayar pajak, apa kata dunia?*" kalau hanya untuk dikorupsi. Juga seharusnya bukan hanya penggunaan pajak yang diawasi tapi proses pemungutannya pun perlu diawasi karena disinilah titik rawan korupsi.

Apakah Kebijakan Reformasi Birokrasi Gagal?

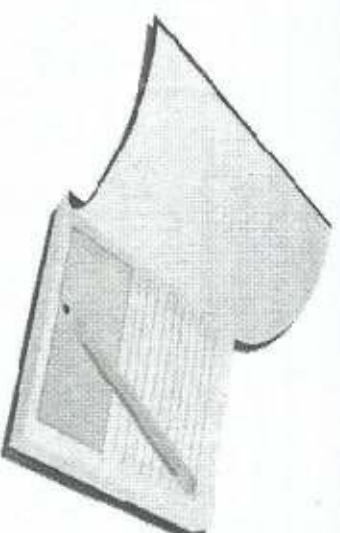
Reformasi birokrasi sudah merupakan kebutuhan bagi lembaga publik, setidaknya reformasi birokrasi bertujuan untuk merubah dua sifat, yaitu struktur dan kultur. Secara umum lembaga publik baik yang ada di pusat maupun daerah terlalu besar (gemuk), jumlah pegawai yang berlebihan dan beban kerja yang timpang. Berkaitan dengan kultur, lembaga publik tidak terbiasa bekerja dengan sistem yang ketat dan terstruktur dan terbiasa menunggu petunjuk dari atasan, sehingga kemampuan inovasi dan kreatifitas tidak berkembang. Kedua kondisi ini memberikan implikasi terhadap pelayanan publik. Layanan yang diberikan menjadi birokratis dan berbelu, praktek semacam ini membuka peluang terciptanya kolusi dan korupsi.

Kelambanan dalam memberikan pelayanan dan panjangnya *red tape* birokrasi akan berdampak terhadap penerimaan negara. Kinerja lembaga publik pada akhirnya tidak dapat bersaing dengan lembaga swasta, kendati wilayah layanan lembaga publik dan swasta berbeda, akan tetapi sama-sama memiliki tanggungjawab menyediakan kebutuhan masyarakat. Karena itu reformasi birokrasi diperlukan, setidaknya mengadopsi sistem dan kultur korporasi dalam memberikan pelayanan terhadap publik.

Konsekuensinya, reformasi birokrasi yang akan merubah struktur dan kultur membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, terutama pembiayaan *hardware* dan *software* pendukung kinerja lembaga. Juga pemberian remunerasi yang cukup bagi

pegawai agar memiliki motivasi bekerja, sebab reformasi atau perubahan struktur dan kultur tanpa dibarengi dengan perbaikan gaji, sulit. Dalam kondisi seperti itu, tuntutan perlunya reformasi birokrasi menjadi keniscayaan, pada saat yang bersamaan kemampuan pembiayaan pemerintah yang terbatas, maka reformasi birokrasi dilakukan secara bertahap. Tahap pertama difokuskan pada lembaga pengumpul (penerima) pajak, bea dan cukai, pembiayaannya melalui pinjaman.

Dari segi struktur, reformasi di difjen pajak, bea dan cukai sudah cukup berhasil, kendati tidak dapat dipungkiri secara kultur belum banyak berubah. Meskipun sudah ada perbaikan insentif bagi pegawai pajak, bea dan cukai perilaku korup dan menyimpan masih eksis. Karena itu reformasi birokrasi perlu terus dilakukan pengawasan baik secara kelembagaan maupun personal, walau sistem sudah baik tanpa pengawasan yang ketat peluang perilaku korup yang masih menjadi "kultur" masih terbentang luas dihadapan kita, ia menggodanya untuk diartungi oleh aparat yang rapuh kepriadiannya. 



Negeri Makelar, Dampaknya Terhadap Perekonomian

Penggunaan kalimat "makelar" beberapa bulan terakhir ini menjadi populer, makelar dalam pandangan ekonomi dapat diartikan agen (perantara), dalam sistem jual beli keberadaannya sesuatu yang lazim. Bahkan untuk meminimalisasi kegagalan pasar yang diakibatkan oleh asimetris informasi, makelar diperlukan, sebab seorang makelar biasanya memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan calon pembeli. Makelar tentunya berperan bukan sebagai *voluntary*, pasti ia memiliki *income expectation* untuk setiap transaksi, seperti makelar mobil, motor, property dan lain-lain. Biasanya makelar dalam kasus seperti ini akan mendapatkan *fee* dari kedua belah pihak, baik dari penjual maupun dari pembeli. Dalam jual beli barang dan jasa dengan menggunakan agen (makelar) tidak ada yang salah, bahkan baik. Kendati pekerjaan makelar biasanya bukan pekerjaan pokok, tapi sebagai *side job* sehingga kehidupan ekonomi seorang makelar biasanya relatif sejahtera.

Tapi spirit makelar ini sudah diadopsi diberbagai lembaga publik, jika anda berurusan dengan lembaga-lembaga publik pasti akan selalu berhadapan dengan mereka, bahkan keberadaannya hadir disetiap sudut ruangan lembaga publik, mulai lahir sampai mati akan berhadapan dengannya. Makin besar diskresi lembaga publik, makin banyak pula makelar berada disitu, dan imbalan

hasil kerja makelar pun makin besar. Kewenangan atau diskresi yang dimiliki sekaligus dapat dijadikan sebagai alat penekan, apalagi jika seseorang bermasalah. Setidaknya beberapa lembaga publik yang memiliki diskresi berpotensi melahitkan makelar, terutama lembaga penegakan hukum.

Karena itu muncunya isu makelar kasus, pandangan kita pasti tertuju ke lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Trio lembaga penegak hukum ini berada dalam sorotan, kasus Gayus Tambunan salah satu cermin yang tidak dapat disangkal oleh siapapun keberadaan makelar di lembaga publik. Kendati pada awalnya ketiga lembaga ini melakukan *difence* bahwa di lembaganya tidak ada makelar, yang sebetulnya mereka sangat paham bahwa anasir ini ada, baik yang ada didalam maupun dari luar yang sangat mengganggu pelayanan publik. Hal ini diperkuat dari hasil survey lembaga transparansi internasional indeks pelayanan di lembaga penegak hukum masih dianggap buruk.

Keberadaan makelar di lembaga publik tentu sangat merugikan banyak pihak, karena ia bersisian dengan korupsi dan penyuapan, tetapi menghilangkan mereka bukan perkara gampang. Makelar yang berasal dari luar, tentu dapat diminimalisasi, tapi orang dalam yang bertugas memberikan pelayanan yang merangkap makelar sulit untuk dihapuskan. Pada beberapa kasus, petugas yang merangkap makelar juga dibutuhkan oleh masyarakat, ada simbiosis mutualisme. Tapi perilaku masyarakat seperti itu muncul karena proses pelayanan di lembaga publik cukup rumit dan berbelu. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi belum melembaga, publik pun mencari jalan pintas dengan menggunakan jasa makelar. Bagi yang memiliki jaringan dan uang tentu bukan hambatan, bagaimana dengan golongan *the have not*, pasti akan dirugikan.

Dalam konteks lebih luas, *red tape* birokrasi yang panjang di lembaga publik menimbulkan ketidakpercayaan di lain sisi, pada sisi lain akan menciptakan ekonomi biaya tinggi. Ketidakpercayaan terhadap lembaga publik, akan menimbulkan apriori sehingga perilaku *moral hazard* akan selalu timbul. Penyelundupan, pengemplangan pajak, maupun kegiatan ilegal

lainnya salah satu cara untuk menghindari keruwetan sistem pelayanan yang tidak efisien.

Bahkan hal ini sudah menjadi masalah klasik di Indonesia sistem pelayanan birokrasi menciptakan ekonomi biaya tinggi dan ketidakpastian, sehingga dapat mengganggu *attractiveness of investment*. Kendati aliran modal masuk ke Indonesia untuk triwulan pertama tahun 2010 cukup tinggi, tapi lebih banyak di sektor keuangan. Sementara untuk sektor riil masih tetap minim, alih-alih untuk menarik investasi mempertahankan investasi yang ada cukup berat. Derasnya aliran modal di sektor keuangan masuk ke Indonesia terutama diakibatkan tingkat suku bunga di luar negeri cukup rendah, di bandingkan dengan Indonesia. Namun sektor keuangan cukup rentang dan sensitif terhadap variabel non ekonomi, sewaktu-waktu modal itu dengan cepat mengalir keluar, disisi lain bersifat *nontradeable* dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja sangat rendah.



Tidak dipungkiri pemerintah sudah melakukan berbagai upaya pembenahan birokrasi, memberlakukan sistem remunerasi pada lembaga penerima dan pengelola uang, tapi hasilnya belum memberikan dampak secara signifikan. Makelar di direktorat pajak masih banyak beredar, kasus-kasus *abuse of power* di bidang perpajakan satu persatu mulai muncul kepermukaan. Penerapan sistem remunerasi di Direktorat Pajak dan Mahkamah Agung pada akhirnya diragukan banyak pihak, padahal mereka sudah diberikan gaji yang lebih dari cukup tapi sifat rakus dan tamak tetap saja. Belum lagi jika dihitung, reformasi birokrasi yang dilakukan di Depkeu menggunakan dana pinjaman, artinya rakyat yang harus membayar utang itu. Pada saat yang bersamaan pemberian remunerasi menciptakan sistem kasta kepegawaian,

seolah pegawai departemen lain kastanya lebih rendah.

Banyaknya makelar bercokol di lembaga publik juga menciptakan ketidakpastian pemberian layanan, baik dari segi waktu maupun biaya. Kondisi seperti ini sangat tidak disukai bagi pelaku usaha. Di ruang-ruang publik pun makelar juga hadir, jika anda ke terminal hendak menggunakan jasa angkutan pasti akan berhadapan dengan calo yang sesungguhnya juga makelar, bagi kita kehadiran calo kerap lebih banyak tidak mengenakkan ketimbang membantu. Dalam pada itu, lembaga-lembaga publik yang banyak makelarnya, produk barang dan jasa yang dihasilkan pasti tidak optimal. Mungkin hampir semua pelaku usaha yang pernah berhubungan dengan lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah budaya setoran pernah dilakukan, hal ini dilakukan sebagai kompensasi mendapatkan pekerjaan.

Namun demikian, pelaku usaha (tepatnya) kontraktor sudah barang tentu berorientasi profit, ia akan selalu memaksimalkan utilitasnya. Bagian yang distorkan ke panitia yang memberikan pekerjaan maupun lembaga politik yang mengawasi, sebab mereka ini menjalankan fungsinya sebagai makelar, tentu dibebankan pada anggaran pembelian barang dan jasa, dalam teori ekonomi disebut *access burden*, artinya produk yang dihasilkan tidak sepenuhnya optimal karena ada beban anggaran tambahan, atau setidaknya kualitas produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. 



Dana Aspirasi Konstituen, Kemungkinan Makin Memperparah Kesenjangan Fiskal

asil Pemilu 2009 sebetulnya membuka harapan baru bagi masyarakat, karena anggota DPR RI yang terpilih lebih 60 persen muka baru yang masih *fresh*, tingkat pendidikannya makin membaik. Ekspektasi masyarakat sangat wajar karena mereka yang dipilih belum banyak "terkontaminasi" dengan perilaku korup, mesum dan pemalas. Saya mencatat, puluhan anggota DPR periode lalu "berhubungan" dengan KPK karena tersandung kasus suap, ada suap di perhubungan, kehutanan, pemilihan DGS BL Video dan gambar mesum oknum anggota DPR setidaknya ada dua kasus. Malas masuk kantor, dan malas mengikuti sidang-sidang cukup banyak, kebiasaan studi banding yang tidak memberikan nilai tambah.

Ternyata anggota DPR RI periode sekarang tidak jauh beda perilakunya dengan periode sebelumnya, yang hanya mengutamakan kepentingannya ketimbang masyarakat umum, hanya modusnya bersalingrupa untuk mengakali pemanfaatan anggaran (*budget*). Mungkin belajar dari pengalaman sebelumnya, yang banyak ditangkap tangan oleh KPK karena kasus suap, sebagai imbalan dari "kerja keras" mereka menggegalkan proyek di daerah. DPR periode sekarang ini belum cukup setahun bekerja

sudah menuai banyak kontroversi terkait dengan penggunaan *budget*, seperti pembelian komputer super mahal, mesin faximile, uang legislasi, TV LCD, biaya renovasi rumah jabatan yang melonjak-lonjak (Rp. 445 miliar), biaya studi banding, usulan biaya pembangunan gedung DPR yang baru (Rp. 1.8 triliun), pengesahan anggaran setiap komisi tanpa (belum) ada program yang jelas (Rp. 2 Triliun), terakhir usulan permintaan dana aspirasi konstituen dapil (daerah pemilihan) sebesar Rp. 15 M/anggota dewan.

Dana aspirasi yang diusulkan bukan original Indonesia, Amerika sudah lama menerapkannya yang dikenal dengan "*pork barrel*", bahasa harfiahnya sangat mengejek, yaitu "kentong babi" yang terbukti penerapannya sebagai ajang kolusi dan korupsi antara anggota senat dan pihak yang menjalankan program, bahkan cenderung penggunaan anggaran ini tidak efisien secara ekonomi. Karena itu Barack Obama menjadikan isu kampanye "*pork barrel*" ini akan dihapus, atau menjadi agenda prioritas pemerintahan Obama, selain reformasi asuransi kesehatan.

Mencermati usulan ini agar setiap anggota DPR memperoleh dana aspirasi sebesar Rp. 15 M/orang/dapil, dengan alasan pemerataan pembangunan sangat tidak tepat. Bila usulan ini diterima pemerintah, bukan solusi pemerataan tapi masalah baru yang muncul, asumsi saya justru makin membuat ketimpangan baru antar wilayah. Tegasnya, ukuran pemerataan dengan mengucurkan dana berdasarkan dapil sangat mencederai *equalizing transfer*, formula DAU saja yang diasumsikan dapat menjawab ketimpangan fiskal dan pembangunan belum memberikan hasil yang optimum, apalagi dengan menggunakan formula pembagian dana berdasarkan dapil.

Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan provinsi yang paling banyak dapil, serta beberapa provinsi yang ada di Pulau Jawa-Bali akan mendapatkan kucuran yang lebih banyak karena penduduknya lebih besar. Provinsi Jawa Barat ada 11 dapil dengan jumlah kursi sebanyak 82 dengan jatah Rp. 15 M, berarti ekuivalen dana mengucur ke provinsi ini sebesar Rp. 1,23 triliun, Jawa Tengah 10 dapil jumlah kursi 78 berarti akan

mendapatkan jatah Rp. 1,17 triliun, dan Jawa Timur 11 dapil dengan jumlah kursi sebesar 87 setara dengan Rp. 1,305 triliun. Berarti tiga provinsi ini sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 3,705 triliun.

Jika dikalkulasi lebih lanjut, dengan memasukkan provinsi lainnya di Pulau Jawa, DKI Jakarta ada tiga dapil dengan total kursi sebanyak 21 akan kebagian dana konstituen Rp. 315 M, Provinsi Banten tiga dapil dengan jumlah kursi 22 akan mendapatkan dana sebesar Rp. 330 M, Yogyakarta memiliki delapan dapil jatahnya sebesar Rp. 120 M, memasukkan Provinsi Bali dengan jumlah kursi Sembilan, berarti akan mendapat jatah sebesar Rp. 135 M. Total jatah dana konstituen ini untuk provinsi di Jawa-Bali sudah menyedot Rp. 4,705 triliun, lebih separuh anggaran yang diminta sebesar Rp. 8,25 triliun/tahun. Selama lima tahun total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 42 triliun.

Bagaimana dengan kondisi di bagian timur Indonesia? Provinsi Papua dan Papua Barat dengan wilayah yang cukup luas dan infrastruktur yang buruk jumlah kursi 13 hanya akan mendapatkan dana sebesar Rp. 195 M, Sulawesi Utara dan Tengah masing-masing enam kursi berarti mendapatkan jatah per provinsi Rp. 90 M. Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Barat masing-masing tiga kursi, berarti mendapatkan Rp. 45 M. Provinsi provinsi ini ditinjau dari aspek apapun jauh tertinggal dari Jawa-Bali. Dari kalkulasi saya, dana yang menggelontor ke Jawa-Bali akan makin memperparah ketimpangan dengan provinsi lainnya di Indonesia, terutama bagian timur. Di Jawa Barat dan Jawa Timur, ada dapil yang hanya meliputi 2 kabupaten/kota sementara di KTI satu dapil satu provinsi kecuali Sul-Sel tiga dapil, itu artinya ada satu provinsi yang luasnya dua kali tipe Jawa Barat sama-sama mendapatkan Rp. 15 M.

Lalu logika apa yang dipakai para pengusul dan inisiator dana aspirasi konstituen dengan mengasumsikan dana ini untuk pemerataan pembangunan? Pemikiran dari mereka ini sangat inkonstitusional, sesat, bertentangan dengan UU No. 33/2004 tentang pembagian keuangan pusat-daerah, UU ini menegaskan perlunya *equalizing transfer*. Daerah yang kapasitas fiskalnya

rendah akan diberikan transfer lebih tinggi, sementara dengan menggunakan ukuran dapi justru ketidakadilan yang dipertontonkan karena daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya besar mendapatkan jatah lebih besar, ketimbang daerah yang kapasitas fiskalnya kecil, sehingga makin tidak mengatasi *horizontal fiscal imbalance*.

Disamping itu dana aspirasi konstituen ini akan *overlapping* dengan dana otsus Aceh dan Papua, atau dana percepatan pembangunan yang diberikan ke Sulawesi Tengah. Basis dan formula perhitungan dana aspirasi ini juga kurang didasarkan *assessment* daerah, karena disamaratakan ementara kondisi dan *performance* ekonomi setiap kabupaten/kota berbeda. Ada daerah angka kemiskinannya rendah, kapasitas fiskalnya besar mendapatkan Rp. 15 M, sementara ada daerah, terutama di KTI angka kemiskinan tinggi, kapasitas fiskalnya kecil juga tetap sama mendapatkan Rp. 15 M.



Tidak itu saja, potensi melanggar berbagai UU sangat terbuka seperti UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan konstitusi negara (UUD 45), karena DPR sudah menjalankan fungsi eksekutif, kendati fungsi *budgeting* juga melekat pada mereka, tapi bukan mereka yang menentukan anggaran. Legislatif kewenangannya hanya "mengoreksi", menyetujui atau tidak anggaran yang diusulkan eksekutif. Kendati usulan anggaran itu dititipkan ke kementerian, tapi ini namanya mensiasati dan mencari celah untuk melakukan praktek-praktek yang tidak benar.

Kalau pun dititipkan di kementerian berdasarkan aspirasi dari daerah, dana aspirasi ini melekat dimana? Apakah masuk porsi anggaran pemerintah pusat, atau bagian dari dana perimbangan? Kalau dia masuk porsi anggaran pemerintah pusat,

apa bedanya dengan sistem selama ini yang dianggap banyak tidak terserap, sehingga menjadi sisa anggaran tahun lalu atau silpa. Kalau masuk dana perimbangan, apakah ia bagian dari DAU, DAK atau bagi hasil atau jenis transfer apa? Bila dana perimbangan, maka formulanya harus jelas. Pemahaman kita bahwa formula dana perimbangan selalu berubah setiap tahun untuk mengakomodasi perubahan di daerah, sementara dana aspirasi langsung dipatok dan tidak berubah selama lima tahun anggaran.

Fraksi Golkar sebagai inisiator tetap tak bergeming dengan usulan itu, mereka menganggap hal yang wajar, bahkan dalam pandangan Priyo Budi Santoso (Wakil Ketua DPR RI) dari Golkar merasa sulit anggota DPR jika tidak ada dana pembinaan untuk membina konstituen. Logika umum kita, dalam era perpolitikan yang terbuka dan persaingan yang ketat itu resiko menjadi politisi berpolitik memang mahal tapi bukan menggunakan anggaran negara untuk kepentingan kelangsungan karir politik orang per orang.

Pemerintah sudah memberikan anggaran kepada setiap parpol yang mendapatkan kursi di parlemen, dari segi efisiensi juga kurang tepat. Alasan lain yang dikemukakan untuk menjustifikasi usulan anggaran konstituen, karena banyaknya infrastruktur yang buruk di daerah dan serapan anggaran yang tidak maksimal di kementerian, kemudian setiap tahun silpa besar. Harusnya disinilah fungsi pengawasan legislatif diperkuat bukan meminta dan menitipkan di kementerian yang setiap saat dapat dicairkan (semacam *voucher*) atas permintaan anggota dewan untuk membenahi infrastruktur.

Ada lagi argumentasi dari anggota DPR Fraksi Golkar bahwa dengan adanya dana aspirasi akan menghilangkan mafia anggaran di Departemen Keuangan, bahkan dengan tega menyebutkan pihak yang menolak dana aspirasi jangan-jangan dibiayai oleh mafia anggaran. Pertanyaannya, kalau anggota legislatif yakin ada mafia anggaran, lalu apa upaya anggot legislatif atau dimana fungsi pengawasan mereka?

Basis argumentasi yang mendukung dana aspirasi ini sangat dangkal, dan terkesan memungut disana-sini alasan membenaran. Ini sekaligus dapat dijelaskan bahwa dewan tidak optimal menjalankan fungsi pengawasannya, dan juga fungsi legislasinya tidak berjalan untuk menghilangkan mafia anggaran di setiap kementerian. Malahan fungsi penganggarannya justru begitu keras dan *full power*, tanpa menyadari mengeluarkan ancaman untuk menjadikan pembahasan APBN 2011 *deadlock* jika permintaannya kepada pemerintah tidak dianggapi. Tidak salah, banyak pihak menjadi curiga, ada apa anggota dewan (Fraksi Golkar) begitu ngotot dengan dana aspirasi ini?

Belum lagi dari aspek pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran tersebut yang menyimpan potensi penyelewengan dan peluang kolusi antara pejabat nakal di daerah dan anggota dewan. Dengan menggunakan anggaran negara, para anggota legislatif ini dengan mudahnya akan mengklaim keberhasilan pembangunan di daerah sebagai jerih payahnya sehingga ia tetap layak untuk dipilih untuk periode berikutnya. Artinya, para *incumbent* ini menanam "investasi politik" dengan menumpang gratis (*free riders*).

Masalah lain yang akan muncul, terkait dengan pengawasan. Dalam menjalankan program pihak eksekutif diawasi oleh legislatif, akan tetapi jika legislatif memiliki "program sendiri" yang dijalankan kementerian di daerah konstituennya, jika tidak berjalan optimal, atau ada penyimpangan yang mungkin juga terkait dengan legislatif, lalu siapa yang mengawasi?

Juga siapa yang dapat menjamin bahwa dana aspirasi Rp. 15 M perorang/perdapi anggota legislatif tidak akan bermain (kolusi) dengan menipiskan kontraktornya untuk mengerjakan proyek yang didanai dari dana aspirasi itu? Jika permintaan dana aspirasi ini dilayani pemerintah, sebentar lagi DPPD RI akan melakukan yang serupa dengan alasan memperjuangkan kebutuhan daerah (provinsi) pemilihannya, kemudian akan diikuti rana-ramai di DPRD provinsi, kabupaten/kota, maka sistem penganggaran dan transfer kita makin kacau. Bangsa ini

bukan makin membaik, tapi makin rusak dari nafsu "birahi politik" yang selalu mengatasnamakan kepentingan rakyat dan kepentingan konstituen.

Sifat ngotot Golkar tentang dana aspirasi mendapatkan resistensi yang luas dari masyarakat, termasuk partai-partai yang tergabung dengan sekretariat gabungan (setgab). Meski demikian hasrat Golkar tetap ada, hanya sedikit mereda, meskipun tetap terbesit keinginan mereka untuk tetap digolkan usulannya itu. Indikasi itu dapat dibaca dari hasil pidato kenegaraan presiden tanggal 16 agustus 2010 lalu, pidato presiden tidak memberikan ketegasan apakah menolak atau mengakomodasi, tapi bagi Golkar seolah ada isyarat bahwa usulan dana aspirasi itu presiden sepakat.

Usulan Golkar kini berubah wajah, bukan lagi dana aspirasi tapi dana pengembangan infrastruktur untuk setiap daerah pemilihan tanpa menyebut angka setiap orang anggota DPR RI. Bagi saya, usulan Golkar ini tetap tidak dapat dipaksakan, dengan jumlah dapil dan anggota DPR RI separuh berada di Jawa justru akan memperparah ketimpangan pembangunan infrastruktur.

Infrastruktur yang ada di Pulau Jawa sudah relatif baik dibandingkan dibagian timur Indonesia, atau provinsi lainnya yang ada di Kalimantan, Maluku, Papua maupun di NTB dan NTT. Lalu apa yang ada dalam pikiran mereka yang tetap ngotot mengusulkan dana atas nama anggota DPR RI? Kita sepakat pembangunan di daerah harus dipercepat dengan menambah transfer, tetapi bukan didasarkan dapil, apalagi mendompleng anggota DPR RI. □

◆◆◆◆◆

Basis argumentasi yang mendukung dana aspirasi ini sangat dangkal, dan terkesan menungut disana-sini alasan pembenaran. Ini sekaligus dapat dijelaskan bahwa dewan tidak optimal menjalankan fungsi pengawasannya, dan juga fungsi legislasinya tidak berjalan untuk menghilangkan mafia anggaran di setiap kementerian. Malahan fungsi penganggarannya justru begitu keras dan *full power*, tanpa menyadari mengeluarkan ancaman untuk menjadikan pembahasan APBN 2011 *deadlock* jika permintaannya kepada pemerintah tidak ditanggapi. Tidak salah, banyak pihak menjadi curiga, ada apa anggota dewan (Fraksi Golkar) begitu ngotot dengan dana aspirasi ini?

Belum lagi dari aspek pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran tersebut yang menyimpan potensi penyelewengan dan peluang kolusi antara pejabat nakal di daerah dan anggota dewan. Dengan menggunakan anggaran negara, para anggota legislatif ini dengan mudahnya akan mengklaim keberhasilan pembangunan di daerah sebagai jerih payahnya sehingga ia tetap layak untuk dipilih untuk periode berikutnya. Artinya, para *incumbent* ini menanam "investasi politik" dengan menumpang gratis (*free riders*).

Masalah lain yang akan muncul, terkait dengan pengawasan. Dalam menjalankan program pihak eksekutif diawasi oleh legislatif, akan tetapi jika legislatif memiliki "program sendiri" yang dijalankan kementerian di daerah konstituenya, jika tidak berjalan optimal, atau ada penyimpangan yang mungkin juga terkait dengan legislatif, lalu siapa yang mengawasi?.

Juga siapa yang dapat menjamin bahwa dana aspirasi Rp. 15 M perorang/perdapi anggota legislatif tidak akan bermain (kolusi) dengan menipiskan kontraktornya untuk mengerjakan proyek yang didanai dari dana aspirasi itu? Jika permintaan dana aspirasi ini dilayani pemerintah, sebentar lagi DPD RI akan melakukan yang serupa dengan alasan memperjuangkan kebutuhan daerah (provinsi) pemilihannya, kemudian akan diikuti rama-ramai di DPRD provinsi, kabupaten/kota, maka sistem penganggaran dan transfer kita makin kacau. Bangsa ini

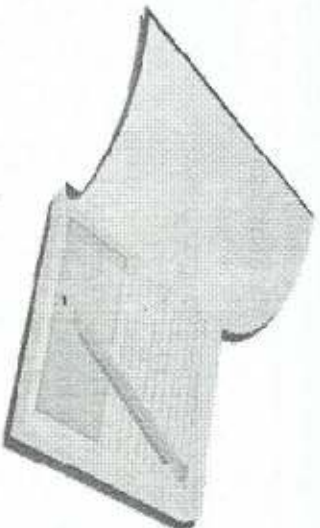
bukan makin membaik, tapi makin rusak dari nafsu "birahi politik" yang selalu mengatasnamakan kepentingan rakyat dan kepentingan konstituen.

Sifat ngotot Golkar tentang dana aspirasi mendapatkan resistensi yang luas dari masyarakat, termasuk partai-partai yang tergabung dengan sekretariat gabungan (setgab). Meski demikian hasrat Golkar tetap ada, hanya sedikit mereda, meskipun tetap terbesit keinginan mereka untuk tetap digolkan usulannya itu. Indikasi itu dapat dibaca dari hasil pidato kenegaraan presiden tanggal 16 agustus 2010 lalu, pidato presiden tidak memberikan ketegasan apakah menolak atau mengakomodasi, tapi bagi Golkar seolah ada isyarat bahwa usulan dana aspirasi itu presiden sepakat.

Usulan Golkar kini berubah wajah, bukan lagi dana aspirasi tapi dana pengembangan infrastruktur untuk setiap daerah pemilihan tanpa menyebut angka setiap orang anggota DPR RI. Bagi saya, usulan Golkar ini tetap tidak dapat dipaksakan, dengan jumlah dapil dan anggota DPR RI separuh berada di Jawa justru akan memperparah ketimpangan pembangunan infrastruktur.

Infrastruktur yang ada di Pulau Jawa sudah relatif baik dibandingkan bagian timur Indonesia, atau provinsi lainnya yang ada di Kalimantan, Maluku, Papua maupun di NTB dan NTT. Lalu apa yang ada dalam pikiran mereka yang tetap ngotot mengusulkan dana atas nama anggota DPR RI? Kita sepatutnya membangun di daerah harus dipercepat dengan menambak transfer, tetapi bukan didasarkan dapil, apalagi mendompleng anggota DPR RI. 

◆◆◆◆◆



Penguasaan Sumberdaya Lokal dan Ketimpangan Distribusi Pemicu Kekerasan

Rasca reformasi tahun 1998 tatanan kehidupan masyarakat mengalami perubahan secara radikal. Reformasi difahami sebagai bentuk kebebasan yang tidak terbatas, semua orang dengan leluasa mengekspresikan pendapatnya yang cenderung destruktif. Fungsi lembaga negara terutama yang menangani masalah hukum dan keamanan seolah tak berdaya diantara kepungan kekerasan yang kerap terjadi. Kekerasan yang terjadi di Tarakan Kalimantan Timur maupun yang terjadi di depan Pengadilan Jakarta Selatan dengan telanjang betapa tak berdayanya aparat hukum.

Dari rekaman media, kelompok pembakar rumah di Tarakan dengan santainya datang membawa senjata tajam, mengangkat drum yang mungkin berisi bahan bakar. Kelompok preman yang beraksi di jalan Ampera Jakarta Selatan pun serupa, bahkan ada yang membawa senjata api semua terjadi di depan polisi berseragam lengkap, tidak ada upaya pencegahan sama sekali.

Lalu kenapa bangsa ini menjadi bangsa yang pemarah? Dugaan saya ada dua penyebab, *pertama* berkaitan dengan masalah-masalah penegakan hukum, dan ketidakadilan, *kedua*

ketimpangan distribusi pendapatan. Persoalan hukum yang ke mencecerai rasa keadilan masyarakat seolah sudah men kelaziman, penegakan hukum menjadi tumpul jika menba ataa, sebaliknya menjadi tajam jika menbas ke bawah. M tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan huk lalu mereka menempuh cara sendiri dengan member kelompok atau memanfaatkan organisasi-organisasi yang men mudah dibentuk berwatak kekerasan.

Dengan tindakan pembelaan diri, atau mencari kead ala mereka dengan melibatkan massa, pencegahan dari ap relatif nihil. Pada saat yang bersamaan kepercayaan terha aparat hukum sangat rendah karena banyak terbelit de masalah internal, seperti makelar kasus. Kondisi itu membuat pemilik modal yang memiliki lahan-lahan kosong di kota besar lebih mempercayakan kepada kelompok preman u menaganya, ketimbang polisi.

Kekerasan tidak berdiri sendiri, tapi saya menduga sel akibat dari ketimpangan distribusi pendapatan, ba merupakan penyebab utama. Desain otonomi daerah dijalankan tidak membuat ketimpangan makin membaik, Ja tetap menjadi tumpuan utama mencari pekerjaan bagi produktif. Idealnya otonomi daerah memberikan kebebasan daerah untuk berkreasi agar kapasitas perekonomiannya n besar, dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja. Tapi semua sulit terwujud, desentralisasi menyuburkan praktik ko dan memelihara perilaku miskin bagi rakyatnya. Dalam k mlskin mereka gampang dipelekhara untuk dijadikan basis r menghadapi Pilkada melalui praktek *money politic*.

Kondisi ini dibiarkan tumbuh subur, karena umu bupati/walikota maupun gubernur tidak akan melepp kekuasaannya dan penguasaan *resources*. Jika periodenya jabatan dialihkan ke istri ataupun anaknya. Proses rekrut pegawai pun penuh dengan kecurangan menggunakan mogok sebagai modal tambahan untuk pembiayaan P Sementara yang tidak punya akses di pusat kekuasaan atau mogok tidak ada, mereka terpinggirkan menjadi pengangg

Tengok saja di daerah manapun, hampir semua PNS memiliki pertalian keluarga dikantor SKPD, apalagi yang direkrut lewat jalur honorer (*data base*).

Dindingkat pusat, pemerintah terlalu sibuk membangun pencitraan, klaim pertumbuhan ekonomi yang terus membaik sekitar 6 persen tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap berkurangnya disparitas distribusi pendapatan masyarakat. Klaim angka kemiskinan terus menurun, meski pun serapan tenaga kerja di sektor formal sangat kecil. Kondisi ini menggambarkan struktur ekonomi mengalami keterlepaan (*decoupling*) antar sektor. Penyebabnya, pertumbuhan ekonomi lebih didominasi dari sektor *non tradable*, seperti telekomunikasi, pertambangan dan keuangan.

Sektor-sektor ini lebih mengandalkan *capital intensive* ketimbang *labor intensive* turut memperparah ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Data makro statistik memang menunjukkan penurunan angka kemiskinan, tapi serapan tenaga kerja sektor formal kecil, berbanding terbalik serapan tenaga kerja sektor informal makin meningkat sekitar 75 persen. Pelaku ekonomi sektor informal merupakan *underground economy* yang tidak tercatat dalam PDB.



Pada sektor keuangan sendiri semakin membaik, arus modal masuk (*capital inflow*) asing ke Indonesia makin besar, tercatat dari awal tahun hingga akhir September, arus modal asing yang masuk mencapai Rp 115 triliun. Membaiknya sektor ini bukan sesuatu yang mengembirakan, sebab termasuk kategori *hot money* yang bersifat jangka pendek, setiap saat mudah terbang (*capital flight*) jika kondisi dalam negeri kurang mendukung.

Kondisi ini pun sudah diingatkann oleh lembaga

keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia agar modal yang besar harus diwaspadai, risikonya dapat meledak untuk melakukan intervensi. Selain itu menguntungkan kelompok kecil masyarakat yang memamkaya. Situasi seperti ini makin memperburuk pendapatan, lapangan kerja terbatas sehingga pengangguran terdidik terus tumbuh.

Menengok kembali masalah kerusakan, umumnya ini termasuk kategori usia produktif, bahkan usia remaja aktifnya nongkrong di ujung gang atau perempatan sampai sore, *sabang* hari, karena tidak ada pekerjaan. Kerumunan-kerumunan seperti ini sangat mudah dipicu jika dalam kondisi tidak sadar pengaruh dari minuman sebagai mana pemicu awal kekerasan yang terjadi di selain akumulasi berbagai persoalan terutama masalah etika dan sosial politik makin hari mereka terpinggirkan dari kekuasaan.

Gejala merajalelanya preman dan gelandangan tumbuh dari sifat penalas, tapi makin sulitnya mencari pekerjaan. Selain itu para pemilik modal dan pengusaha cenderung memang memelihara mereka, kecenderungan ini membuat mereka terbiasa hidup enak, tinggal menunggu dari yang menguasai *resources* lokal. Fenomena derdudukan terhadap tokoh lokal atau bupati/walikota gubernur yang tersangkut dengan masalah hukum dapat dengan jelas. Ada banyak bupati/walikota kendati sudah melakukan korupsi (menggerogoti APBD) masih mendapatkan dukungan dan pembelaan secara membabi buta dari masyarakat jadi peliharaan mereka. Tipikal pemimpin sebenarnya masih dapat memenangkan Pilkada, karena modal (uang) besar sebagian dari hasil korupsi memobilisasi massa.

Yakin saja, orang yang memiliki pekerjaan setidaknya penghasilan bulanan niscaya tidak akan mau leha nongkrong setiap hari di ujung gang atau jadi preman diperalat menjaga kepentingan "raja-raja kecil" di daerah

mereduksi kekerasan massif, serta pemberantasan preman juga tidak bisa diselesaikan oleh kepolisian sendiri, harus ada sinergi kebijakan dari pemerintahan secara keseluruhan.

Pemerintah tidak hanya sekedar membuat program instan seperti PNPM Mandiri, Bantuan Langsung Tunai dan sejenisnya. Tapi sektor ril harus dihele dengan kencang, terutama industri yang mengandalkan *labor intensive*. Sementara itu pemerintah daerah harus lebih serius mensejahterakan masyarakatnya dengan membuat program yang dapat menggerakkan mesin ekonomi daerah yang memberikan dampak terhadap serapan tenaga kerja. 



Pola Penganggaran dan Kebijakan Korupif

A nggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*) sudah menjadi tuntutan diterapkan dalam penyusunan APBN/APBD. Sistem penganggaran seperti ini diharapkan menciptakan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan uang rakyat, sebab semua uang yang keluar berdasarkan program kerja yang ada, atau menghindari kebiasaan buruk diakhir tahun anggaran membuat berbagai macam program “siluman” untuk menghabiskan anggaran yang ada, tanpa melihat dan mengukur *outcome*.

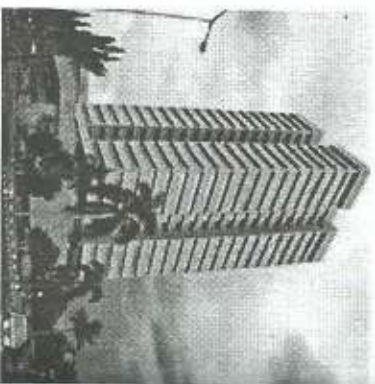
Anggaran berbasis kinerja juga menuntut perlunya program-program yang terukur, bukan sekedar menuai output tanpa ada indikator target. Namun anggaran berbasis kinerja ini belum berjalan optimal disemua tingkatan pemerintahan, juga seharusnya anggaran diprioritaskan untuk keperluan yang mendasak dan memberikan dampak langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Terkait dengan itu, nampak prioritas anggaran untuk APBN-P 2010 masih jauh dari aspek anggaran berbasis kinerja, DPR yang memiliki hak *budgeting* dengan seakanya membuat program dan penganggaran untuk membangun kantor DPR RI dengan anggaran Rp. 1,8 triliun. Anggaran jumbo ini didasarkan pada alasan bahwa gedung DPR RI sudah mengalami kerusakan, dan gedung yang berlantai 24 sudah miring sekitar 7 derajat.

Kendati Kementerian PU membantah tidak pernah merekomendasikan gedung DPR RI mengalami kemiringan, hanya perlu perbaikan dan rehabilitasi, tapi tidak total.

Kewenangan DPR RI yang begitu besar dalam hal *budgeting* membuka celah praktek kolusif dan koruptif, hal ini bisa dilihat dengan pengesahan APBN-P 2010 selain merencanakan pembangunan kantor baru juga munculnya program-program yang tidak nyata dan jelas tapi anggarannya cukup lumayan besar, dengan kata lain anggaran tersedia tapi program belum tersusun dengan baik. Bahkan ada anggaran yang dialokasikan ke DPR RI, hal ini diperkuat dari pimpinan badan anggaran sendiri mengakui kalau memang ada jatah Rp. 110 miliar untuk DPR akhirnya dibagi rata setiap komisi karena bingung dialokasikan kemana? Cara penganggaran seperti itu jelas sangat bertentangan dengan prinsip anggaran berbasis kinerja yang didengung-dengungkan, bahkan menjadi tuntutan DPR ke pemerintah.

Idealnya, bahkan harus ketika disahkan, APBN sudah memuat perincian program. Itu merupakan keharusan untuk mencegah penyalundupan program-program siluman yang tidak jelas, masuk ke dalam APBNP. Pengesahan APBN-P 2010 tanpa program merupakan sebuah langkah legalisasi yang tidak lazim dan melanggar kepatutan. DPR dan pemerintah bisa saja beralasan bahwa program-program terperinci akan disusulkan dan dibahas kembali dengan DPR.



Namun justru disitulah letak masalahnya, dengan mengusulkan program secara tersendiri, terbuka luas kesempatan berlangsungnya praktik mafia anggaran. Program-program siluman akan masuk dengan mudah, tanpa sasaran yang jelas. Proyek-proyek tiupan anggota dewan pun akan leluasa diakomodasi, maka dapat diduga kemudian akan memancing

datangnya para mafioso anggaran yang memang bertanggung jawab di Kementerian dan DPR.

Pesan yang dapat ditangkap disini, keinginan untuk membangun kantor yang lebih mewah dan mengesal anggaran yang belum jelas programnya menunjukkan hal yang membingungkan kebutuhan anggota dewan dikedepakan ketimbang kebutuhan dasar masyarakat. Apapun kebutuhan mereka seolah tidak ada yang tidak bisa, namun bila menyangkut rakyat banyak alasan klise yang selalu disampaikan anggaran tidak cukup bahkan tidak ada.

Secara sarkastik boleh dibilang bila otak sudah rusak kotor, serta syahwat politik yang besar dan kerakusakan yang menyelinap dalam tubuh, yang normal pun dianggap tak wajar yang tegak dan kokoh dianggap miring, yang bersih dihadirkan mata dapat dikelabui menjadi kotor. Keadaan itu seolah menjadi bagian besar wakil rakyat, pengembangan amanah rakyat justru menjadi sarang "penyamung", ini bukan ungkapan halusinasi karena sudah puluhan anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah ditangkap tersandung hukum, dan sepertinya tidak akan berhenti karena masih terus berulang.

Anggaran jumbo yang disahkan DPR dalam APBN-P untuk pembangunan gedung baru DPR RI sekalipun itu berubah angkanya tetap sulit diterima masyarakat. Angka ditengarai lebih besar ketimbang untuk anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) yang hanya senilai Rp 1,3 triliun untuk 810.000 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Padahal, dengan anggaran Rp 1,8 triliun anggaran ini bisa mengcover 1,1 juta triliun RTSM, dibandingkan Gedung DPR yang hanya dinikmati 560 anggota DPR.



Anggota DPR sepatutnya menjadi ujung tombak mempolopori pemangkasan biaya perjalanan dinas ke luar negeri bagi eksekutif karena kecenderungannya biaya ini meningkat setiap tahun, namun harapan itu terlalu ideal bagi orang banyak karena biaya perjalanan dinas untuk DPR RI juga terus meningkat, akhirnya yang terjadi simbiosis mutualisme, kedua belah pihak punya kepentingan yang sama yang mengabaikan hak dasar rakyat.

Sementara bila dibandingkan dengan keadaan di sektor pendidikan sangat memprihatinkan, justru seharusnya diperjuangkan secara maksimal bagi DPR RI. ICW mengutip data statistik per sekolah yang dimiliki Kementerian Pendidikan Nasional. Kerusakan gedung sekolah itu mulai dari gedung Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Umum. Berdasarkan data tahun 2007/2008 terdapat gedung Sekolah Dasar sebanyak 139,461 yang rusak, meliputi 72.471 rusak ringan dan 66.990 rusak berat. Bahkan ada sekolah dasar di Banten sangat tidak layak dijadikan sebagai ruang kelas, dinding yang digunakan terbuat dari anyaman bambu, kayu penopangnya sudah mulai miring.

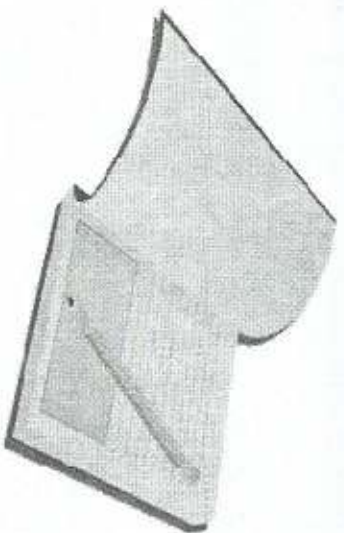
Sementara untuk gedung Sekolah Menengah Pertama, terdapat 16.360 gedung yang rusak, 4.731 rusak ringan, dan 11.629 rusak berat. Sementara itu juga terdapat 5.693 gedung SMU yang rusak, dengan rincian 4.151 rusak ringan dan 1.542 rusak berat. Dari data statistik itu, diketahui banyak gedung sekolah yang tidak layak lagi digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Kendati data ini berasal dari statistik 2007/2008, namun lima tahun terakhir perubahannya tidak terlalu signifikan. Sekolah yang rusak, terutama dipelosok masih banyak meskipun anggaran pendidikan setiap tahun meningkat. Dengan demikian ada kemungkinan alokasi biaya perbaikan sekolah, khususnya di daerah yang jauh dari pantauan banyak pihak kurang dioptimalkan.

Jika ditengok kembali jumlah anggaran Rp. 1,8 triliun yang rencana akan digunakan untuk pembangunan gedung DPR RI ekuivalen dengan gedung sekolah 12 ribu gedung baru. Tapi sulit

rasanya kita berharap banyak dari anggota dewan dengan sistem penganggaran yang cenderung korup untuk memikirkan secara sungguh-sungguh perbaikan sektor pendidikan.

Modus penganggaran setiap tahun, terutama anggaran perubahan kecenderungannya masih berperilaku pemburu rente. Harapan untuk menjalankan anggaran berbasis kinerja masih jauh dari ideal, terutama diprioritaskan pada sektor-sektor dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sesungguhnya dana sebesar itu (triliunan) jika dialokasikan ke sektor pendidikan akan mencerdaskan puluhan ribu generasi penerus bangsa. Tidak menutup kemungkinan, sebagian dari mereka kelak akan ber Kantor di "gedung miring" dengan pikiran yang tegak dan lindak yang lurus. Berbeda jauh dengan pendahulunya yang berada di gedung "miring" hanya lebih mementingkan kebutuhannya. ■





Politik Berwajah Ganda Dalam Kebijakan Ekonomi

U APBN 2013 dilakukan perubahan dengan cepat sebagai dampak dari perkembangan perekonomian global dan ekonomi domestik. Setidaknya yang saya cermati UU APBN yang paling cepat diubah adalah UU APBN 2013 dan UU APBN 2008 menjadi APBN-P. Paling signifikan mendorong perubahan UU APBN karena rencana penyesuaian harga BBM, serta melesetnya berbagai indikator makro ekonomi. Fluktuasi harga minyak mentah dunia, serta Indonesia sebagai negara *net import* dan target *lifthing* minyak tidak pernah tercapai, maka kondisi ini seolah memaksa parlemen menyetujui memberikan mandat kepada pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM dalam UU APBN 2013, artinya tidak ada fraksi yang mempersoalkan substansi penyesuaian harga BBM.

Perkembangan perekonomian global yang masih lesu, mengakibatkan permintaan untuk ekspor belum menanjak. Apalagi kelas menengah Indonesia bertumbuh pesat, usia produktif begitu besar mengakibatkan permintaan domestik meningkat, termasuk konsumsi barang otomotif. Pertumbuhan industri otomotif tahun 2013 diperkirakan sebesar 7,5 % atau setara 1,2 juta unit kendaraan, pertumbuhan industri otomotif juga dipengaruhi makin berkembangnya model pembiayaan dan ini berdampak terhadap konsumsi BBM. Pada akhirnya kebijakan

pembatasan kuota BBM selamanya tidak akan efektif, demikian juga efisiensi penggunaan BBM tidak mudah dilakukan.

Tidak sedikit hasil studi empiris yang menunjukkan bahwa konsumsi BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Mereka pemilik kendaraan, terutama pemilik mobil paling boros membeli BBM. Memang tidak dapat dinafikan bahwa kenaikan harga BBM akan menciptakan *shock* ekonomi, karena ada inflasi, namun itu bersifat jangka pendek. Jangka menengah dan panjang trend *recovery* ekonomi akan menanjak sepanjang diikuti kebijakan afirmatif yang memadai untuk menjaga kemampuan daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, kebijakan menaikkan harga BBM tidak terlalu relevan mengaitkan dengan persoalan idiologi kapitalisme global, apalagi tekanan pihak asing. Subsidi merupakan keharusan dijalankan negara, akan tetapi harus diberikan kepada mereka yang kurang mampu. Menolak kenaikan harga BBM justru mempertahankan mentalitas orang miskin, lebih membela kepentingan orang yang paling banyak mengkonsumsi energi. Pertanyaannya, siapa yang paling banyak mengkonsumsi energi?

Kebijakan menaikkan harga BBM merupakan persoalan ekonomi, akan tetapi dibalik kebijakan itu biasanya memang terselip agenda politik. Partai penguasa secara umum akan selalu cermat menghitung kalkulasi politik sebelum melakukan penyesuaian harga BBM. Di lain sisi, kebijakan yang tidak populis dapat dimanfaatkan



bagi partai tertentu dengan menolak kenaikan harga BBM. Namun dapat pula menjadi senjata pamungkas, kenaikan harga BBM dibarengi dengan pemberian kompensasi pada tahun 2008, dana kompensasi tersebut menjadi alat kampanye efektif seolah-olah pemerintah seperti Robinhood, datang membagi-bagikan uang

bagi kaum papa. Setelahnya, tahun 2009 menjelang Pemilu, harga BBM kembali diturunkan sehingga menjadi kebijakan nampak populis.

Pro kontra kenaikan harga BBM sebuah keniscayaan, tapi sejatinya sangat lebih berarti dan dihargai jika sekiranya partai yang menolak konsisten (*istiqomah*). Salah satu partai yang mempertontonkan "akrobat inkonsistensi" adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai dakwah ini merupakan salah satu partai yang bergabung dalam sekretariat gabungan (setgab). Selain itu ada tiga menteri kader PKS dalam kabinet saat ini mereka adalah bagian dari pemerintahan, sementara di parlemen, maupun sikap politik secara organisatoris berbeda sama sekali dengan mereka yang ada di kabinet.

Sikap politik yang berbeda dalam satu organisasi hal semacam ini kurang tepat dianggap sebagai gejala demokrasi yang sehat. Akan tetapi lebih tepat disebut sikap inkonsisten, karena itu wajar jika pimpinan fraksi partai penopang utama pemerintah menyebut PKS munafik. Sebagai partai yang berbasis keagamaan selayaknya bukan dengan sikap berwajah ganda, lebih elok PKS menjadi bagian oposisi, keluar dari koalisi. Sikap berwajah ganda justru tidak mendidik umat (masyarakat), di pemerintahan mereka bagian dari pengambil kebijakan dan setuju kenaikan harga BBM akan tetapi di luar menyebar spanduk melakukan penolakan. Namun terkadang memang di dalam politik adigium ---lain di hati lain di bibir--- menjadi kebiasaan dan seolah bukan pelanggaran fatsoen politik.

Sikap berwajah ganda dengan berbagai argumentasi pembenaran boleh jadi diterima beberapa pihak, akan tetapi banyak pihak juga memandang sinis bahwa praktik politik yang demikian sungguh tidak *gentle*. Apalagi diengarai penolakan PKS yang dikenal sebagai partai dengan slogan ---bersih, peduli dan profesional--- lebih sebagai upaya perbaikan citra, di tengah keterpurukan karena pucuk pimpinan partai tersandung kasus korupsi yang berkaitan dengan kementerian yang dipimpin oleh kader PKS pula.

Pada hemat saya argumentasi Presiden PKS Anis Matta menyebutkan, bahwa PKS tetap akan menolak kenaikan harga BBM, jika kader PKS yang ada di kabinet mendukung kenaikan harga BBM wajar karena mereka bawahan presiden SB) merupakan ungkapan *split personality*, organ (jiwa) yang labil. Di luar mereka menantang kementerian ekonomi berdebat tentang kalkulasi subsidi BBM, tapi di dalam (di kabinet maupun di setgab) publik tidak paham apakah PKS menantang?.

Alangkah lebih terhormat, serta mengajarkan nilai-nilai religiusitas bilamana PKS tidak lagi berada di barisan pemerintahan. Publik malah curiga, jika sikap berwajah ganda tetap dipertahankan, mereka enggan keluar dari kabinet karena takut kehilangan sumber pembiayaan "siluman". Kasus impor daging sapi salah satu rujukan yang paling terang, hubungan informal antara pimpinan partai, pengusaha culas, kementerian *unprofessional* dan mafia bertemu kepentingan burbu rente. Jika tidak terungkap para gerombolan pemburu rente itu akan mendapatkan *gain* yang besar, tidak menutup kemungkinan hasil perburuan rente mereka masuk ke kas partai.

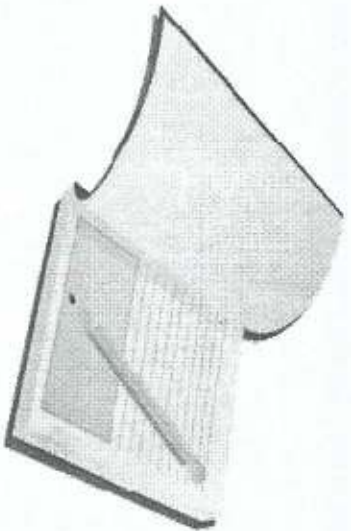
Maka dari itu, saya menduga bahwa partai ingin menjadi bagian koalisi dengan menempatkan kader-kadernya C kementerian sebab disana ada sumber "mata air" yang terus mengalir. Walau menteri yang berasal dari kader partai tidak (belum) terlibat langsung kasus korupsi, namun setidaknya (dapatnya) dibaca bahwa menjadi bagian pemerintahan sangat signifikan mendukung sumber pembiayaan partai politik.

Lebih penting dari itu, PKS sebaiknya tidak membangun argumentasi yang ambigu (kontradiktif), tidak akan keluar dari koalisi pemerintahan, akan tetapi apabila dikeluarkan siap ja oposisi. Saya menafsirkan argumentasi ini, jika dikeluarkan dari koalisi bukan karena "siap", lebih tepat dimaknai sebagai "terpaksa" jadi oposisi. Jika siap jadi oposisi tidak perlu menunggu dikeluarkan, lebih baik mengikuti sikap PDIP sejak awal *istiqomah* menjadi oposisi kendati diberbagai kesempatan a tawaran bergabung dengan pemerintahan.

Apalagi PKS sejak awal merasa tidak dilibatkan dalam rapat setgab, jadi untuk apalagi mempertahankan “mahligai koalisi” jika merasa disepelekan oleh partai-partai pendukung pemerintah, sembari ber-*ijab kubil* dengan partai yang ada di luar pemerintahan untuk memperkuat barisan oposisi yang sesungguhnya. Bukan gertakan atau sekedar basa-basi untuk memperkuat daya tawar posisi, kemungkinan saya dan banyak orang tetap bersimpati terhadap PKS jika sikap *istiqomah* menjadi karakter partai berbasis agama ini, tapi apakah PKS berani keluar dari koalisi? Yakinlah tidak akan, paling mereka mengatakan, berada dalam koalisi sampai akhir pemerintahan 2014. Keluar dari koalisi sama halnya menghilangkan sumber daya untuk penopang pembiayaan politik dalam menggerakkan mesin partai. ■



BAGIAN KETIGA: BEBERAPA KEBIJAKAN EKONOMI KONTEMPORER



Kebijakan Redenominasi Rupiah, Apa Dampaknya Terhadap Perekonomian?

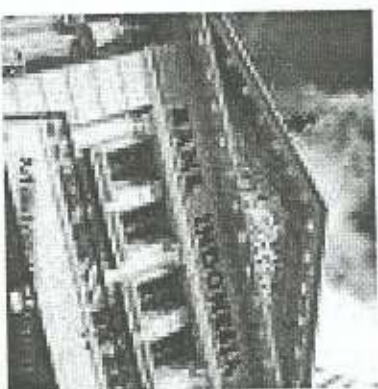


elum sebulan Darmiin Nasution menduduki jabatan Gubernur Bank Indonesia, sudah melakukan "gebrakan". Diawal kepemimpinannya, Bank Indonesia (BI) akan melakukan redenominasi mata uang rupiah. Meskipun kajian redenominasi ini sudah lama dilakukan oleh BI, jauh sebelum Darmiin Nasution masuk BI. Terminologi redenominasi terasa kaku buat lidah orang Indonesia yang terbiasa makan nasi, tapi bahasa gampangannya, yaitu menyederhanakan pecahan uang rupiah atau mengurangi angka nolnya sebanyak tiga digit (000), tanpa mengurangi nilainya. Kalau mengurangi nilainya berarti *sanering*. Praktik *sanering*, nilai tukar dikurangi sehingga dapat membuat masyarakat menjadi miskin. Tapi redenominasi dalam implementasinya bisa saja terjadi *sanering* jika pemahaman masyarakat tidak utuh.

Lalu apa alasannya BI melakukan redenominasi? Berdasarkan kajian BI, bahwa idealnya mata uang rupiah dihilangkan tiga angka nol. Ini didasarkan pada kondisi, jumlah angka rupiah dianggap terlalu besar, hanya kalah dengan mata uang Vietnam (Dong). Satu lembar Dong sebesar 500.000. Angka rupiah yang banyak dianggap merepotkan untuk melakukan transaksi. Selain itu dari aspek keamanan dimana nominal rupiah

seperti saat ini, dengan membawa sejumlah uang puluhan juta, rasa aman sangat terganggu. Atau setidaknya akan merepotkan bagi yang mencairkan, atau yang hendak menyeter uang di bank dengan jumlah puluhan juta.

Apalagi dengan jumlah miliaran, memerlukan tas atau koper yang dapat memancing perampokan. Akan lain halnya jika rupiah sudah diredenominasi, nominalnya besar akan tetapi membawanya relatif mudah. Dari sisi pencatatan akuntansi keuangan, juga merepotkan karena akan menulis jumlah angka (nol) yang berderet-deret cukup panjang. Konsep ini ideal, yang digulirkan oleh Bank Indonesia, sangat positif untuk melakukan transaksi.



Indonesia pernah melakukan redenominasi rupiah pada zaman orde lama, Gubernur Bank Indonesia masa itu Syafrudin Prawiranegara. Implikasi yang ditimbulkan dari kebijakan ini melonjaknya inflasi, selain diakibatkan dengan praktik BI melakukan pencetakan uang. Juga ada kecenderungan masyarakat enggan memegang uang cash, lebih memilih barang. Dampaknya, harga-harga barang melonjak tajam. Pengalaman ini pula yang pernah dialami oleh Zimbabwe. Hyperinflasi terjadi, harga perpotong hamburger bisa mencapai jutaan dolar Zimbabwe. Para pengusaha semestinya menerapkan sesuai praktik redenominasi, akan tetapi justru harga barang Rp. 1.000 persatuan pecahan lama, semestinya menjadi Rp. 1,- persatuan pecahan baru. Justru ia menetapkan harga Rp. 1,- persatuan pada pecahan baru. Kondisi ini sangat mungkin juga terjadi di Indonesia jika sosialisasi dan aturan kedisiplinan untuk melakukan redenominasi tidak dijalankan dengan ketat.

Kedepan jika redenominasi ini berjalan, dalam jangka pendek akan tetap mempengaruhi kondisi inflasi yang diakibatkan dari efek ekspektasi. Masyarakat kebanyakan

memberikan ekspektasi atau apresiasi yang cenderung negatif, karena mereka akan memahami nilai nominal uang akan menurun atau dikurangi (*saneering*). Mereka beranggapan bahwa uang yang jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian dipangkas tiga nolnya (000) menjadi angka 1.000, sementara uang Rp. 1.000, berubah menjadi Rp. 1,-. Juga dalam jangka pendek berdampak terhadap investasi, dengan pemahaman yang hampir sama, nilai asset akan menurun yang dimiliki oleh investor. Selain juga kemungkinan *rational expectation* muncul, masyarakat yang rasional akan mengantisipasi terjadinya inflasi berupa tindakan pengurangan jumlah uang yang mereka pegang dalam membelanjakan kedalaman bentuk barang riil.

Mengurangi angka dalam jumlah rupiah, tidak berarti kerepotan akan tereduksi dengan sendirinya, jika bentuk materi uang tetap sama, misalnya uang pecahan Rp. 100.000,- akan menjadi Rp. 100,- artinya bentuk uangnya tetap sama yakni satu lembar, yang dikurangi cuma angkanya saja. Terkecuali redenominasi dilakukan atau mencetak uang dengan pecahan nominal yang lebih besar, misalnya satu lembar nilai nominalnya menjadi Rp.500,-/lembar.

Pemahaman orang BI dan masyarakat tentu sangat jauh berbeda. Karena itu butuh waktu jangka panjang melakukan sosialisasi, tanpa sosialisasi dengan baik juga akan mengacaukan sistem transaksi bagi masyarakat. Harga barang yang tadinya Rp. 1.000.000, kemudian dalam transaksi akan mendapatkan uang dalam bentuk Rp. 1.000, meskipun itu nilai tetap sebesar satu juta, akan mempengaruhi persepsi mereka. Belum lagi transaksi dalam bentuk valas jelas merepotkan masyarakat, apalagi jika nilai tukar tidak stabil dan kecenderungan inflasi untuk terkerek ke atas.

Pasti juga akan muncul pertanyaan, kalau Rp. 1.000,- dipotong nolnya tiga tinggal menjadi dalam bentuk pecahan baru sebesar Rp. 1,-. Bagaimana kalau harga barang itu Rp. 250,- pecahan lama? Ini berarti Bank Indonesia kemungkinan akan menerbitkan lagi uang dalam bentuk *seri* seperti zaman revolusi, karena sudah barang tentu tidak semua barang harganya bulat-bulat Rp. 1.000,-. Juga syarat sebuah negara untuk melakukan redenominasi mata uangnya paling tidak tingkat inflasi yang

rendah, ekonomi dalam kondisi *steady state* dan dukungan politik yang kuat. Masalah inflasi memang masih terjaga di bawah dua digit, tapi belum dapat dijadikan sebagai patokan bahwa perekonomian kita sudah tangguh. Daya beli masyarakat masih cenderung terus menurun, seiring dengan makin melambungnya harga-harga bahan pokok.

Turki dan Rumania mungkin termasuk negara yang relatif sukses melakukan redenominasi mata uang, iipun dilakukan dalam waktu yang panjang. Dari segi konsep sangat baik, akan tetapi dibutuhkan waktu yang lama dan sosialisasi yang memadai. Sebab Indonesia (pemerintah) sangat cekatan mengaggas dan mengambil kebijakan, tapi dari aspek implementasi sangat amburadul. Apalagi pengawasan, munculnya kasus mega skandal Bank Century atau praktik perbankan yang nakal tidak terlepas dari kelemahan BI. Berarti dari sisi urgensi redenominasi, belum terlalu mendesak, sebab banyak pekerjaan BI yang harus dituntaskan.

Kebijakan redenominasi ini juga tidak memberikan dampak apa-apa terhadap perekonomian nasional. Meskipun dalam pencatatan akuntansi lebih praktis dan mudah, sebab akan memangkas angka-angka. (Mungkin) jauh lebih penting bagaimana mengoptimalkan peran BI untuk menggerakkan sektor riil. Data BPS menunjukkan secara jelas pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua 2010 mengalami peningkatan dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya (*year on year*) sebesar 6,2 persen. Besaran pertumbuhan yang dicapai pada kuartal kedua itu, tiga sektor mengalami pertumbuhan cukup tinggi, yakni sektor pengangkutan dan komunikasi (12,9 persen), sektor listrik, gas dan air bersih (9,6 persen), dan sektor jasa-jasa (7,2 persen).

Sementara sektor primer yang paling banyak menyerap tenaga kerja, seperti sektor pertanian hanya tumbuh sebesar 3,3 persen dan sektor industri dan manufaktur sebesar 2,0. Lalu apa urgensinya redenominasi rupiah yang dicanangkan oleh BI? Ekonomi kita seolah sudah tangguh, hebat sehingga redenominasi segera perlu dilakukan. ■





Perubahan Peraturan Bank Indonesia: Kemungkinan Dampaknya

Apakah kartu kredit itu "malaikat" atau "hantu"? Kartu kredit manakalah kita menggunakan dengan bijak dapat menjadi dewa penyelamat, menjelma menjadi malaikat karena dapat membantu melakukan transaksi apa yang dibutuhkan oleh penggunaannya. Selain itu kartu kredit relatif simpel dibandingkan dengan membawa uang tunai, tidak jarang pula pemegang kartu kredit mendapatkan akses kemudahan serta potongan untuk transaksi di pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Meski demikian secara psikologis, hasrat melakukan konsumsi selalu muncul manakalah seseorang memiliki kartu kredit, tawaran dan *sale off* barang-barang tertentu seolah tak ada hentinya datang menggoda bak "setan" yang memang kerjanya menggoda manusia (paca; konsumen).

Namun bila hasrat belanja terus datang dengan mengandalkan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) perlahan ia akan menjadi "hantu", tanpa terasa pemakaian kartu kredit tagihannya membengkak, sementara penghasilan cenderung tidak meningkat. Akibatnya, pembayaran tagihan penggunaan setiap bulannya justru membebani keuangan

keluarga, bunga akan berbunga pada saat jatuh tempo bilamana belum dilakukan pembayaran minimum setiap bulannya.

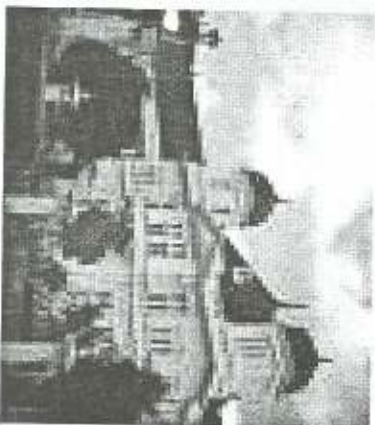
Bila kondisi itu terjadi, seperti selama ini pemegang kartu kredit harus siap-siap berhadapan dengan *debt collector*, maka kemungkinan setiap bulannya akan menghantui nasabah. Ada banyak nasabah yang masuk rumah sakit atau bahkan merenggang nyawa di tangan *debt collector*, massifnya pemberian kartu kredit kepada masyarakat mendorong tumbuhnya industri jasa penagihan (*debt collector*). Masalahnya para *debt collector* ini lebih mengedepankan "otot" ketimbang "otak", setiap saat tanpa mengenal waktu datang menagih dan menyorot nasabah sampai nasabah yang bersangkutan membayar tagihan.

Atas dasar itu, revisi Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai APMK dengan mengatur waktu penagihan dan melarang menggunakan *debt collector* di luar karyawan bank, walaupun menggunakan tenaga alih daya, bank tidak boleh lepas tangan manakala ada masalah. Aturan ini patut diberikan apresiasi, karena itu BI harus menjalankan "*extra function*" mengatur secara teknis hal yang demikian yang bertujuan untuk melindungi nasabah bank. Bank jangan hanya ingin memprioritaskan pencapaian tujuan internalnya semata, yaitu meningkatkan laba sebanyak-banyaknya, tanpa memikirkan kondisi nasabah.

Selama ini perbankan selalu memegang "frame" yang baku untuk memberikan kredit kepada nasabah, baik perorangan maupun badan usaha dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*). Tapi sepertinya untuk pemberian kartu kredit yang akan digunakan sebagai APMK cenderung longgar, seolah syarat minimum baik dari usia maupun penghasilan seseorang tidak dijadikan rujukan. Para sales yang umumnya karyawan *outsourcing* perbankan ditebar di pusat-pusat perbelanjaan menawarkan menjadi member dengan persyaratan yang begitu mudah kepada setiap pengunjung pusat perbelanjaan.

Selama lima tahun jumlah kartu kredit terus bertambah, posisi Per tahun 2006 jumlah kartu kredit tercatat 8,3 juta kartu

dan akhir tahun 2011 jumlah kartu kredit mencapai 14,7 juta kartu, atau naik rata-rata 12 persen pertahun, dan diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi tahun ini. Nilai transaksi melalui kartu kredit tersebut mencapai Rp. 180 triliun per bulan. Potensi ini tentu saja menggiatkan industri perbankan, karena itu penawaran kartu kredit tidak terbatas penawarannya ke individu-individu semata, ada banyak varian kerjasama dengan produsen atau provider jasa menjadi sasaran.



Meski demikian bisnis jasa perbankan ini bukan tanpa resiko, bahkan pihak perbankan kerap mengklaim sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau penggunaan kartu kredit, tapi nyatanya rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) kartu kredit per 2012 mencapai Rp 1,52 triliun. Bank asing mencatat NPL terbesar hingga Rp 726 miliar, bank milik pemerintah atau bank persero mencatat NPL kartu kredit sebesar Rp 147 miliar, kemudian bank campuran sebanyak Rp 215 miliar.

Sedangkan bank umum swasta nasional (BUSN) tercatat Rp 432 miliar khusus NPL kartu kreditnya (Statistik Perbankan, 2012). Sementara NPL atau presentase nilai tagihan kartu kredit yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet mencapai 4,26 persen, angka ini lebih tinggi dibandingkan NPL rata-rata perbankan di 2,55% tahun lalu.

Tingginya NPL dapat menjadi resiko bisnis industri perbankan, sekaligus dapat menggerogoti "kesehatan" bank yang berimplikasi pada perekonomian nasional. Oleh karena itu BI selaku otoritas moneter perlu melakukan penataan dan aturan untuk menjaga perbankan tetap sehat, selain memberikan kenyamanan bagi nasabah (masyarakat). Menurut hemat saya,

Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK perlu diapresiasi bagi masyarakat maupun pihak perbankan sendiri, sebab PBI mengandung unsur edukasi di dalamnya bagi masyarakat.

Secara ringkas kisi-kisi APMK menjelaskan batas usia minimum 21 tahun dan batas minimum penghasilan Rp. 3 juta. Nasabah yang mendapatkan per bulannya antara Rp 3 sampai Rp 10 juta rupiah hanya diberikan plafon pinjaman tiga kali besar pendapatannya dan hanya diperbolehkan memiliki kartu kredit maksimal dari dua penerbit. Kemudian Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP, isinya antara lain membatasi denda keterlambatan pembayaran tagihan kartu kredit maksimal 3 persen dari total tagihan.

Peraturan ini tentu akan mendapatkan resistensi, melidaknya ada dua pihak yang saya catat mempertanyakan, bahkan merasa keberatan PBI tersebut, misalnya manajer Asosiasi Penerbit Kartu Kredit Indonesia (AKKI) mempertanyakan alasan mendasar membatasi jumlah kartu kredit bagi individu yang berpenghasilan Rp. 3 juta - Rp. 10 juta hanya dibolehkan memiliki dua kartu kredit. Menurut pihak AKKI hanya di Indonesia dibatasi seseorang memiliki kartu kredit dengan penghasilan tertentu, di negara lain tidak, seperti Malaysia dan Singapura (Detik Finance, 19/6/2012).

Selain AKKI, Ketua Perbanas pun keberatan dengan adanya pembatasan bunga kredit paling tinggi sebesar 3 persen perbulan karena menganggap bahwa dengan adanya pengetatan pemberian kartu kredit pihak perbankan akan makin selektif memberikan kartu kredit, karena itu bunga kredit tidak perlu dibatasi. Keberatan ini dapat dimaklumi, karena PBI tersebut akan memberikan efek pada penurunan profitabilitas perbankan. Namun demikian, pihak perbankan atau yang terkait langsung dengan produsen jasa perbankan selayaknya tidak hanya memikirkan profitabilitas semata.

Terbitnya PBI saya meyakini memberikan motivasi bagi masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya, dilain sisi

mendorong perbankan untuk menciptakan differensiasi produk layanan maupun bentuk penyaluran kredit lainnya selain kredit konsumsi. Karena memang sejatinya perbankan tidak hanya mengandalkan kredit konsumsi akan tetapi kredit investasi terutama pembangunan infrastruktur perlu terus didorong untuk meningkatkan profitabilitas bank, dan pada saat yang bersamaan akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang berdampak terhadap pendapatan masyarakat, dan siklusnya pihak perbankan akan mendapatkan *gain* dari mata rantai kegiatan perekonomian, sekalipun bersifat *long run*. Kenyataan itu harus dijalani perbankan, sebab bank juga memiliki misi dan fungsi "sosial" mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang, bukan berperilaku "*rents seekers*" dalam jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama bertahun-tahun lebih didominasi oleh konsumsi dibandingkan dengan sumber pertumbuhan lainnya seperti, investasi, ekspor dan sektoral, padahal sumber-sumber pertumbuhan tersebut memiliki dampak ekonomi luas. 



Kebijakan Privatisasi BUMN: Kasus Krakatau Steel

 enengok sejarah pembentukan BUMN, sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Setelah merdeka, jawatan perusahaan yang didirikan Belanda semua dinasionalisasi. BUMN dibentuk oleh pemerintah karena dianggap swasta belum mampu mengembangkan usaha, terutama pengadaan kebutuhan masyarakat. Badan usaha yang dibentuk kecenderungannya melakukan praktek monopoli alamiah. Diasumsikan dengan praktek monopoli alamiah akan berproduksi secara efisien, selain BUMN itu sendiri didirikan dengan dua tujuan utama, yakni untuk mendatangkan profit dan membawa misi sosial.

Karena itu korporasi (badan usaha) yang berbentuk BUMN meskipun berperilaku monopoli tidak boleh semata mendatangkan profit, tapi kewajiban negara lewat BUMN mengembangkan misi sosial untuk menyediakan barang publik (*provision of public goods*), sekaligus dapat mengatasi kegagalan pasar.

Meskipun pada akhirnya banyak badan usaha yang dikelola pemerintah gagal mengemban kedua misi itu, justru memberikan keuangan negara, melalui subsidi karena memproduksi tidak efisien. Kerugian yang dialami oleh badan usaha menjadi beban pemerintah, kondisi ini jauh sebelumnya

sudah diingatkan oleh penganut ajaran ekonomi klasik maupun neo-klasik, seharusnya memang pemerintah tidak perlu ikut campur dalam kegiatan ekonomi, semua dilepaskan ke mekanisme pasar. Potensi konflik interest juga tinggi, sebab pemerintah berperan ganda sekaligus, regulator dan operator.

Kinerja BUMN yang buruk juga turut diperparah karena badan usaha ini di bawah "ketiak" departemen atau lembaga tinggi negara, pengelolannya harus didasarkan pada selera "punggawa" departemen. Intervensi politik tidak dapat dihindari, pada akhirnya BUMN menjadi "sapi perahan" partai, atau penguasa. Minimnya profit dan gagalnya membawa misi sosial terus menggerogoti keuangan negara. Jauh sebelum krisis, umumnya badan usaha ini tidak sehat, pengelolannya pun masih jauh dari prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Indonesia setelah dihempas krisis, terkulai dengan krisis moneter tidak ada pilihan lain, kecuali pemerintah meminta uluran tangan IMF untuk membantu mengatasi krisis. Bantuan tentu saja ada syarat yang harus dipatuhi debitor yang dituangkan dalam *letter of intent (LOI)*, salah satu butuhnya adalah melakukan privatisasi BUMN, dan negara (pemerintah) dibatasi dalam kegiatan ekonomi. Bahkan komoditi strategis pun dilepas ke mekanisme pasar. Privatisasi tentu baik, melepas dominasi negara kepada pihak lain (publik), selain memperbesar kepemilikan publik, dan selanjutnya kontrol publik makin kuat sehingga kinerja BUMN, atau sisi manajerialnya makin meningkat sesuai praktek-praktek korporasi.

Namun demikian, implementasi privatisasi di Indonesia tidak hanya sekedar bagaimana membuat BUMN kinerjanya makin membaik, tetapi juga dibebani untuk menutup lubang-lubang APBN. Hasil privatisasi dijadikan sebagai salah satu sumber pembiayaan defisit anggaran negara, selain berharap dari penjualan aset serta pinjaman luar negeri.

Teorinya, hasil privatisasi sebuah korporasi umumnya untuk menambah *stock capital* sehingga kapasitas produksi makin meningkat. Ini sudah di luar teori, privatisasi BUMN maupun

badan usaha (perbankan) yang masuk ke dalam perawatan Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk menambal sulan anggaran negara. Pada akhirnya, dilakukan privatisasi (jual beli) secara massif, bahkan dibawah harga indikatif, setelah dilakukan restrukturisasi dan "perawatan intensif" yang menyerap anggaran yang tidak sedikit.

Bank-bank swasta nasional yang besar tadinya di *take over* pemerintah karena mengidap penyakit kronis, setelah sehat lalu dijual ke pihak asing. Idealnya, badan usaha yang sakit tapi memiliki prospek yang dijual, bukan yang sudah sehat dijual dengan harga relatif murah. Dominasi asing di perbankan nasional, turut memperparah disparitas penyaluran kredit, sebab mereka lebih fokus di Jawa saja. Selain itu tenaga kerja profesional makin didominasi para *ekspatriat*, sementara rakyat Indonesia cenderung menjadi buruh kasar di negerinya sendiri.

Kondisinya tidak jauh berbeda dengan BUMN itu sendiri meskipun sudah ada perubahan kebijakan BUMN tidak terlalu dibebani lagi untuk menyelaraskan devidennya kepada pemerintah. Tapi program privatisasi BUMN yang terus berlanjut menyisakan banyak masalah. Jauh sebelum diprivatisasi, BUMN yang akan *listing* (privatisasi) terus digenjot untuk melakukan restrukturisasi dan profitisasi, sehingga pada saat *Initial Public Offering (IPO)* cukup menarik minat pembeli. Termasuk BUMN yang sudah *listing* di bursa efek didorong untuk terus melakukan *right is listing* (menambah penjualan saham). Masalah yang timbul setidaknya dapat dilihat beberapa BUMN ketika melakukan IPO ditenggang dijual di bawah harga indikatif, seperti kasus Indosat. Selain itu, penjualan aset negara terindikasi dijual murah, seperti penjualan kapal tanker pertamina.

Kontroversi privatisasi BUMN setidaknya dilihat dari dua masalah pokok, *pertama* berkaitan dengan harga jual yang ker ditenggangi terlalu murah, dan *kedua* porsi kepemilikan saham pemerintah, terutama di BUMN strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, beralih kepemilikan ditangan asing. Kontroversi penjualan Indosat ke Singapore Technology Telemedia Pte Ltd anak perusahaan Temasek Singapura ya

menguasai banyak perusahaan di Indonesia melingkupi kedua kondisi di atas.

Temasek juga memiliki saham di Telkomsel, operator seluler terbesar di Indonesia. Dengan demikian, perusahaan pelat merah dari Singapura ini menguasai saham di pasar telekomunikasi. Pada akhirnya dicium oleh Komite Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Temasek terindikasi melakukan praktek monopoli di sektor telekomunikasi (Indosat dan Telkomsel).

Tulisan ini bukan bermaksud membahas secara detail pelanggaran monopoli, tapi ingin menunjukkan titik kontroversi model-model privatisasi BUMN selama ini, terutama Indosat, Semen Gresik dan yang sekarang lagi menghangat Krakatau Steel. Temasek, lewat anak perusahaannya *Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd*, yang memenangkan divestasi 41,94 persen saham Pemerintah Indonesia di Indosat senilai Rp 5,62 triliun (Rp 12.950 per saham) pada tahun 2002. Setelah dinyatakan bersalah oleh KPPU karena melakukan praktek monopoli, dikuatkan oleh putusan pengadilan diwajibkan membayar Rp. 15 miliar (Kompas, 9 Juni 2008).

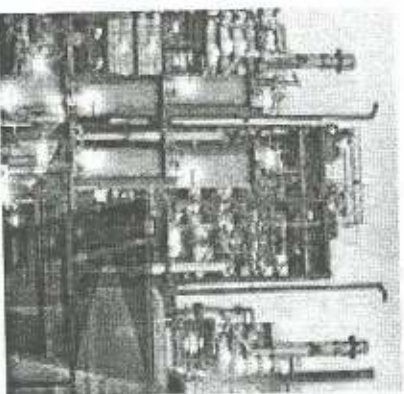
Bagi Temasek Holding Pte Ltd, dari pada membayar kepada pemerintah Indonesia, mereka lebih memilih untuk menjual kepemilikan sahamnya di Indosat Tbk, sebesar 40,8 persen saham Indosat Tbk milik Asia Mobile Holding Pte Ltd (AMH) diakuisisi Qatar Telecom (Qtel) senilai 2,4 miliar dollar Singapura atau 1,8 miliar dollar AS (Rp 16,8 triliun dengan kurs Rp 9.300). *Time lag* selama lima tahun dan dalam kondisi mendesak pun dapat dijual dengan harga yang fantastik (untung sekitar Rp. 4 T).

Kasus Krakatau Steel:

Privatisasi Krakatau Steel (KS) yang juga memantik reaksi banyak kalangan, bahkan Amien Rais menyebutnya privatisasi Krakatau Steel lebih dahsyat dari skandal Bank Century. Sebagian pihak menengarai sebagai perilaku dungu yang mengulangi kasus Indosat dengan menjual BUMN dengan harga murah. Kendati

Meng BUMN menegaskan bahwa proses privatisasi sudah sesuai aturan, dan proses persetujuan oleh DPR sudah berlangsung lama. Bahkan partai pendukung pemerintah (Demokrat) menyokong langkah Meng BUMN bahwa proses IPO KS sesuai mekanisme yang benar. Penjualan Indosat dan Krakatau Steel juga berbeda dalam hal untuk mendapatkan modal, Indosat melakukan divestasi, sementara Krakatau Steel lewat IPO. Sehingga menurutnya tidak dapat dibandingkan.

Bagi saya, yang menjadi persoalan bukan pada mekanismenya akan tetapi nilai jualnya yang amat rendah, Rp. 850, per saham. Harga ini hampir mendekati batas bawah harga indikator yang ditetapkan sebelumnya dikisaran Rp 800 - Rp 1.150 per saham. Padahal dalam hitung-hitungan, harga prospek saham KS kedepan bisa mencapai Rp. 2.000, per saham. Angka moderatnya



semestinya mematok harga dikisaran Rp. 1.000, per saham atau harga yang mendekati harga indikator teratas. Target Kementerian BUMN saham perdana KS akan dilego sebesar 20 persen ke publik, atau sebanyak 3,15 miliar saham, sehingga dengan demikian akan meraup sebesar Rp. 2,6 T. Sementara jika harga kisaran Rp. 1.000,- akan mendapatkan dana sebesar Rp. 3,15 T, berarti ada potensi *loose* sekitar Rp. 47 M.

Pertanyaannya, kenapa dianggap murah? Selain prospek sahamnya diaksir akan meningkat, kondisi makro ekonomi juga semakin membaik. Arus modal yang masuk ke Indonesia terus naik, saham-saham non unggulan pun tetap dilorong para investor. Dengan makin membaiknya makro ekonomi, permintaan baja domestik maupun internasional terus tumbuh. Dengan menjual harga saham KS sebesar Rp. 850 per saham pada masa penawaran awal (*book building*) tak pelak calon investor ritel terus

berjubel mengantre untuk memesan saham perdana produsen baja ini.

Ini indikasi awal, bahwa saham KS cukup prospek, sekaligus murah. Layaknya, prinsip ekonomi semestinya diberlakukan, makin tinggi permintaan (*demand*) harga makin meningkat (mahal). Privatisasi tidak ada yang salah, KS memang butuh modal untuk meningkatkan produksinya agar dapat memenuhi kebutuhan baja dalam negeri, terutama pada industri otomotif yang makin agresif, tapi harga yang pantas dan wajar.

Sekalipun itu kebijakan penjualan KS harus memprioritaskan pasar dalam negeri (investor lokal), melihat antusiasme investor ritel sepertinya tidak perlu mengundang investor asing. Untuk Kota Jakarta saja calon pembeli saham tiga kali lipat, apalagi jika tawarkan ke kota-kota besar di Indonesia. Aset-aset strategis umumnya sudah dimasuki asing, terutama lembaga keuangan, karena itu tidak ada salahnya BUMN yang diprivatisasi diprioritaskan investor lokal. Alasan jika menggandeng investor asing akan ada transfer teknologi tidak sepenuhnya benar, ada banyak kasus korporasi yang dikuasai asing cenderung tidak melakukan sebagaimana yang diharapkan.

Kasus Indosat seharusnya menjadi cermin, betapa tidak adanya rancang bangun peradayaan BUMN dalam jangka panjang. Negara ini hanya cenderung mencari recehan dalam jangka pendek, sementara strategi penguasaan *resources* yang dikelola BUMN belum ada desain. Kenapa selalu melakukan kesalahan berulang kali? Hanya keledai yang selalu terantuk pada lubang yang samal. 



Kebijakan Pengembangan UMKM: Anak Tiri yang Menghidupi Perekonomian Nasional

 eberadaan UMKM menunjukkan bahwa sektor ini sangat layak diandalkan sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Faktanya, krisis moneter tahun 1998 dan krisis global 2008 perusahaan multi nasional (*multi national company*) banyak yang rontok, sementara sektor UMKM tetap bertahan, malahan tumbuh. Sementara dalam aspek kebijakan, seringkali kurang mendapatkan porsi perhatian yang besar, justru MNC menjadi anak kesayangan bahkan di *bailout* triliunan rupiah pada saat rontok.

Belajar dari pengalaman dua krisis sebelumnya, sejumlah negara kian sadar bahwa peranan UMKM sangat strategis dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, negara-negara tersebut, termasuk Amerika Serikat, mempercepat layanan paket-paket insentif terhadap pelaku UKM. Dari segi kontribusi, sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional (PDB) sudah lebih



dari 50 persen, bahkan tahun 2010 diprediksi akan tumbuh nilai transaksinya.

Melihat kondisi ini, UMKM tidak dapat dianggap remeh termasuk dalam penyerapan tenaga kerja. Data Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan, sampai saat ini jumlah populasi UMKM mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,9persen dari total usaha di Indonesia. Jumlah penyerapan tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3persen dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Dari kenyataan ini, pemerintah pusat, juga sebagian besar pemerintah daerah menggenjot program-program pemberdayaan masyarakat, termasuk meningkatkan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp. 2 triliun untuk menjamin kredit lunak sebesar Rp. 20 triliun.

Tapi sayangnya, program ini kurang berjalan maksimal karena dihadapkan pada berbagai kendala. Kondisi geografi dan demografi setiap daerah berbeda, sehingga akses informasi tentang pembiayaan dan pemasaran produk UMKM cukup menyulitkan. Bahkan oleh sebagian pemerintah daerah, program pengembangan UMKM hanya sebatas *lipservice* sebagai pencitraan keberpihakan terhadap pelaku ekonomi kecil pada saat kampanye Pilkada. Setelah terpilih, dengan naluri *rent seekers*, sebagian kepala daerah kurang peduli kelangsungan UMKM sebab kurang mendatangkan manfaat finansial untuk pengembangan pembiayaan kegiatan politik pada saat kampanye. Pengembangan UMKM di daerah, masih banyak kendala, termasuk pelayanan izin kegiatan usaha, kendati mereka (daerah) sudah berlomba-lomba menerapkan "*one stop services*". Selain kualitas produk dan manajemen pengelolaan untuk melakukan inovasi masih rendah, yang sebetulnya butuh bimbingan pemerintah daerah.

Sebagian kepala daerah masih berkeyakinan, bahwa perekonomian di sektor industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Asumsi ini tidak salah, tapi realitasnya menunjukkan bahwa berharap investasi untuk industri besar (sektor riil) saat ini sangat sulit. Uang (investasi) yang masuk ke Indonesia memang mengalir deras, akan tetapi lebih banyak

tersepat ke sektor keuangan, terutama memburu SBI. Selain investasi di sektor keuangan, investasi di sektor telekomunikasi dan *mining* masih menjadi primadona. Sayangnya, sektor telekomunikasi hanya tumbuh pesat di pusat-pusat bisnis, sementara daerah pinggiran tidak banyak mengalami perubahan. Sementara itu, jenis investasi disektor *mining*, tidak merata kesemua daerah, hanya provinsi yang memiliki kekayaan SDA yang dapat menikmatinya.

Mencermati kondisi itu, tidak salah pemerintah daerah terutama yang miskin SDA, harus menggenjot pengembangan sektor UMKM yang sudah terbukti mampu memberikan kontribusi yang tidak sedikit, termasuk penyerapan tenaga kerja. Upaya dan *road show* gubernur, bupati/walikota sampai keluar negeri untuk menggaet investasi masih sangat sulit dalam realisasi, karena banyaknya hambatan investasi yang terkadang tidak disadari pemerintah daerah. Daerah yang minim SDA, harus lebih fokus pada pengembangan UMKM, karena itu lebih realistis.

Pada tingkat pemerintah pusat, sudah banyak program yang ditelorkan, tapi sinergi dengan pemerintah daerah belum sejalan secara optimal. Karena itu, tidak mengherankan kemudian laporan "*Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs*" yang ditulis oleh *International Finance Corporation (IFC)* dan *World Bank* menempatkan Indonesia pada posisi 121, melorot dari tahun sebelumnya berada diperingkat 115 dari 183 negara yang survey. Laporan ini merupakan yang ke-8 dari rangkaian laporan tahunan yang dipublikasikan oleh mereka dengan menilai aspek-aspek regulasi bisnis kunci untuk perusahaan lokal. Peringkat dibuat berdasarkan 9 topik yang dibuat dari berbagai indikator. "*Doing Business 2011*" ini meliputi periode Juni 2009 hingga Mei 2010. Sembilan indikator itu adalah: Permulaan bisnis, berkaitan dengan izin konstruksi, pendaftaran properti, akses kredit, perlindungan investor, pembayaran pajak, perdagangan lintas batas, pelaksanaan kontrak dan penutupan bisnis. Dari sembilan indikator usaha yang dijadikan dasar penilaian '*doing business*' Indonesia, enam indikator menunjukkan

penurunan yakni pendaftran properti, kemudahan memperoleh kredit, perlindungan terhadap investor, pajak, kontrak usaha, dan penutupan bisnis. Tapi yang dianggap paling buruk adalah akses kredit, dan sedikit mengalami kenaikan (perbaikan) adalah permulaan bisnis. Hal ini makin mempertegas bahwa industri perbankan lebih merasa *comfortable* menyimpan uangnya di SBI ketimbang menyalurkan kredit ke UMKM yang dianggap memiliki resiko tinggi. Kendati BI sudah menurunkan BI rate pada posisi 6,5 persen, tapi bunga kredit perbankan masih di atas 10 persen.

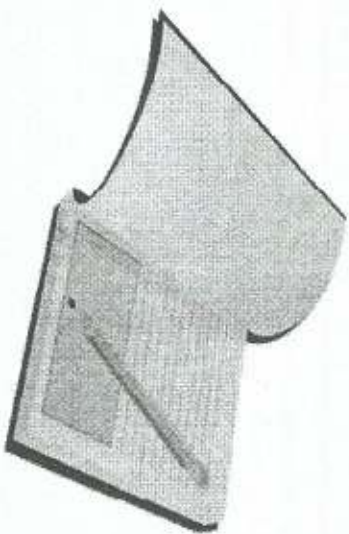
Kebijakan BI yang terus mengembangkan SBI, tidak hanya memancing investor asing masuk, perbankan pun memburu laba dengan menggunakan instrumen SBI. Perilaku yang sama, sebagian besar pemerintah daerah justru mengendapkan uangnya di BI, ketimbang merealisasikan pembiayaan proyek. Indikasinya dapat dilihat, hampir setiap tahun sisa anggaran tinggi.

Hasil survey IFC tentu saja bertolak belakang dengan hasil survey dari *World Economic Forum*, yang merilis peringkat daya saing Indonesia meningkat dari posisi ke 55 naik pada posisi ke 44. Survey yang terakhir cukup diapresiasi dengan baik oleh pemerintah, sementara survey IFC dan WB pemerintah sepertinya kurang *happy*.

Apapun hasil survey tentang daya saing Indonesia, harus diterima dengan terbuka sembari terus melakukan perbaikan agar investasi bisa terus mengalir. Jangan hanya mau menerima hasil survey yang baik-baik saja, karena itu tidak akan mendorong semangat melakukan perbaikan. Pada tingkat lokal, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk terus membenahi pelayanan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Selama ini, pemerintah daerah terlalu bergantung transfer dan bantuan dari pemerintah pusat, bertumpu pada *supply side*, artinya pemerintah bertindak sebagai produsen dan bersedia menciptakan barang dan jasa untuk menggerakkan perekonomian, pada akhirnya kegiatan ekonomi daerah lebih banyak bergantung dari pemerintah. Sementara pengembangan ekonomi lokal dari *demand side* kurang diperhatikan, padahal konsumen (rakyat) dan permintaan mereka

untuk barang dan jasa merupakan penggerak utama ekonomi. Salah satunya sektor UMKM yang berbasis lokal, terutama kegiatan ekonomi kreatif semestinya terus didorong sebagai *engine of growth* ekonomi. ■





Mempertahankan Kebijakan Populis Ditengah Meroketnya Subsidi BBM

Ada banyak pertanyaan yang muncul berkaitan dengan postur APBN setiap tahun mengalami kenaikan. Semenjak SBY jadi presiden, APBN mencapai Rp. 1000 T lebih. APBN yang makin "tambung" memberikan ekspektasi bahwa kondisi ekonomi akan makin membaik dan *welfare* masyarakat makin meningkat, dengan asumsi jika besaran APBN seperti itu digunakan untuk pembiayaan peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun pada kenyataannya, kenaikan nominal APBN setiap tahunnya seolah tidak berasa di masyarakat, sederhananya dilihat dari minim dan buruknya infrastruktur, pelayanan publik tidak menjadi lebih baik seiring dengan meningkatnya APBN.

Penyusunan APBN tidak bisa dipisahkan dari politik anggaran yang dirancang oleh pemerintah dan DPR. Maka dari itu, kenaikan APBN bukan semata untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (pengeluaran), akan tetapi sekaligus menjawab kebutuhan asumsi makro yang disusun sebelumnya. Setidaknya ada tujuh asumsi makro ekonomi dalam APBN yang harus selalu berkesesuaian, yaitu PDB, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs,

SBI, harga minyak dan *lifting* minyak mentah. Bila target asumsi makro ini tidak tercapai (tidak sesuai) dipastikan APBN mengalami tekanan yang membutuhkan perubahan, karena itu disebut APBN-Perubahan (APBNP).

Untuk menentukan skenario asumsi makro ekonomi, tidak hanya indikator ekonomi semata yang bicara, akan tetapi interest politik juga mengikut di dalamnya, misalnya target kenaikan PDB, pertumbuhan ekonomi, *lifting* minyak kerap dipatok dengan angka optimistik, sementara inflasi, kurs SBI dan harga minyak mentah dunia dipatok dengan nilai yang relatif rendah. Target dan pencapaian asumsi makro tersebut sebagai gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi, akan tetapi menjadi masalah bagi rezim pemerintahan dan secara luas makro ekonomi terganggu manakala asumsi makro semua meleset.

Beberapa tahun terakhir ini, asumsi makro ekonomi yang paling "*vollatile*" dan berdampak luas terhadap "kesehatan" APBN yaitu target *lifting* dan harga minyak mentah dunia yang kerap jauh dari asumsi yang dipatok. APBN 2011 target *lifting* minyak sebesar 970 ribu barrel per hari (bph), akan tetapi dilakukan perubahan target menurun menjadi 945 ribu bph. Sementara kenaikan harga minyak mentah dunia, yang berlaku mekanisme pasar. Setiap hari bahkan menit mengalami perubahan, dengan demikian berdampak langsung terhadap APBN karena berkaitan dengan subsidi. Membaiknya makro ekonomi global biasanya permintaan minyak melonjak di pasar internasional, sebaliknya jika terjadi *turbulence* ekonomi seperti pada tahun 2008 di USA, Jepang dan beberapa negara Eropa lainnya permintaan minyak menurun dibarengi dengan penurunan harga. Oleh karena itu menjelang Pemilu tahun 2009,



pemerintah menurunkan harga BBM pada level harga semula.

Penurunan harga BBM tidak bisa dipisahkan sebagai kebijakan pencitraan, meski tidak dapat dikesampingkan berdampak terhadap inflasi. Namun sebagai komoditas strategis dunia, sudah dapat dipastikan harga minyak akan merangkak kembali berbarengan dengan pulihnya krisis ekonomi global. Tentu saja situasi ini akan menimbulkan masalah, karena harga BBM dipatok pada harga tetap, sementara harga dunia trendnya meningkat. Opsi pemerintah yang akan dihadapi sudah pasti terbatas, menaikkan harga BBM, atau membatasi BBM bersubsidi. Menaikkan harga BBM akan menimbulkan inflasi terlebih akan memunculkan gejolak sosial sekaligus merusak citra pemerintah yang berkuasa. Mempertahankan pada level harga yang ada dipastikan subsidi membengkak dan membebani APBN.

Dalam APBN-P 2011 pemerintah memprediksi subsidi BBM akan naik dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 120,7 triliun. Artinya, terjadi kenaikan subsidi sebesar Rp 24,8 triliun atau naik 29 persen dari pagu anggaran 2011 (JPNN, 06/7/2011). Dampak ikutannya, yakni defisit APBN membesar maka pembiayaan defisit tersebut dipastikan tidak jauh sumbernya dari hutang. Walau secara teoritis, defisit anggaran sesuatu yang halal, bahkan "wajib" yang tujuannya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi defisit terjadi karena dampak dari pembiayaan sektor riil. Opsi lain yaitu membatasi BBM bersubsidi, namun yang kita lihat opsi ini tidak berjalan efektif, kelangkaan BBM meluas ke berbagai daerah, moral *hazard* tetap timbul karena dispartas harga yang tinggi dengan BBM non subsidi. Imbauan moral (*moral section*) tidak akan dihiraukan, bahkan rencana menggandeng MUI alih-alih mendapatkan apresiasi positif, justru pemerintah dianggap frustrasi dan MUI dikecam.

Semua opsi tidak berjalan, implikasinya kemudian BBM bersubsidi akhirnya ditambah dari 38,6 juta kiloliter (KL) menjadi 40,49 juta KL. Dengan perincian premium 24,54 juta KL (bertambah 1,35 juta KL), solar 14,15 juta KL (bertambah 1,07 juta KL), minyak tanah 1,8 juta KL (diturunkan 0,52 juta KL). Dengan demikian, jika volume BBM bersubsidi ditambah, maka eksekusi dana

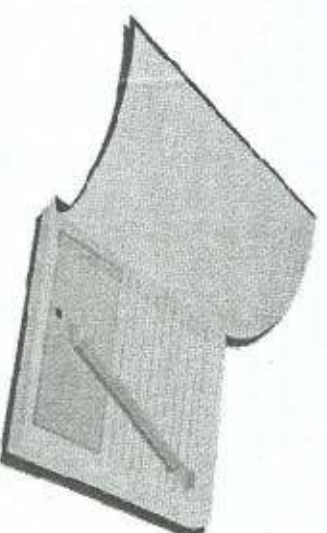
akan ditambah Rp. 25 triliun, sehingga total akan menyerap dana subsidi BBM menjadi Rp. 120,7 triliun. Dari total subsidi BBM tersebut yang paling banyak menikmati yaitu *decile* masyarakat atas, bahkan simulasi Kemenkeu sekitar 75 persen dinikmati bagi kalangan yang tidak layak disubsidi. Kendati demikian, seperti halnya pemerintah tetap pada posisinya tidak akan menaikkan harga BBM dengan alasan akan menimbulkan gejolak sosial dan angka kemiskinan akan melonjak. Jika alasan ini sudah pasti lebih banyak berbicara pada muatan citra politik pemerintahan, tidak lagi bicara tentang persoalan ekonomi *an sich* semata. Bagi saya, kondisi APBN yang tertekan kebijakan yang tidak populer sekali pun wajib untuk ditempuh bukan hanya pada level pemerintahan di tingkat pusat, termasuk pemerintah daerah dalam konteks APBD.

BBM sebagai komoditi strategis dan bersifat *unrenewable* sudah pasti trendnya meningkat dari sisi harga, kendati pada kondisi tertentu menurun, karena BBM substitusinya masih terbatas. Menurunkan harga BBM menjelang Pemilu merupakan kebijakan yang amat populer akan tetapi tidak mendidik, yang justru menimbulkan masalah dikemudian hari yang sudah terbukti saat ini. Saya menduga, jika kebijakan penurunan harga BBM menjelang Pemilu tidak ditempuh maka beban subsidi BBM seperti yang dialami sekarang tidak terlalu berat. Karena opsi untuk menaikkan harga BBM sebesar Rp. 500 per liter saja diprediksi akan berdampak langsung terhadap kenaikan inflasi sebesar 2,25 persen, akhirnya merembes ke angka kemiskinan. Maka inilah sesungguhnya yang ditakutkan oleh pemerintah. Maka inilah persoalan kemiskinan, menjadi taruhan citra dan akan yakni persoalan kemiskinan, menjadi taruhan citra dan akan mengerogoti popularitas pemerintahan yang memang sudah terus tergerus sebagai dampak belum terselesaikannya kasus Nazaruddin.

Sementara masalah kemiskinan diisi lain juga menimbulkan polemik, definisi kemiskinan menjadi tidak baku dalam banyak pandangan dan ukuran, masing-masing lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah berbeda. Belum lagi definisi kemiskinan dan hampir miskin yang digunakan

pemerintah akan menjejak kita, karena bila diukur dari segi pendapatan batasannya sangat tipis. Merunut ukuran yang digunakan BPS garis kemiskinan yaitu Rp 233.740 pengeluaran per kapita perbulan, atau sekitar Rp. 8.000 per hari, sedangkan hampir miskin ukurannya adalah 1,2 kali dari garis kemiskinan, berarti pengeluaran per kapita perbulannya di bawah Rp 280.488 atau masih dibawah Rp 10.000 per hari.

BPS mencatat per maret 2011 jumlah penduduk miskin sebesar 30,02 juta orang atau 12,49persen dari total seluruh penduduk Indonesia. Kedua kategori ini sesungguhnya adalah sama-sama miskin, karena pengeluarannya di bawah Rp 10.000 per hari, totalnya sekitar 60 juta penduduk. Tentu saja akan lebih parah jika menggunakan ukuran world bank garis kemiskinan 2 US\$ pengeluaran per kapita per hari, angka kemiskinan di Indonesia bisa mencapai 60 persen. Demi menjaga popularitas, ratusan triliun rupiah dihabiskan untuk asap knalpot. 



Kebijakan Subsidi, Pemerintah Seperti Menari "Poco-Poco"

A Ada dua isu menarik bila dicermati dengan baik dalam dua minggu terakhir ini berkaitan dengan subsidi, yakni rencana penghapusan KRL ekonomi dan kemungkinan makin membengkaknya subsidi BBM. PT. Kereta Api Indonesia (KAI) bersikukuh akan menghapus KRL ekonomi, dalam kegiatan operasionalnya disubsidi oleh pemerintah, diganti menjadi kereta komuter ber-AC, konsekuensinya tarif ekonomi menjadi juga tidak berlaku. Tarif semua sebesar Rp., 2.000,- dinaikkan menjadi Rp. 8.000,- bolak-balik berarti pengguna KRL ekonomi akan menambah biaya transportasi perhari sebesar Rp. 12.000,-.

Sementara penduduk Indonesia yang berpenghasilan di bawah Rp. 12.000,- masih ada puluhan juta jiwa. PT. KAI dalam menjalankan operasionalnya sangat logis berpikir profit, karena statusnya badan usaha. Penghapusan KRL ekonomi didasari karena KRL ekonomi sering mogok, biaya operasionalnya makin tinggi dan *spare part*-nya makin langka.

Namun perlu diingat, KAI adalah milik negara pemerintah wajib melakukan intervensi melalui kebijakan, salah satunya subsidi KRL ekonomi bukan barang haram karena penggunaanya adalah kelas menengah ke bawah, yang memany

perlu dibantu. Kebijakan subsidi ada dua jalur, subsidi ke penyedia jasa (KAI) atau subsidi langsung kepada pengguna KRL ekonomi. Jalur pertama akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan jalur kedua yang diusulkan oleh PT. KAI agar pengguna KRL ekonomi harus memiliki Surat Keterangan Miskin.

Usulan dengan menggunakan Surat Keterangan Miskin merupakan cara-cara tidak elegan, dan tidak efektif karena akan menambah kerumitan, baik bagi pemerintah maupun pengguna KRL ekonomi sendiri. KAI sewajarnya mencari profit, namun badan usaha negara jangan melupakan kodratnya mengembangkan misi sosial. Oleh sebab itu, KAI tetap perlu menyediakan pilihan-pilihan yang berbeda bagi pengguna jasa kereta, sementara pemerintah wajib membantu PT. KAI lewat subsidi operasional. Disinilah dibutuhkan keberpihakan pemerintah, tidak hanya sebatas himbauan moral kepada KAI agar menunda penghapusan KRL ekonomi.

Sikap pemerintah sangat berbeda dengan subsidi BBM, realitasnya subsidi BBM lebih banyak orang mampu yang menikmati ketimbang kelas menengah yang berpenghasilan Rp. 12.000,- ke bawah. Kebijakan pemerintah terkait dengan ini kelihatan maju mundur dan mutar-mutar bak orang menari poco-poco. Besaran subsidi energi dalam APBN 2013 lebih dari Rp. 274 triliun, ada kemungkinan membengkak karena kecenderungan harga minyak mentah dunia naik, sementara lifting minyak dalam negeri makin menyusut.

Oleh karena itu pengurangan subsidi BBM tidak terelakkan untuk dilakukan, persolannya apakah pemerintah berani? Ada banyak skema dan skenario kebijakan yang dirancang akan tetapi dalam implementasinya tidak berjalan, mutar-mutar. Kini muncul usulan baru hanya sepeda motor saja yang boleh menggunakan BBM bersubsidi kelak, selain itu Kementerian ESDM pun telah mengeluarkan Kepmen No. 1 Tahun 2013 tentang larangan truk pertambangan dan perkebunan menggunakan BBM bersubsidi, boleh jadi keputusan logis namun dalam praktiknya di lapangan akan sulit, kecuali mereka punya SPBU khusus.

Kecenderungan pemerintah berpikir politis lebih kuat, dengan menjaga citra tetap mempertahankan subsidi untuk menghindari resiko gejolak dan penolakan. Apalagi memasuki tahun politik, pengambil kebijakan yang terkait langsung merupakan orang-orang partai, karena itu terkesan lebih memilih APBN jebol ketimbang suara partai yang jebol tahun depan. Sikap pemerintah yang menari poco-poco akan membawa konsekuensi perhatian anggaran, baik di pusat maupun di daerah. Pada tri wulan pertama, subsidi energi sudah habis menguap lebih dari Rp. 50 triliun, maka kemungkinan kuota BBM akan ditambah dengan sendirinya subsidi bertambah. Ini akan memberikan dampak terhadap makro ekonomi, dengan meningkatnya defisit anggaran, semula dipatok sekitar 1,6 persen naik menjadi 2 persen.

Sementara

pembiayaan defisit dipastikan sumber utamanya lewat utang. Dalam APBN 2013, pemerintah mengupayakan pembiayaan defisit dengan sumber pembiayaan dari pembiayaan non-utang sebesar Rp 8,1 triliun dan pembiayaan utang Rp 161,4 triliun. Pembiayaan utang terdiri atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) netto sebesar Rp 180,4 triliun, pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp 19,5 triliun, dan pinjaman dalam negeri Rp 500 miliar.

Ini merupakan indikasi kuat bahwa kebijakan pengendalian BBM bersubsidi tidak lagi efektif, pilihannya hanya ada satu menaikkan harga BBM. Kondisi ini akan terus berlanjut, bilamana pemerintah tidak menempuh kebijakan yang drastis, diperkirakan tahun 2014 menghadapi Pemilu konsumsi BBM malah tambah naik, kendati ada rencana subsidi energi akan dibatasi.

Konsekuensi anggaran yang banyak tersedot ke subsidi energi, maka belanja modal berkurang, demikian halnya dana



transfer ke daerah menyusut. Hitungan sederhananya, jika sekiranya subsidi energi dikurangi sepepermahya saja kemudian dibagikan ke daerah setiap provinsi akan mendapatkan Rp. 1 triliun lebih dan sisanya subsidi langsung ke pengguna KRL ekonomi.

Bagi daerah, ketambahan dana transfer akan menggerak pertumbuhan yang lebih tinggi, pembangunan infrastruktur akan banyak yang terealisasi. Di tengah minimnya investasi ke daerah, terutama wilayah timur dana transfer sangat membantu, karena mengarah investasi langsung dari swasta masih sulit karena minimnya infrastruktur. Investasi swasta masih cenderung terkonsentrasi di wilayah yang memiliki infrastruktur yang lengkap, sehingga upaya melakukan pemerataan pembangunan antar kawasan masih bersifat pemerah bibir.

Pilihan memangkas subsidi energi merupakan kebijakan yang tidak populer, membawa konsekuensi bagi pemerintah dan partai pengusaha. Tapi itu merupakan resiko bagi pemimpin dan pemerintah, pemerintah dengan menghindari resiko akan membawa banyak dampak ekonomi yang lebih buruk. Karenanya dibutuhkan bagi pemerintah kemampuan mengelola resiko itu, mampu menjelaskan secara logis dan rasional atas kebijakan yang ditempuh.

Selain itu manajemen pengelolaan energi dan sumber daya mineral juga diperlukan, karena dari sini berulu. Pengelolaan energi hulu merupakan titik lemah, beberapa tahun terakhir lifting minyak makin menurun karena tidak ditemukan sumur baru dan sumur-sumur tua makin kurang produktif. Sementara kebijakan energi alternatif dari berbagai sumber belum berjalan optimal, yang dapat mengurangi penggunaan energi fosil.

Menurut hemat saya, kompetensi seorang menteri teknis di bidang energi juga diperlukan, menjadi penting dipertimbangkan seorang menteri ESDM sepatutnya yang memiliki visi untuk mengembangkan energi alternatif. Maka kita layak berharap kedepannya, kementerian ini diserahkan kepada orang profesional bukan orang partai yang lebih banyak bercapuk politik praktis, dan konsentrasinya terpecah mengurus



partai yang terpuruk. Kalau kita cermat, sepertinya akhir-akhir ini Menteri ESDM lebih banyak berbicara tentang partainya ketimbang tugas pokok dan model kebijakan pengelolaan energi. ![]



Runtuhnya Kebijakan Subsidi BBM di Tahun Politik

Setiap tahun pemerintah dipusingkan dengan lonjakan subsidi energi. Perdebatan dan silang pendapat pun bermunculan mengenai kebijakan subsidi, kondisi ini menambah kebingungan pemerintah untuk memutuskan opsi mana yang terbaik akan ditempuh. Namun harus disadari bahwa pro-kontra merupakan konsekuensi dalam sebuah pengambilan keputusan, apalagi keputusan melibatkan parlemen yang dihuni berbagai partai politik memiliki agenda yang berbeda.

Oleh karena itu, masalah kebijakan energi sudah selayaknya menjadi agenda bersama berbagai pihak, termasuk partai politik. Mereka partai politik sepatutnya memiliki *platform* tentang energi, punya konsep yang memadai bagaimana membangun visi pengembangan energi dalam jangka panjang, energi fosil yang murah bukan lagi zamannya. Partai politik jangan lagi mencari justifikasi bahwa tugas negara membantu masyarakat melalui subsidi, secara konstitusional subsidi dibenarkan akan tetapi harus tepat sasaran.

APBN 2013 mengalokasikan subsidi sekitar Rp. 300 triliun, lebih dari separuh untuk subsidi BBM (premium dan solar). Konsumsi premium sendiri 99 persen digunakan untuk transportasi darat, dengan rincian kendaraan pribadi

menggunakan 45 persen dan kendaraan motor sekitar 40 persen, sisanya 15 persen kendaraan umum. Sementara penggunaan solar sekitar 91 persen untuk transportasi darat, dialokasikan 30 persen untuk bus, 39 persen angkutan barang dan sekitar 26 persen untuk untuk truk tambang (Kompas, 29/4/2013).

Prosentase penggunaan BBM sangat jelas lebih banyak dinikmati oleh orang kaya. Pada titik inilah pemerintah perlu menjelaskan secara terang kepada masyarakat, termasuk mahasiswa yang menjadi garda terdepan menolak jika terjadi kenaikan harga BBM. Membiarkan subsidi terus membengkak dengan harapan mendapatkan BBM murah justru akan memperhancurkan mentalitas orang miskin.

Beberapa pihak, termasuk partai politik ada yang cenderung mencari popularitas belaka dengan tidak mendukung upaya pemerintah mengurangi subsidi BBM. Di tengah beratnya beban fiskal, mereka mencari keuntungan politik menolak kenaikan harga BBM ke tingkat keekonomian seperti yang terjadi selama ini. Harga minyak mentah dunia diatur oleh mekanisme pasar, sementara Indonesia sudah lama menjadi *net import* minyak. Produksi minyak (*lifting*) yang ditargetkan setiap tahun dalam APBN tidak pernah tercapai, malahan cenderung seret. Oleh karena itu tidak banyak pilihan bagi pemerintah mengenai kebijakan subsidi BBM. Keputusan yang cepat diperlukan, opsi menaikkan harga BBM tetap menjadi pilihan "terbaik", apalagi UU APBN sudah memberikan mandat kepada pemerintah melakukan penyesuaian harga.

Memperhatikan subsidi BBM dalam jangka pendek memang relatif menjaga stabilitas makroekonomi, cenderung mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, pada saat yang bersamaan perkapita masyarakat naik. Dengan sendirinya jumlah kelas menengah baru akan bertambah, dalam kurung waktu kurang dari 10 tahun terakhir, menurut data Bank Dunia jumlah kelas menengah di Indonesia meningkat dari 37,7 persen tahun 2003 menjadi 56,6 persen tahun 2010 dari total jumlah populasi Indonesia. Peningkatan jumlah kelas menengah akan mendorong hasrat konsumsi, termasuk permintaan kendaraan (mobil dan motor).

Walhasil konsumsi BBM bertambah pula, karena itu imbuhan untuk menghemat konsumsi percuma saja, hukum pasar berlaku. Selanjutnya, kebijakan penetapan kuota BBM bersubsidi sudah barang tentu tidak akan mencukupi. Bilamana besaran kuota tetap dipertahankan yang akan terjadi kelangkaan BBM, kebijakan ini akan mengganggu perputaran roda ekonomi. Dapat dipastikan pemerintah akan menambah jumlah kuota BBM. Namun resikonya beban fiskal akan makin berat karena besarnya subsidi BBM, berarti mengurangi alokasi pembiayaan infrastruktur dan *overhead social* lainnya.



Kebijakan mengenai subsidi BBM, kelihatan pemerintah masih terus berwacana dan maju mundur mencari formula. Kondisi ini menambah ketidakpastian bagi berbagai pihak, terutama pelaku usaha. Lambatnya keputusan perubahan kebijakan subsidi BBM justru akan menciptakan *expected inflation*, harga-harga mulai merangkak naik sebelum ada kenaikan harga BBM, dan kemungkinan kenaikan harga-harga pun terus naik pasca perubahan harga BBM. Apa yang dilakukan oleh pemerintah resiko timbulnya inflasi sebetulnya sudah ada selama kebijakan tidak ada kepastian, intinya ketidakjelasan kebijakan justru menciptakan inflasi. Meningkatkan harga BBM sudah pasti akan terjadi *shock* ekonomi, akan tetapi hanya berlangsung sesaat.

Namun demikian, resiko inflasi tidak hanya disebabkan oleh kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan pokok seperti daging sapi, bawang dan cabai beberapa waktu lalu cukup mengganggu perekonomian karena jenis barang kebutuhan tersebut menyumbang inflasi. Dua bulan kedepan seiring dengan liburan sekolah, bulan puasa dan lebaran dipastikan juga akan mendorong kenaikan inflasi. Jadi tanpa kenaikan harga BBM

inflasi tetap diperkirakan naik, karena itu keputusan kenaikan BBM lebih cepat akan lebih baik.

Akan tetapi nampaknya pemerintah akan meminimumkan resiko dengan menerapkan *twin price* BBM. Untuk kendaraan pribadi harga solar dan premium ditetapkan sebesar Rp. 6.500/liter sementara kendaraan umum dan motor harga tetap Rp. 4.500/liter. Penerapan *twin price* ini bukan tanpa masalah, terutama pada pengawasan kendati ada usaha menggunakan *chip card* untuk mengontrol perilaku *moral hazard* pembelian BBM di luar kebutuhan pemilik kendaraan. Pemasangan *chip card* tentu membutuhkan ongkos, termasuk menempatkan pihak keamanan di setiap SPBU yang juga memerlukan pembiayaan. Artinya, kebijakan *twin price* tersebut cenderung akan menciptakan biaya tambahan, ketimbang dengan menaikkan harga BBM secara serentak (harga tunggal).

Belum tuntas kebijakan *twin price* kini muncul opsi baru sebagaimana diungkapkan Menteri ESDM bahwa kemungkinan menerapkan harga tunggal BBM. Pembatalan *twin price* mengakibatkan upaya Pertamina mempersiapkan infrastruktur disetiap SPBU menjadi sia-sia, ada miliaran rupiah terbuang percuma. Inkonsistensi sikap dan maju mundur dalam menetapkan kebijakan justru menimbulkan ongkos yang mahal. Ditambah pernyataan-pernyataan pejabat publik kerap kali membingungkan, mereka cenderung mempersepsikan masyarakat tidak siap terhadap kenaikan harga BBM. Manakala persepsi itu dibangun maka selamanya masyarakat tidak mau (tidak siap) ada kenaikan harga BBM.

Padahal sesungguhnya pemerintahlah yang kurang siap menaikkan harga BBM karena masih cenderung mempertahankan citra, apalagi dalam tahun politik. Lambatnya keputusan mengenai subsidi BBM karena sudah tercemari dengan kepentingan politik, pertimbangan politik cenderung dikedepankan, maka pemerintah sendiri yang akan kerepotan. Padahal menaikkan harga BBM sudah berulang kali dilakukan, keputusan ini memang akan menimbulkan reaksi sesat, dan menambah populasi orang miskin. Namun distulah diperlukan

kompensasi bagi masyarakat miskin, hanya saja masalah kompensasi selayaknya tidak dibawa ke ranah politik bagi partai penguasa. Kompensasi beras miskin (raskin) maupun pemberian bantuan bidang pendidikan dan kesehatan jauh lebih tepat ketimbang bantuan langsung tunai, intinya kompensasi bersifat produktif.

Riset Energi Terbarukan Masih Jalan di Tempat

Akibat dimabukkan dengan subsidi BBM, triliunan rupiah yang semestinya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan mengembangkan riset, justru menguap menjadi asap. Selama ini sebagian kalangan penganut paham bahwa Indonesia kaya sumber daya mineral, termasuk minyak dan gas, maka dari itu mereka tetap berkeinginan harga BBM harus murah. Hanya sedikit yang memiliki pengetahuan bahwa energi fosil yang *unrenewable*, cadangannya makin menipis dan impor minyak makin hari makin meningkat.



Apalagi penggunaan energi alternatif dan terbarukan belum berjalan optimal karena dukungan pemerintah masih lemah melalui riset-riset. Padahal ada banyak sumber energi alternatif terbarukan tersedia belum digarap. Idealnya subsidi BBM direalokasi untuk riset, selama ini alokasi dana riset di Indonesia hanya sekitar 0,1 persen terhadap PDB kalah jauh dari negara-negara tetangga, Thailand 0,25 persen, Malaysia 0,6 persen dan Singapura 3 persen. Minimnya dana riset memperkuat dugaan bahwa *roadmap* kebijakan energi nasional belum kelihatan aplikasinya hendak kemana dalam jangka panjang? □



Kebijakan Menaikan Harga BBM, Upaya Mendorong Perbaikan Kesejahteraan

Sejajikan energi nasional tak dapat dipungkiri menyajikan berbagai persoalan sejak zaman orde baru, berlanjut hingga hari ini. Bonanza minyak akhir tahun 70-an hingga awal 80-an meminabobokan kita semua dengan menikmati harga BBM yang murah. "Berkah" itu hendak dijaga keberlangsungannya, namun tanpa disadari jumlah penduduk terus bertambah, fondasi makro ekonomi relatif kuat, berdampak terhadap peningkatan *income* perkapita. Daya beli masyarakat menguat, hasrat konsumsi bertambah, industri otomotif tumbuh tak dapat dinafikan memberikan efek terhadap peningkatan konsumsi BBM. Pada saat yang bersamaan produksi minyak menurun, cadangan makin menipis. Kebijakan subsidi mulai menimbulkan masalah serius karena memberikan dampak terhadap beban APBN setiap tahunnya.

Kini Indonesia bukan lagi negara pengeksport minyak, justru terbalik menjadi *net* impor, jadi sekalipun harga minyak mentah naik, Indonesia tak dapat menikmatinya. Anggaran untuk subsidi terus melonjak hingga melampaui belanja modal. Dalam APBN ada beberapa asumsi makro ekonomi, salah satu diantaranya *lifting* minyak paling *volatile* (cepat berubah).

Perubahan *lifting* tersebut sangat berpengaruh terhadap besaran subsidi BBM, melihat trend perubahan harga minyak hampir pasti setiap waktu kecenderungannya naik, walaupun terjadi penurunan elastisitasnya lebih kecil jika dibandingkan bila mana terjadi kenaikan. Harga minyak *volatile* karena merupakan komoditas strategis, mekanisme pasar berjalan, ketidakseimbangan *demand* dan *supply* mengakibatkan barang menjadi langka.

Gejolak politik internal negara penghasil minyak serta pertumbuhan ekonomi negara *emerging market* membutuhkan energi yang banyak, hal ini pasti akan mendorong lonjakan harga minyak. Kondisi inilah yang pernah kita alami pada tahun 2008, harga minyak dipatok sebesar 60 US\$ dalam APBN namun di awal tahun minyak mentah naik dua kali lipat menembus level 122 US\$. Sult mencari kebijakan alternatif, efisiensi penggunaan energi maupun pengeluaran pemerintah disektor lainnya tidak akan efektif. Kebijakan kurang populis menjadi jalan keluar dengan mengurangi besaran subsidi BBM. Tahun 2005 langkah serupa ditempuh pemerintahan SBY, maupun pemerintahan sebelumnya.

Subsidi Untuk Siapa?

Sejak awal tahun 2000-an APBN kerap menghadapi tekanan, karena itu siapa pun penguasa, partai apa pun penopangannya pasti kecenderungannya berpikir untuk menyisir item anggaran paling besar, namun dampaknya relatif kecil terhadap *fiscal sustainable*. Subsidi energi merupakan pembiayaan yang boros, sekitar 80 % subsidi energi (BBM) dinikmati oleh masyarakat *decile* atas digunakan untuk kendaraan pribadi dan keperluan *luxury goods*. Apakah subsidi salah? Subsidi bukan barang haram dilakukan oleh negara, malah cenderung dianjurkan, sebab subsidi pada dasarnya bentuk intervensi pemerintah terhadap kegiatan perekonomian. Negara liberal sekalipun menggunakan instrumen subsidi, namun pada komoditi yang membutuhkan perlindungan terhadap masyarakat bawah.

Subsidi dimaksudkan untuk menjangkau harga barang

bagi yang memiliki kemampuan terbatas, justru itu idealnya subsidi diberikan kepada yang berhak. Hanya pada komoditi-komoditi strategis yang paling dibutuhkan oleh masyarakat luas, seperti subsidi bibit, pupuk, pangan, pendidikan dan kesehatan. Selebihnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan perbaikan sarana transportasi umum. Walau ada pandangan mengemuka bahwa subsidi merupakan hak semua warga negara karena UUD 1945 memberikan peluang yang sama, kaya atau miskin untuk menikmati kekayaan alam Indonesia.



Pandangan ini tidak relevan, terlalu naif, karena negara memiliki kewajiban untuk menyejahterahkan rakyat yang kurang mampu. Sementara yang berkemampuan diberikan kedudukan dengan penghasilan yang memadai, yang lainnya disiapkan sarana untuk memanfaatkan kekayaan alam, serta diberikan jaminan kepastian hukum dalam berusaha, perlindungan keamanan kegiatan produksi dan pembangunan infrastruktur untuk memudahkan akses mereka. Bagi yang kurang mampu fasilitas barang publik yang dibangun cenderung memanfaatkan secara terbatas, apalagi barang publik yang sifatnya *rivalry*, ada unsur persaingan yang menggunakan *cost*, maka disitulah letak perlakuan yang bersifat diferensial diberlakukan.

Memperhatikan subsidi energi untuk jangka pendek memberikan keuntungan banyak pihak, tapi resiko fiskal untuk jangka panjang tidak sehat. Pasti akan memberikan dampak terhadap perekonomian, termasuk *rating* utang pemerintah karena ada sentimen negatif dari pelaku usaha maupun investor asing. Asumsi mereka dengan subsidi BBM yang tinggi pembiayaan di sektor-sektor produktif menjadi berkurang karena terkuras untuk pembiayaan subsidi. Pada triwulan pertama

APBN 2013, subsidi energi sudah menguap lebih dari Rp. 50 triliun, maka kuota BBM akan ditambah dengan sendirinya subsidi bertambah pula. Dampak ikutannya defisit anggaran meningkat, APBN 2013 dipatok defisit sekitar 1,6 % naik menjadi 2 %, bahkan dalam APBN-P 2013 yang baru disepakati Badan Anggaran DPR bersama pemerintah sebesar 2,38 %. Sementara pembiayaan defisit dipasitkan sumber utamanya lewat utang. Tahun fiskal 2013, pemerintah mengupayakan pembiayaan defisit dengan sumber pembiayaan dari pembiayaan non-utang sebesar Rp 8,1 triliun dan pembiayaan utang Rp 161,4 triliun. Ini merupakan indikasi kuat bahwa kebijakan pengendalian BBM bersubsidi tidak lagi efektif, pilihannya hanya ada satu, menaikkan harga BBM.

Apa dampaknya kenaikan BBM?, pengalaman menunjukkan *short term* dipasitkan akan menciptakan *shock* ekonomi, inflasi meningkat terbuka peluang bertambahnya angka kemiskinan bilamana harga BBM dinaikkan. Sebagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat yang berkemampuan terbatas diberikan kompensasi selama tiga sampai enam bulan. Penentuan *term* waktu didasarkan hasil simulasi kebijakan dan berkaca pada pengalaman sebelumnya, *range* waktu tersebut diasumsikan tingkat inflasi mulai terjadi pada ambang batas psikologis.

Selanjutnya masyarakat dapat mengkompensasi dirinya untuk meningkatkan daya beli bilamana pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk sektor publik. Pemberian kompensasi (Bantuan Langsung Tunai Sementara/BLST) bukan merupakan bentuk derma, tapi lebih pada upaya membantu masyarakat menjaga daya belinya sementara waktu. Akan tetapi idealnya, kompensasi bukan dalam bentuk uang tunai tapi berorientasi pada kegiatan ekonomi produktif yang bersifat *sustainable*.

Sementara jangka panjang (*long term*) memberikan dampak positif, secara empiris bila kita cermati dua titik waktu kurun 10 tahun dalam garis trend inflasi dan angka kemiskinan 2005 dan 2008 mengikuti kenaikan harga BBM, namun setelah itu garisnya melandai, bahkan trend perbaikan inflasi dan penurunan angka

kemiskinan cenderung lebih besar dari tahun sebelum kenaikan BBM. Maka kemudian muncul pertanyaan, benarkah mengurangi subsidi menyengsarakan rakyat? Pengalaman menunjukkan kenaikan harga BBM telah berulang kali dilakukan oleh semua pemerintahan, resesi ekonomi tidak terjadi karena dipicu oleh kenaikan harga BBM.

Harus dibangun pemahaman yang baik, bahwa BBM merupakan barang langka yang bersifat tidak terbarukan (*unrenewable*). Sumur-sumur baru makin sulit didapatkan kecuali diperairan berkedalaman, tapi membutuhkan investasi mahal. Sebagai barang bersifat *unrenewable*, mustahil kita akan bergantung pada minyak fosil selamanya. Konversi energi sangat dibutuhkan melalui pengurangan subsidi BBM secara gradual, kemudian melakukan *shifting* biaya subsidi BBM untuk kegiatan produktif. Biaya subsidi BBM yang besar akan berdampak terhadap minimnya belanja modal dan investasi, demikian juga transfer ke daerah.

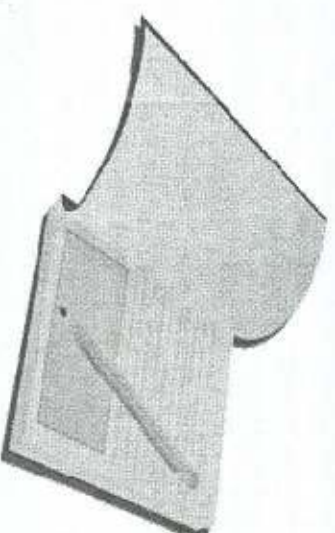
Terbatasnya investasi swasta di daerah jelas memberikan pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Pengeluaran pemerintah untuk belanja modal dan investasi menjadi tumpuan dari realokasi anggaran subsidi energi, separuhnya digunakan untuk pengembangan riset energi terbarukan. Selama ini alokasi dana riset di Indonesia hanya sekitar 0,1 persen terhadap PDB, kalah jauh dari negara-negara tetangga, Thailand 0,25 persen, Malaysia 0,6 persen dan Singapura 3 persen. Hasil riset untuk pengembangan energi terbarukan diyakini akan mengurangi ketergantungan energi fosil, dengan sendirinya akan mendorong kemandirian bangsa terhadap kebutuhan energi nasional.

Sejalan dengan itu, *shifting* pembiayaan subsidi BBM untuk kegiatan ekonomi produktif pasti akan memberikan dampak jangka panjang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan catatan, pemerintah serius melakukan perencanaan dan implementasi kebijakan pengembangan energi terbarukan, berbarengan dengan pembangunan infrastruktur di daerah untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur dapat menjamin kelangsungan usaha, biaya produksi memenuhi

scale of economic, maka logisnya produk yang dihasilkan harganya terjangkau.

Desain pengurangan subsidi BBM untuk jangka panjang sudah sangat mendesak dilakukan, tidak bisa lagi ditempuh cara sporadis. Masalah kenaikan BBM merupakan ranah ekonomi, tapi ia akan melibatkan *political games* sehingga menjadi masalah krusial. Partai-partai di luar pemerintahan akan memanfaatkan isu-isu kerakyatan, yang justru menyekatkan seunggulnya. Hambatan politik pengurangan subsidi BBM perlu diminimalisir dengan cara membangun konsensus politik bersama untuk menargetkan zero subsidi, misalnya 20 tahun kedepan. Kenaikan harga BBM secara gradual hingga tahun yang ditarget merupakan solusi jangka panjang.

Cara ini pula diharapkan dapat mengurangi tekanan politik, serta partai apapun tidak akan melakukan politisasi untuk membangun pencitraan dengan berbagai argumentasi *absurd*. Pengurangan subsidi selama ini dilakukan bersilat reaktif, tarik ulur antara pemerintah dan DPR pasti akan selalu muncul. Tidak mengherankan kemudian kebijakan kenaikan harga BBM akan selalu didahului kenaikan inflasi, setelah kenaikan harga BBM inflasi pun makin melonjak. Tidak salah jika kemudian disebut, kebijakan juga memerlukan momentum yang tepat. 



Paket Kebijakan Ekonomi, Efektifkah Menstabilkan Rupiah?

Relemahan rupiah bukan urusan pemerintah tapi itu urusan moneter, wilayah Bank Indonesia (BI).... Kutipan ini merupakan ungkapan yang disampaikan oleh Menko Perencanaan Hatta Rajasa beberapa waktu lalu, menanggapi polemahan rupiah. Beberapa tahun posisi rupiah berada dikisaran Rp. 9.000. - Rp. 9.500/US\$, namun dua bulan terakhir rupiah terus mengalami tekanan terhadap dollar. Dalam APBN-P 2013 rupiah dipatok 9.600/US\$, bahkan nilai tukar rupiah di pasar spot pada perdagangan intraday akhir pekan minggu pertama september sempat menyentuh level Rp 11.600 per dollar Amerika Serikat (AS).

Menanggapi kondisi mata uang yang kurang stabil, kelihatan seorang pejabat sekelas Menko Perencanaan yang semestinya bertanggung jawab dalam pengelolaan ekonomi mengungkapkan pernyataan tidak patut. Sekalipun ada kelanjutan kalimatnya bahwa pemerintah akan merespon melakukan antisipasi dengan berbagai resep kebijakan ekonomi. Tapi setidaknya rakyat dan saya secara pribadi akan berprasangka kurang elok, bahwa betapa seorang Menteri Perencanaan cenderung tidak paham permasalahan ekonomi dan menghindari

tanggungjawab jika ada masalah, sebaliknya akan mengklaim keberhasilan jika perekonomian maupun rupiah stabil.

Memburuknya perekonomian dalam negeri kerap kali juga dibarengi dengan eufimistik para pejabat berwenang yang cenderung menipu sesungguhnya, pejabat otoritas fiskal mendramatisasi bahwa seolah rupiah tidak sendirian melemah tapi mata uang negara lain juga mengalami kondisi serupa, dengan kata lain bukan rupiah yang melemah tapi dollar yang menguat.

Naik atau turunnya nilai rupiah memang merupakan wilayah moneter yang ditangani oleh Bank Indonesia, tapi penyebab melemahnya nilai rupiah bukan masalah moneter semata, banyak faktor, seperti: 1) inflasi yang tinggi, kenaikan BSM yang melewati momentum merupakan penyebab utama inflasi, karena penakikannya menjelang bulan puasa, hari raya dan liburan sekolah. 2) defisit neraca perdagangan yang terlalu besar, hampir semua kebutuhan domestik melalui impor, sehingga menguras cadangan devisa maupun kebutuhan mata uang asing meningkat. 3) utang swasta meningkat, waktu jatuh tempo makin mendekat yang membutuhkan banyak dollar, efeknya terhadap tekanan rupiah. 4) ekspor lebih mengandalkan komoditi, sementara barang-barang yang diimpor produk manufaktur memiliki nilai tambah untuk negara produsen, kebalikan dengan negara konsumen (domestik). Seiring dengan itu, otoritas moneter mengurangi intervensi untuk menjaga tergerusnya devisa, sehingga pelemahan rupiah terus terjadi. Dampaknya lebih jauh barang-barang material meningkat, dan akan kembali menciptakan sumber inflasi baru.

Boleh jadi pemerintah (Hatta Rajasa) tidak sadar bahwa serangkaian permasalahan tersebut merupakan wilayah pemerintah. Selain yang disebutkan diatas penyebab melemahnya nilai rupiah begitu banyak kesemuanya merupakan urusan langsung pemerintah. Intinya, pelemahan rupiah saat ini dominan sentimen negatif dalam negeri ketimbang global. Mengurangi defisit neraca berjalan, menekan angka inflasi, serta menahan keluarnya modal asing pekerjaan rumah yang harus segera

dibereskan pemerintah. Urusan domestik dengan memperjelas arah perekonomian akan mendorong rupiah menjadi perkara merupakan urusan fiskal yang berada dibawah kewenangan pemerintah.

Melemahnya nilai rupiah otoritas moneter dan fiskal harus sejalan, tidak boleh terjadi *decoupling* satu sama lain. Masalah moneter dan pasar uang seringkali bermain pada wilayah efek psikologi yang menimbulkan sentimen negatif, sementara permasalahan fiskal cenderung rasional (*rational expectation*), semua pelaku ekonomi bertindak secara rasional dapat mengetahui permasalahan ekonomi hingga kedepan, termasuk arah dan kebijakan perekonomian dari pemerintah.

Pada sisi ini, bank sentral patut diberikan apresiasi dengan membuat amunisi baru untuk menguatkan rupiah dengan merilis sejumlah beleid baru soal operasi moneter dan pembelian valas, diantaranya BI mengeluarkan kebijakan sertifikat deposito Bank Indonesia (SDBI). Surat berharga dalam rupiah ini berjangka waktu 12 bulan. Selain itu, BI melakukan penyempurnaan aturan mengenai pembelian valas untuk kegiatan ekspor barang dan jasa. Salah satu poinnya, pembelian valas hanya dapat dilakukan oleh eksportir yang telah menjual valas atas hasil ekspor mereka. Jangka waktu term deposit valas juga mengalami perubahan dari semula tujuh hari, 14 hari dan 28 hari menjadi satu hari sampai dengan 12 bulan. Kebijakan BI tersebut diperkirakan bisa menambah likuiditas dollar AS di dalam negeri.

Lain	halnya
kebijakan	fiskal
efektifitasnya	masih
diragukan	untuk
menguatkan nilai rupiah	dalam jangka pendek.
Paket	kebijakan
pemerintah	yang
dikeluarkan antara lain; 1)	perbaikan neraca transaksi
berjalan dan menjaga nilai	



tukar rupiah. 2) pemberian insentif dengan menghapus pajak barang mewah beberapa produk, pembebasan PPN dan pengurangan PPh untuk industri tertentu. 3) Menjaga daya beli masyarakat dan menjaga tingkat inflasi, dan 4) Percepatan investasi.

Sepanjang penyebab pelemahan rupiah tidak dilakukan perbaikan secara fundamental rupiah masih akan sulit didongkrak, sementara penguatan fundamental ekonomi bersiat *long term*. Defisit nearca transaksi bukan masalah yang baru muncul, tapi masalah klasik karena ketergantungan impor hampir semua komoditi begitu tinggi. Impor menjadi resep yang gampang karena instan untuk menjaga kebutuhan domestik, perbaikan produksi dalam negeri masih saja bertukar pada perencanaan. Effirmasi aksinya sangat lemah, contohnya harga kedelai yang meroket saat ini karena terjadi kelangkaan, menstabilkannya dipastikan Bulog akan mengimpor kedelai sebanyak 100,000 ton dari USA.

Selain itu, pemberian insentif dengan menghapus pajak barang mewah beberapa jenis produk ditengarai tidak akan memberikan efek terlalu besar untuk *short term*. Permasalahannya jenis produk yang dihapus pajaknya pada dasarnya bukan lagi barang mewah (*luxury goods*), seperti peralatan rumah tangga dengan harga Rp. 5 juta atau Rp. 10 juta, pesawat penerima siaran televisi dengan harga dan ukuran di bawah Rp.10 juta dan 40 inci, lemari pendingin (kulkas) di bawah Rp. 10 juta, mesin pengatur suhu udara (AC) di bawah Rp8 juta, pemanas air dan mesin cuci di bawah Rp. 5 juta, proyektor dan produk saniter di bawah Rp. 10 juta.

Pelembahan rupiah yang terjadi saat ini dengan mengandalkan produk impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat inflasi tetap akan tinggi. Apalagi harga minyak mentah dunia terus bergerak naik, dalam APBN-P 2013 harga minyak mentah dipatok sebesar US\$ 108/barel sekarang sudah naik dikisaran US\$ 110. Sejumlah industri dan perusahaan yang memiliki komponen biaya minyak dalam fungsi produksi akan mengalami lonjakan ongkos produksi. Adanya kenaikan ongkos

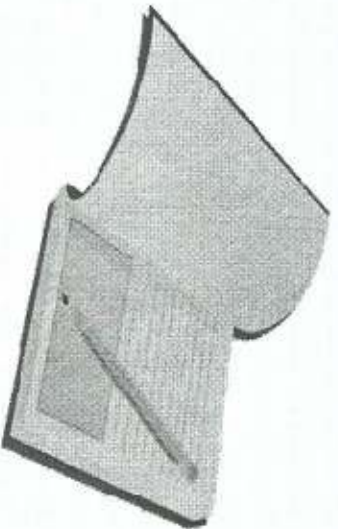
produksi berdampak terhadap kenaikan harga-harga barang, efeknya terhadap kemampuan daya beli masyarakat tergerus, itu artinya inflasi bukannya menurun.

Sementara masalah investasi, bukan hanya masalah insentif dan disinsentif. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga seringkali menjadi hambatan yang serius, termasuk masalah kelembagaan, infrastruktur dan keamanan. Pembenahan hambatan investasi tersebut membutuhkan waktu yang lama. Dari sisi perbankan, bunga pinjaman dalam negeri dianggap masih terlalu tinggi sedangkan bunga deposito terlalu rendah. Melemahnya nilai rupiah terhadap dollar menjadi masalah baru terhadap kegiatan investasi, pelaku usaha tidak memiliki alternatif sumber pinjaman. Suku bunga pinjaman dalam negeri tinggi, sementara suku bunga luar negeri relatif rendah akan tetapi rupiah terdepresiasi. Apalagi salah satu sumber pelemahan rupiah karena banyaknya utang swasta yang akan jatuh tempo. Maka dari itu, paket kebijakan ekonomi yang dirilis pemerintah cukup baik tapi efeknya jangka panjang, sementara pelemahan rupiah membutuhkan penanganan jangka pendek karena berdampak luas. Itu artinya Menko Perencanaan belum melakukan diagnostik penyakit perekonomian secara komprehensif sebelum berucap, seorang pejabat berwenang ucapan adalah "kebijakan". 





BAGIAN KEEMPAT:
JEJAK LANGKAH ARAH
PEREKONOMIAN INDONESIA



APBN Tidak Sehat, Elit Politik Menghindari Resiko

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan wajah perekonomian dalam satu tahun kedepan. Nilai satuan dalam APBN bukan sekedar neraca keuangan negara, namun menggambarkan orientasi perencanaan pembangunan dan politik anggaran yang di dalamnya memperlihatkan *leadership* pemerintahan. Selama ini ulasan mengenai politik anggaran lebih banyak melihat pada sisi komponen pembiayaan dengan membandingkan belanja rutin dan belanja pembangunan. Banyak pihak menyroti belanja rutin lebih besar ketimbang belanja pembangunan, idealnya memang dibalik. Namun banyak yang lupa bahwa besar kecilnya belanja rutin (belanja tidak langsung) dan belanja pembangunan (belanja langsung) hanya merupakan implikasi dari keputusan para elit politik yang cenderung menyusun draft APBN cari selamat, ketimbang menyusun APBN yang *sustainable* dan sehat, namun memiliki resiko politik dan agresi sosial dari publik.

Dalam kurun lima tahun terakhir, Belanja Negara di atas Rp. 1.000 triliun, tapi lebih dari separuh dialokasikan untuk membayar utang, subsidi dan belanja pegawai. Postur anggaran yang demikian memperlihatkan ketidakefisienan dan tidak produktif. Dalam APBN-P 2012, anggaran terbesar masih pada

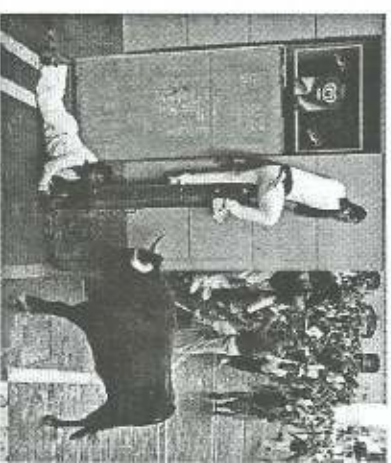
belanja rutin pemerintah sebesar Rp. 724 triliun, belanja pegawai sendiri sebesar Rp. 212 triliun, subsidi energi sebesar Rp. 137 triliun dan belanja barang sebesar Rp. 186 triliun. Sementara belanja modal hanya Rp. 168 triliun atau 10,9 persen dari total belanja negara.

Publik berharap bahwa APBN 2013 yang baru disahkan pemerintah bersama DPR postur APBN akan mengalami perbaikan secara signifikan, anggaran lebih berpihak kepada publik. Pada kenyataannya APBN 2013 secara nominal mengalami peningkatan dari Rp. 1.439 triliun tahun 2012 naik menjadi Rp.

1.683 triliun, namun APBN 2013 masih lebih banyak berpihak pada kepentingan birokrasi, pembayaran utang dan subsidi energi ketimbang kepentingan publik. Belanja pemerintah pusat sendiri sebesar Rp. 1.154 triliun dan transfer ke daerah Rp. 528 triliun.

Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai malahan naik sebesar Rp. 241 triliun, belanja barang Rp. 167 triliun, subsidi energi Rp. 193 triliun dan pembayaran bunga utang Rp. 113 triliun. Sementara belanja modal hanya sebesar Rp. 216 triliun. Dana transfer kedaerah keadaanya tidak jauh berbeda, sebagian besar merupakan Dana Alokasi Umum pada realitasnya lebih dari 70 persen untuk membayar gaji pegawai, itu artinya dana yang di daerahkan juga lebih banyak melayani kepentingan birokrasi.

Dengan demikian postur anggaran kelihatan gemuk akan tetapi kurang produktif dan tidak efisien menciptakan stimulasi ekonomi. Postur APBN yang tidak sehat ini bukannya tanpa disadari oleh pemerintah, akan tetapi realitas politik berkehendak lain. Politik anggaran bukan hanya diputuskan oleh pemerintah



sendiri akan tetapi secara konstitusional mesti melibatkan DPR yang memiliki hak *budgeting*. Sebagai sebuah lembaga politik, anggaran yang disusun harus mengakomodasi kepentingan politik mereka yang ada di legislatif, meski sesungguhnya juga mereka tahu bahwa APBN kita tidak sehat.

Dalam menetapkan asumsi-asumsi makro ekonomi sudah dapat dipastikan jalan pikiran pemerintah dan DPR selalu berseberangan, landasan pemikiran pemerintah selalu didahului simulasi kebijakan sementara secara umum DPR hanya mengandalkan intuisi dan asumsi semata dengan berbagai argumentasi politik. Penetapan APBN sudah pasti dilakukan secara bersama-sama, akan tetapi resiko APBN yang muncul maupun melesehnya asumsi makroekonomi seringkali DPR melempar tanggung-jawab semata ke pemerintah.

UU APBN 2012 memberikan isyarat kepada pemerintah agar dapat menyesuaikan besaran subsidi, terutama subsidi energi. Namun yang terjadi, ketika pemerintah akan melakukan penyesuaian harga BBM, reaksi publik negatif, DPR pun baik pihak oposisi maupun pendukung koalisi ramai-ramai berbalik menolak penyesuaian harga BBM padahal mereka turut serta mensahkan UU APBN. Tahun anggaran 2013, UU APBN Pasal 8 Ayat 10 secara tegas memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga energi apabila asumsi makro ataupun parameter yang ada di APBN terjadi perubahan.

Tapi percaya saja, upaya penyesuaian harga BBM dan mengurangi subsidi energi akan mendapatkan penolakan dari publik, mudah ditebak fraksi-fraksi di DPR akan ikut serta ramai-ramai menolak sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Apalagi *leadership* pemerintahan dalam mengelola koalisi pemerintahan begitu lemah, berbagai kebijakan yang strategis dan tidak populis banyak dimentahkan oleh pendukung koalisi pemerintah sendiri.

Oleh karena itu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah harus dapat dijalankan dengan tegas, sebab masalah subsidi sudah menjadi masalah yang krusial dalam APBN setiap

tahunnya semenjak dahulu, bahkan siapapun dan partai apapun penguasannya akan mengalami hal serupa, kecenderungan subsidi akan dikurangi, terutama subsidi energi. Porsi subsidi dalam APBN 2013 mencapai 18,8 persen dari total belanja negara atau senilai Rp. 317,2 triliun. Subsidi itu terdiri dari subsidi BB Rp. 193,8 triliun, subsidi listrik Rp. 80,9 triliun, dan subsidi non energi Rp. 42,5 triliun.

Namun masalahnya subsidi BBM dan listrik lebih banyak dinikmati oleh orang yang tak berhak disubsidi. Akan tetapi perbaikan postur APBN tetap diperlukan, subsidi energi yang lebih banyak dinikmati oleh orang yang tak berhak harus dikurangi, sembari memperbaiki pengelolaan energi nasional yang selama ini lebih banyak melayani kebutuhan asing ketimbang kebutuhan domestik. Subsidi non energi yang patut dipertimbangkan seperti subsidi pangan, transportasi, pupuk dan subsidi lainnya yang banyak dinikmati oleh masyarakat *decile* bawah.

Dengan kata lain diversifikasi subsidi mutlak dilakukan diluar itu program-program dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur tidak bersifat dokumentatif semata, perlu direalisasikan melalui kebijakan afirmatif yang pendanaannya didukung dengan pengurangan belanja birokrasi, subsidi yang tidak tepat sasaran maupun pembayaran utang.

Anggaran pembangunan infrastruktur pada APBN 2013 justru di bawah anggaran subsidi BBM, hanya sebesar Rp. 11 triliun. *Political will* memperbesar anggaran pembangunan infrastruktur sudah ada dengan hendak mengurangi subsidi, tetapi *political action* yang belum berjalan, sebab kelemahan utama rezim pemerintahan sekarang ini implementasi kebijakan yang kurang. Belum lagi sudah menjadi ciri khas dan karakter kepemimpinan nasional cenderung akomodatif terhadap kepentingan politik praktis ketimbang menempuh kebijakan yang penuh resiko politik dan sosial karena memang tidak populis, akan tetapi memberikan dampak perbaikan secara fundamental dalam jangka panjang.

Pengurangan subsidi, dengan kata lain menaikkan harga

BBM maupun tarif listrik pasti akan menimbulkan reaksi publik, dipastikan pemerintah dan partai pendukungnya kena imbas dengan kemungkinan popularitas akan menurun. Apalagi menjelang Pemilu 2014, partai-partai pasti akan cari selamat sendiri-sendiri dengan menghindari resiko politik karena itu peningkatan subsidi yang tidak tepat sasaran tidak akan dipersalahkan oleh mereka.

Untuk menciptakan postur APBN yang *sustainable* dan sehat diperlukan *leadership* pemerintah yang kuat, mau menanggung resiko dan bertanggung jawab. Periode pemerintahan sebelumnya kita masih punya pemimpin yang mau pasang badan dan siap menanggung resiko. Lima kali terjadi penyesuaian harga BBM dan dilakukan konvergensi energi atas prakarsa seorang Wakil Presiden, namun menjelang Pemilu 2009 harga BBM diturunkan dengan inisiatif penuh dari Presiden tanpa perlu pertimbangan yang lama. Akhirnya mudah diebak, penurunan harga BBM untuk pencitraan, dalam iklan kampanye masih teringat dalam memori saya, --- sepanjang sejarah, baru kali ini harga BBM diturunkan ---. Tapi mereka tidak menyadari akan menjadi perangkap bagi kemenangan Pemilu, menaikkan subsidi salah, menurunkan salah. Akhirnya maju kena, mundur kena. □



Peringkat Utang Indonesia Menurun, Apa Dampaknya?

R engelolaan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah pada dasarnya untuk membenahi aspek penerimaan (*revenue*) dan pengeluaran (*expenditure*). Namun tulisan ini dimaksudkan lebih memperkuat analisis dari sisi *expenditure*. Masalah manajemen pengeluaran pemerintah perlu dicermati karena mengangkat kendala anggaran untuk pembiayaan pemerintah. Rezim anggaran yang dianut saat ini adalah rezim defisit, walau secara normatif defisit anggaran dimungkinkan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui instrumen pembiayaan pembangunan. Akan tetapi defisit anggaran ada ambang batas toleransi sebesar 3 persen terhadap PDB, batas toleransi tersebut musti dijaga untuk menstabilisasi anggaran.

Konsekuensi dari munculnya defisit maka diperlukan sumber pembiayaan, diantaranya melalui a) Pajak, b). Pinjaman atau utang, c) Pencetakan uang (*seigniorage*), dan d) Penjualan asset pemerintah (privatisasi). Dari keempat sumber pembiayaan defisit, yang paling krusial adalah pinjaman (utang), baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri (obligasi). Pada awal perkembangannya utang pemerintah seringkali hanya digunakan sebagai pelengkap untuk menutupi defisit anggaran. Seiring meningkatnya pembiayaan pembangunan mengakibatkan terjadi

pergeseran peranan dari semula sebagai pelengkap menjadi sumber utama pembiayaan.



Pada tahun 1980-an proporsi pembiayaan defisit APBN masih didominasi non utang, mulai tahun 1990-an hingga saat ini justru bersumber dari utang. Persentase pembiayaan defisit APBN dengan utang tahun 1980 sebesar 35 persen, tahun 1990 sebesar 82,3 persen dan tahun 2011 sebesar 83,1 persen. Pergeseran peranan utang mengakibatkan akumulasi stok utang makin meningkat setiap tahun hingga mendekati Rp. 2.000 triliun pada tahun 2013. Pergeseran itu pula mengindikasikan bahwa ketergantungan pemerintah terhadap utang untuk membiayai defisit anggaran makin tinggi.

Walaupun terblang proporsi utang luar negeri trendnya makin menurun seiring peningkatan utang domestik. Kedua sumber utang tersebut memiliki plus minus, utang luar negeri baik bilateral maupun multilateral relatif ada keleluasaan melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*) pembayaran pokok dibandingkan dengan utang dalam negeri yang harus diselesaikan apabila jatuh tempo. Akan tetapi utang luar negeri, peminjam menggunakan sistem asistensi dan kecenderungan melakukan intervensi sangat terbuka. Kedaulatan negara sangat riskan, karena agenda negara donor turut serta dijalankan oleh negara penerima donor (pengutang). Oleh karena itu pemerintah secara perlahan makin mengurangi proporsi utang luar negeri, kendati nominalnya masih tinggi.

Posisi utang luar negeri jika dilihat dari perkembangannya dari tahun 2005 sampai dengan 2011, secara nominal meningkat sebesar USD 90,3 miliar (67,1 persen). Peningkatan terjadi baik pada utang luar negeri pemerintah maupun swasta. Namun

demikian, pada periode yang sama peningkatan utang luar negeri tersebut diikuti peningkatan PDB (harga berlaku) yang relatif lebih besar yaitu sebesar USD 536,8 miliar (190,2 persen). Peningkatan PDB akan cenderung mendorong hasrat pemerintah melakukan penarikan utang baru, karena utang secara umum dihitung berdasarkan rasio PDB. Pada akhirnya pemerintah punya alasan kuat memperbesar defisit anggaran setiap tahun.

Konsekuensinya, pembayaran cicilan bunga utang dan pokok akan memberatkan anggaran setiap tahun. Realisasi APBN 2012 untuk pembayaran bunga utang sebesar Rp. 122,2 triliun, diantaranya bunga utang dalam negeri Rp. 88,5 triliun dan bunga utang luar negeri sebesar Rp. 33,7 triliun. Dengan komposisi itu menunjukkan bahwa pemerintah sudah lebih cenderung mengandalkan pembiayaan defisit melalui utang dalam negeri. Dalam APBN 2013, penarikan utang baru berjumlah Rp 230,2 triliun melalui penerbitan Surat Berharga Negara (netto) Rp 177,3 triliun, pinjaman luar negeri sebesar Rp 45,9 triliun, dan penerus pinjaman luar negeri sebesar Rp 6,97 triliun. Jumlah penarikan utang di tahun 2013 meningkat 3,7 persen dari anggaran tahun 2012 yang sebesar Rp 221,8 triliun.

Peningkatan volume penarikan utang pemerintah, selain disebabkan masih tingginya ketergantungan terhadap utang untuk membiayai defisit anggaran. Juga karena terjadi peningkatan beban pembayaran utang dan jatuh tempo utang-utang lama yang ditutupi melalui penarikan utang baru. Dengan kondisi utang seperti itu, tetap mengkuatirkan. Profil utang pemerintah dan waktu jatuh temponya menunjukkan secara nominal beban tersebut cenderung tidak akan menurun signifikan. Jika terjadi goncangan dan *shock* ekonomi domestik akan memperparah beban utang pemerintah sehingga akan menyulitkan perekonomian, atau akan mengganggu *fiscal sustainability*.

Apa Pengaruhnya Jika Peringkat Utang Naik atau Turun?

Peringkat utang naik dimaksudkan adalah kemampuan

anggaran untuk membayar utang lebih besar karena pembiayaan sektor produktif dalam APBN cenderung meningkat. Sebaliknya, peringkat utang menurun karena kondisi anggaran yang kurang sehat lebih banyak dialokasikan untuk pembiayaan subsidi (non produktif). Peringkat utang Indonesia ada kecenderungan naik turun sebagai dampak dari politik anggaran pemerintah yang dijalankan setiap tahun. Dua tahun terakhir (2011 – 2012), peringkat utang Indonesia berada pada posisi BBB- (*Positive Outlook*), peringkat tersebut dapat memberikan dampak terhadap menurunnya pembiayaan pinjaman, terutama hasil imbal surat utang negara yang membebani APBN.

Dengan demikian akan memperkuat likuiditas dan cadangan devisa, sehingga biasanya arus modal asing akan cenderung meningkat baik dana jangka pendek maupun dana jangka panjang. Peringkat utang yang positif di tahun 2013 mengalami penurunan dari posisi 'BBB-' *positive outlook* ke posisi 'BB+' *stable outlook* sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga peringkat Standard and Poor's (S & P).

Peringkat tersebut berdampak terhadap *investment grade rating*, dengan kata lain Indonesia relatif makin menjauh dari peringkat *investment grade*. Penurunan peringkat utang, pihak asing memandang Indonesia sebagai negara yang dianggap "bermasalah" perekonomiannya yang kemungkinan kurang menguntungkan. Artinya, saat ini komunitas internasional menganggap Indonesia termasuk negara kurang kompetitif di bidang investasi.

Menurunnya peringkat utang Indonesia membawa sentimen negatif dimana minat investor untuk membeli aset-aset Indonesia, khususnya instrumen keuangan dan obligasi pemerintah menurun. Selain itu penurunan peringkat utang membuat posisi Indonesia makin berat dalam bersaing dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN untuk meraih dana asing. Pada saat yang bersamaan S & P justru meningkatkan peringkat Filipina dari 'BB+' menjadi 'BBB-' *positive outlook*.

Akan mudah ditebak penurunan peringkat utang Indonesia juga beresces terhadap makro ekonomi. BPS mencatat

di kuartal pertama 2013 pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 6,02 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2012 sebesar 6,3 persen. Selain itu, BPS juga mencatat bahwa ekspor menurun dan pembentukan modal tetap bruto yang juga turun. Dengan kondisi seperti itu, langkah yang harus dilakukan pemerintah menyiapkan paket kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terutama pada triwulan II. Kelambanan keputusan untuk mengurangi subsidi BBM diengarai salah satu faktor penurunan *rating*, karena membebani APBN.

Sikap maju-mundur mengakibatkan pergeseran waktu untuk menaikkan harga BBM, dan kemungkinannya akan makin memberatkan masyarakat karena akan menghadapi liburan sekolah, puasa dan lebaran yang secara bersamaan akan menyumbang inflasi. Upaya untuk mengurangi subsidi BBM yang berdekatan dengan waktu tersebut mengakibatkan inflasi lebih tinggi, maka sudah barang tentu berdampak terhadap kinerja makro ekonomi (pertumbuhan). Rencana paket kebijakan pemerintah yang disiapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, selayaknya dibenahi masalah masalah klasik, seperti perbaikan infrastruktur, koordinasi pemerintah pusat dan daerah masalah kemudahan berinvestasi, keamanan dan kepastian hukum. Disamping itu, memperbesar belanja modal dan belanja pembangunan terutama di Kawasan Timur Indonesia, karena swasta masih cenderung berinvestasi di kawasan yang relatif mapan.

Pemerintah menyadari penurunan peringkat utang itu terkait dengan kebijakan anggaran, salah satu diantaranya masalah subsidi BBM yang makin besar. Namun sikap pemerintah tidak saja terkesan hati-hati akan tetapi lebih dipandang sebagai sikap inkonsisten, sikap tersebut menggambarkan pemerintah akan bimbang. Walau pihak mereka menanggapi bukan bimbang akan tetapi memikikan secara matang, terutama masalah inflasi yang akan berdampak terhadap bertambahnya masyarakat miskin.

Namun harus disadari bahwa masalah inflasi, kenaikan harga BBM hanya salah satu faktor pendorong, lambatnya

keputusan atau minimnya antisipasi kebijakan juga dapat menciptakan inflasi. Kebijakan tata niaga daging, bawang putih dan bawang merah yang amburadul membuktikan menjadi pemicu inflasi di bulan maret – april. Dengan demikian makin meyakinkan kita bahwa sumber inflasi juga sangat terkait dengan sikap pemerintah yang lambat.

Kebijakan subsidi energi yang tinggi sudah barang tentu sebuah masalah, beban APBN makin berat, akan tetapi saya berkeyakinan berubah-ubahnya sikap pemerintah bukan *economic pure* semata. Hanya pemerintah yang berpandangan adanya sikap inkonsistensi mereka karena murni ekonomi semata, merunut sejarah kenaikan harga BBM, misalnya tahun 2005 kenaikannya sangat signifikan, meski disadari periode tersebut menciptakan *shock* ekonomi tapi bersifat *short term*. Pada tahun 2008 juga dilakukan kenaikan, namun menjelang Pemilu 2009 diturunkan, dengan pola seperti itu sulit untuk dipercaya bahwa kebijakan subsidi BBM *pure economic*. Saya lebih percaya pertimbangan politikal yang dominan dibalik itu semua.!! ?.



Perekonomian Stabil: Peringkat IPM Turun dan Biaya Saling Melorot

risis keuangan di USA dan krisis utang Zona Euro membuka peluang besar bagi kawasan Asia memainkan peran dalam dinamika perekonomian Global. Selama ini lebih dari separuh perekonomian dunia dikuasai oleh dua kawasan tersebut, sekaligus menjadi tujuan pasar dunia. Munculnya krisis keuangan sebagai dampak dari menumpuknya utang-utang publik di Zona Euro.

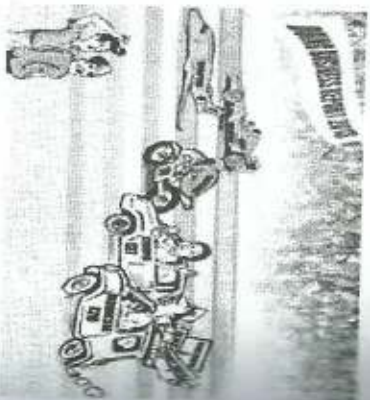
Atas krisis itu, tiga negara di Asia diantaranya China, India dan Indonesia dapat memanfaatkan “kekosongan” ini dengan memperkuat ekonomi domestik, sebab pangsa pasar jika digabung ketiganya hampir mencapai 50 % pangsa pasar dunia. Artinya, pangsa pasar ini sekaligus punya peluang dapat menjadi kekuatan perekonomian domestik dimasing-masing negara sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan (*demand side*).

Bahkan Indonesia *opportunity*-nya lebih besar karena setidaknya memiliki beberapa kekuatan, yakni: a. aspek demografi, rata-rata usia produktif masyarakat Indonesia begitu banyak, sekaligus potensi pasar, b. Kekayaan sumberdaya alam

yang besar, belum dioptimalkan pengelolannya, c. Negara yang majemuk, sudah menjalankan demokrasi yang relatif baik dibandingkan dengan Tiongkok, dan d. Tumbuhnya *true* bagi pelaku usaha dari luar, sehingga *capital inflow* makin deras karena kestabilan makro ekonomi dan politik relatif terjaga.

Diengah krisis finansial di USA dan Zona Euro, dipastikan banyak *hot money* mengendus negara-negara yang dianggap aman dari krisis, sekaligus atraktif. Kriteria itu ada pada China dan India, tapi kedua negara ini pertumbuhannya sudah cukup tinggi bahkan sudah panas kemungkinannya akan melambat. Karena itu momentum ini perlu dimanfaatkan oleh Indonesia, sebab dampak krisis relatif kecil, arah mata angin investasi menuju ke Indonesia. Pasar domestik perlu dioptimalkan.

Meski demikian perlu diwaspadai karena namanya *hot money*, besar kemungkinan *capital inflow* begitu deras, keluarnya (*capital flight*) juga mudah terjadi. Apalagi selama ini investasi yang masuk ke Indonesia lebih banyak pada sektor keuangan (portofolio) karena suku bunga begitu tinggi, cenderung investor asing melakukan *capital gain* dalam jangka pendek. Sekalipun USA melakukan hal yang sama, namun para investor lebih menghindar dari USA karena nilai portofolio relatif kecil, lembaga keuangan terus-terus di-supply.



Dalam kondisi seperti itu, pertumbuhan ekonomi boleh saja tinggi tapi cenderung tidak berkualitas, Triwulan III 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,5 %. Nilai pertumbuhan yang tinggi menyisakan berbagai pertanyaan. Jika dikaji lebih jauh kedalam, memperlihatkan bahwa perekonomian digerakkan oleh sedikit perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja yang tersepat sangat kecil, karena sebagian dikuasai oleh perusahaan yang *nontradable*, atau sektor finansial.

Dengan melihat kecenderungan pertumbuhan ekonomi seperti itu, ditambah derasnya arus modal asing, masuk ke Indonesia saat ini, utamannya di pasar modal belum dimanfaatkan dengan baik oleh korporasi BUMN sebagai salah satu penghela ekonomi nasional. Demikian halnya aksi korporasi swasta, melewatkan momentum krisis Eropa. Akibatnya nilai tambah ke sektor riil sangat minim. Ratusan BUMN yang ada hingga saat ini belum sampai 20-an yang *listing* di BEI untuk memanfaatkan modal asing.

Walau dari sisi lain hasil survey *finance corporation* menempatkan daya saing usaha Indonesia berada pada urutan 124 dari 129 negara yang disurvei. Dengan daya saing yang rendah, asumsinya korporasi BUMN dan swasta lebih baik memanfaatkan *capital inflow* yang ada. Lain halnya jika investasi dalam bentuk penanaman modal langsung disektor riil, atau kegiatan produktif yang bersifat *labor intensive*, variabel pendukung daya tarik investasi menjadi pertimbangan penting untuk berinvestasi. Jadi sekalipun Indonesia memiliki potensi, ekonomi makro yang stabil, usia penduduk produktif yang besar, tapi itu semua belum cukup karena digrogoti oleh negara itu sendiri, birokrasi masih cenderung mengganggu.

Kedua variabel tersebut masih menjadi "barikade" bagi Indonesia sehingga daya saing menurun. Jika di bandingkan Thailand dan Malaysia kedua negara ini proses memulai usaha cukup dilakukan masing-masing 3 dan 6 hari, sedangkan Indonesia masih berkisar 2 bulan (60 hari). Peringkat Indonesia melorot juga diakibatkan faktor daya dukung infrastruktur yang masih minim, terutama di daerah. Problema utama pola daya tarik investasi selama ini sekalipun pemerintah pusat terus membenahi, akan tetapi daerah masih saja bermasalah. Sinkronisasi masih belum berjalan maksimal. Infrastruktur dasar, seperti jalan yang menjadi bagian kewenangan daerah hampir semua rusak, akibatnya ongkos angkutan barang dan jasa menjadi besar.

Pada level nasional, insentif pemerintah kemungkinan ada tapi di daerah malah sebaliknya (disintensif). Masalah utama yang dihadapi daerah sehingga terkendala dalam pembangunan

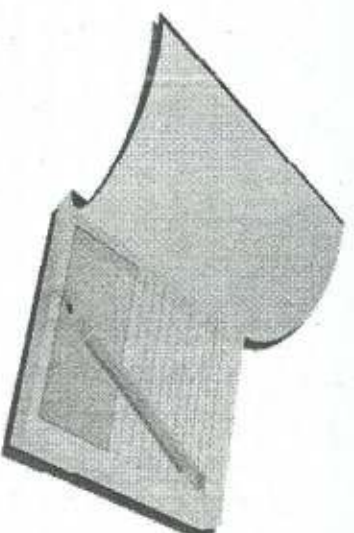
infrastruktur, tidak lain terbatasnya anggaran. Sebetulnya anggaran bukan tidak ada, tapi sangat terbatas untuk dialokasikan ke belanja modal dan barang, karena hampir 80 % alokasi APBD terserap kebelanja tidak langsung (belanja pegawai).

Satu-satunya cara yang dilakukan Pemda untuk membangun infrastruktur selalu menengadahkan tangan ke pusat untuk meminta bantuan pembiayaan pembangunan, maupun perbaikan infrastruktur. APBD yang sakit seperti Pemda Pemda belum berupaya maksimal untuk menyehatkan, mereka tetap cenderung memperbesar belanja tidak langsung. Kondisi ini turut memperparah merosotnya daya tarik investasi di Indonesia karena minimnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Paradoks ekonomi lain yang perlu dicermati, hampir semua asumsi makro ekonomi tercapai sesuai target, itu artinya perekonomian Indonesia sangat stabil, dan terus tumbuh. Hal ini terbuka peluang untuk diinterpretasikan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya memberikan dampak yang baik terhadap kesejahteraan rakyat, tapi ada pemandangan lain yang terlihat seperti IPM Indonesia turun dari peringkat 108 pada tahun 2010 turun pada posisi 124 tahun ini.

Mengukur IPM setidaknya dilihat dari aspek kinerja pendidikan dan derajat kesehatan. Kinerja pendidikan cenderung membaik setiap tahunnya karena alokasi anggaran terus naik, ada kemungkinan turunya IPM karena faktor munculnya berbagai macam gangguan kesehatan, atau merebaknya berbagai penyakit menular. Kendati anggaran di sektor kesehatan pada dasarnya juga terus diperbesar, tapi anggaran bukan faktor dominan satu-satunya untuk memperbaiki keadaan. Jauh lebih penting komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan bangsa, mulai dari pusat hingga ke daerah.

Dengan cara itu, paradoks-paradoks perekonomian Indonesia (termasuk daerah) tidak mengelayut setiap saat, ekonomi tumbuh tapi indeks pembangunan manusia turun, daya saing melorot pula. Itu artinya pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas dan justru menyisakan berbagai persoalan baru, dan kemungkinannya distribusi pendapatan antar penduduk masih sangat timpang. □



Jangan Bangga Dengan Capaian Target Pertumbuhan Ekonomi



adan Pusat Statistik (BPS) sudah melansir kinerja ekonomi tahun 2011, indikator makro ekonomi yang kerap ditonjolkan sebagai capaian keberhasilan kinerja perekonomian salah satunya pertumbuhan PDB. Dalam APBN 2011 asumsi pertumbuhan yang dipatok dikisaran 6,4 – 6,5 %, pada akhirnya memang perekonomian Indonesia di tahun 2011 tumbuh sebesar 6,5% dengan nilai PDB mencapai Rp 7.427 triliun, tertinggi atau kondisi perekonomian terkuat setelah krisis ekonomi tahun 1998.

Akselerasi kinerja pertumbuhan sebesar itu secara otomatis mendorong peningkatan pendapatan perkapita. BPS mencatat, pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 30,8 juta atau USD 3.542,9. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2010), nilainya meningkat sebesar Rp. 27,1 juta (USD 3.010,1).

Deretan angka-angka di atas dengan terang memberikan pesan bahwa perekonomian Indonesia makin maju, apalagi capaian kinerja ekonomi sepanjang tahun 2001 diperhadapkan pada ketidakpastian perekonomian Eropa, karena

itu capaian ini diapresiasi banyak pihak, dan seperti biasanya pihak pemerintahpun akan bangga. Sementara lagi partai akan ikut serta mengklaim keberhasilan kadernya yang duduk dikementerian ekonomi. Meski demikian kita patut hati-hati dan mencermati peningkatan PDB, karena itu bukan alat ukur satu-satunya untuk melihat kesejahteraan masyarakat di suatu negara.

Dengan mengandalkan nilai PDB semata terbuka peluang penafsiran bahwa pemerintah lewat BPS berbohong, bagaimana mungkin pendapatan perkapita secara nominal naik tapi realitasnya rakyat begitu banyak yang masih susah. Namun yang jelas, BPS dalam menghitung pendapatan perkapita sudah melewati tahap analisis ilmiah, artinya angka-angka yang dilansir oleh BPS (pemerintah) tidak salah, justru penggunaan PDB menjadi bagian yang bermasalah seperti diungkapkan oleh Stiglitz, Sen dan Fitoussi (2010), bahwa PDB bukan tolak ukur satu-satunya yang tepat untuk menilai kemajuan.

Tulisan ini tidak ingin terjebak pada perdebatan konsepsi penggunaan PDB untuk mengukur kesejahteraan, namun lebih melihat pada sisi teknis angka-angka yang justru lebih memperjelas bahwa betapa pertumbuhan ekonomi menyisakan problem tersendiri yang justru mempertontonkan paradox. *Pertama*, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh konsumsi masyarakat yang memberikan kontribusi hingga 54,6 %. Sementara peranan investasi hanya berkontribusi sebesar 32 % terhadap PDB, meski harus diakui donasi investasi mengalami peningkatan. *Kedua*, ketimpangan masih sangat mencolok baik secara sektoral maupun spasial.

Secara sektoral, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 10,7 %, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,2 % dan sektor keuangan sebesar 6,8 %. Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2011 belum memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan, serta utilitas penyerapan tenaga kerja masih rendah, sebab sektor-sektor dominan tersebut merupakan sektor *nontradable*. Apalagi pertumbuhan angka kerja setiap tahun 2,91 juta orang, dan

pertumbuhan lapangan kerja tersedia hanya 1,6 juta orang, jadi disparitasnya cukup tinggi.

Kalaupun pendapatan per kapita meningkat hanya segelintir orang yang menikmati, sederhanaanya bisa disebutkan yang kaya makin kaya, yang miskin tidak beranjak jauh dari kehidupannya semula, sebab pendapatan golongan ekonom menengah bawah hanya meningkat 2,75%, sementara golongan menengah tumbuh 6,62%. Apalagi jika diperlihatkan dari kecenderungan kontribusi sektor pertanian kecil hanya sebesar 3,0 %, dan sektor industri pengolahan 6,2 %, sementara kedua sektor ini diharapkan tumbuh optimal karena sektor-sektor tersebut menyerap tenaga kerja banyak, pertanian sekitar 40 % dan manufaktur sekitar 20 % menyerap tenaga kerja. Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian makin mempertegas kecenderungan daerah perdesaan makin tertinggal, karena orang miskin lebih banyak di daerah rural ketimbang dipertokoan. *Idealnya*, output ekonomi tumbuh berbarengan dengan penurunan angka kemiskinan yang cepat.

Sementara

ketimpangan secara spasial terlihat dengan mencolok, 57,6% ekonomi Indonesia dikuasai pulau Jawa, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 23,6 %, Pulau Kalimantan 9,7%, Pulau Sulawesi 4,6 %, dan sisanya 4,6 % di provinsi-provinsi lainnya. Berdasarkan perbandingan provinsi-provinsi di Indonesia, tiga provinsi penyumbang terbesar di Pulau Jawa adalah DKI Jakarta (16,5 %, Jawa Timur (14,7 %), dan Jawa Barat (14,3 %). Kemudian, di Pulau Sumatera urutanannya adalah Riau (7,0 %), Sumatra Utara (5,2 % dan Sumatra Selatan (3,0 %). Apabila pengelompokan kegiatan ekonominya dibedakan ke dalam sektor primer, sektor sekunder



dan sektor tersier, secara spasial sektor primer lebih didominasi oleh wilayah luar Pulau Jawa (74,3 %). Sedangkan sektor sekunder dan tersier, Pulau Jawa masih menjadi penyumbang terbesar, yaitu masing-masing sebesar 66,5 % dan 66,7 %.

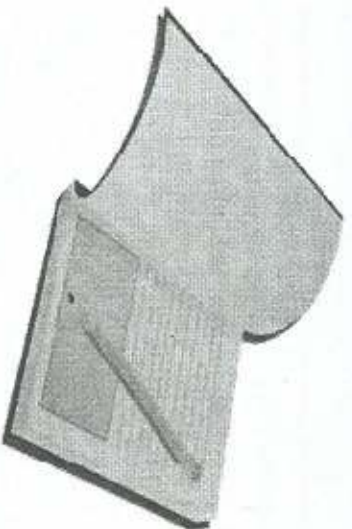
Gambaran angka-angka ini tidak sekedar ditampilkan yang nampak kaku, tapi dibutuhkan pencerminatan agar pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya serius melakukan pembenahan, sebab secara konseptual pemerintah terus melakukan pembaruan kebijakan untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru, maupun menggeser pusat-pusat perekonomian di luar Jawa. Salah satu model kebijakan dimaksudkan yakni Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), kebijakan ini diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru.

Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya. Tujuan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggalai potensi dan keunggulan daerah serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia. Efektivitas MP3EI mulai berlaku tahun 2011, namun sayangnya, upaya pemerintah untuk menggeser porsi pertumbuhan ekonomi ke luar Jawa terutama wilayah timur belum membuahkan hasil.

Porsi pertumbuhan tersebut justru menurun jika dibandingkan tahun lalu. Pada 2010 porsi pertumbuhan untuk Maluku dan Papua sebesar 2,4%, sedangkan pada tahun ini sebesar 2,1%. Begitupun dengan kuartal IV, porsi pertumbuhan kedua wilayah tersebut sebesar 2%. Porsi tersebut menurun jika dibandingkan kuartal IV 2010 sebesar 2,6%. Bali dan Nusa Tenggara pun juga mengalami penurunan dari 2,7% di 2010 menjadi 2,6% di 2011. Sebagai orang Sulawesi, patut kiranya tersenyum sebab Sulawesi sedikit mengalami pertumbuhan dari 4,5% tahun 2010 menjadi 4,6% di tahun 2011.

Dibalik itu semua, tidak salah kalau saya bertanya, benarkah MP3EI salah satu solusi untuk mengakselerasi perekonomian Indonesia secara simultan dengan membagi enam koridor? Atau jangan-jangan kebijakan ini justru lebih banyak menguntungkan daerah yang sudah lebih mapan? Angka-angka yang sudah ditampilkan di atas mempertegas keadaan yang sesungguhnya, maka inilah tugas berat pemerintah mengurangi disparitas antar individu, sektoral maupun spasial yang kelihatannya belum mengalami perubahan yang mendasar kendati MP3EI sudah berjalan selama setahun. Bisa jadi program ini justru menyedot sumber daya lebih banyak ke Jawa dibandingkan mendorong pertumbuhan baru di luar Jawa? 





Membaca Arah Perekonomian Menjelang Tahun Politik



ajah perekonomian Indonesia semenjak pertengahan tahun hingga menjelang akhir tahun 2013 sesungguhnya kurang cerah, terlalu kasar juga kalau disebut suram. Berbagai indikator dapat dibaca sebagai signal bahwa perekonomian kita sesungguhnya "lesu" sampai tahun depan. Triwulan III perekonomian digerogeti dengan defisit neraca perdagangan, sebagai dampak impor BBM meningkat, komponen mobil, barang elektronik serta kelompok makanan sereal termasuk berkontribusi peningkatan impor.

Defisit neraca perdagangan masih saja berlangsung, kendati level rasio terhadap PDB masih angka toleransi (3,7%). Walau masih dalam batas toleransi tetapi cukup menguras cadangan dollar untuk pembiayaan defisit, paket kebijakan yang ditempuh pemerintah efeknya jangka panjang dengan memberikan insentif kepada pelaku ekonomi, diantaranya menghapus pajak beberapa jenis produk. Disertai mendorong peningkatan investasi, tetapi ini belum maksimal karena masalah mendasar belum terselesaikan dengan baik, daftar negatif investasi belum tuntas.



Pada saat yang bersamaan, otoritas moneter melakukan langkah menaikkan suku bunga acuan, dalam kurun waktu tujuh bulan, BI telah menaikkan BI Rate total sebesar 175 basis poin dari 5,75 persen, terakhir menaikkan sebesar 25 basis poin dari 7,25 menjadi 7,5. Kebijakan ini menjadi sebagai upaya untuk mendorong tingkat tabungan, dan mengerem pertumbuhan ekonomi, namun berdampak terhadap investasi. Sekilas bertentangan dengan kebijakan fiskal yang ditempuh pemegang otoritas fiskal (kementerian keuangan) dengan memprioritas peningkatan investasi. Dampak defisit, kinerja ekspor melambat serta tingkat inflasi yang masih tinggi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi cukup terkoreksi (menurun) sebesar 5,62 triwulan III-2013 persen dibandingkan pada triwulan II-2013 mencapai 5,8 persen.

Pertumbuhan yang terkoreksi masih dianggap "lumrah" oleh pemerintah, bahkan berupaya menghibur diri bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia, termasuk tertinggi kedua setelah China. Jika perekonomian kita dievaluasi dengan menyandingkan beberapa negara, bahwa seolah kita masih "berprestasi" maka itu bisa disebut terlalu naif. Sebab sesungguhnya banyak kebijakan stimulasi belum berjalan optimal yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terkoreksi. Kinerja ekspor melemah, gangguan investasi yang selalu berulang setiap tahun, seperti kendala infrastruktur dan demo buruh yang cenderung kurang proporsional sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian.

Apabila investasi yang kurang kondusif, dibarengi dengan kebijakan instan dari otoritas moneter maka upaya mendorong perbaikan kinerja ekonomi tidak berjalan sesuai ekspektasi.

Pertumbuhan yang terkoreksi sudah barang tentu berpengaruh terhadap angkatan kerja. Tahun ini angka pengangguran meningkat, BPS mencatatkan peningkatan 6,25 persen atau 7,39 juta orang dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu 7,24 orang atau 6,14 persen, sebagai dampak melandainya pertumbuhan ekonomi. Boleh jadi jika tuntutan buruh dianggap terlalu tinggi dan dunia industri tertekan, relokasi usaha bisa terjadi. Bahkan Kementerian Bappenas merilis angka sampai semester I-2013 pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 44.000 terjadi di beberapa industri padat karya seperti tekstil, sepatu, dan kulit (Okezone-economy, 7/11/2013).

Tuntutan kenaikan upah buruh hal yang manusiawi, tetapi terlalu memaksakan dengan memasukkan berbagai komponen pembiayaan kelayakan jelas akan mengganggu investasi. Tanyaknya serikat buruh, menyulitkan pemerintah dan dunia usaha melakukan negosiasi untuk perbaikan upah minimum, karena pasti akan alot. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) termasuk kelompok pengusaha yang enggan berdialog (tripartit) karena bingung kelompok pekerja mana yang diajak negosiasi, apalagi pemerintah tidak berdaya melakukan pendataan dan "menertibkan" serikat-serikat pekerja yang jumlahnya puluhan, bahkan ratusan mungkin.

Kelompok serikat pekerja yang begitu banyak, jujur harus diakui sebagian dari mereka sesungguhnya bukan pekerja (atau buruh). Pentolan serikat pekerja (buruh) lebih banyak memanfaatkan organisasi buruh sebagai "gerakan politik", sejalan dengan agenda "tersembunyi" Kementerian tenaga Kerja dan Transmigrasi cenderung berpihak pada buruh menghadapi momentum Pemilu. Idealnya kementerian ini dipimpin dari kalangan profesional non partai, buruh sebagaimana di negara-negara Eropa maupun di Australia merupakan kelompok yang memiliki kekuatan dalam perpolitikan.

Australia menjadi model politik perburuhan, salah satu partai politik yang terkait adalah Partai Buruh. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menegasikan tuntutan buruh, akan tetapi jauh lebih penting menjaga investasi yang *existing*, serta berupaya

memperbanyak investasi yang akan datang. Dari sisi pemerintah regulasi dan perbaikan iklim investasi dengan memangkas berbagai pemicu ekonomi biaya tinggi mendesak dilakukan. Ini perlu perbaikan dengan serius sebab daya saing Indonesia sangat rendah, bahkan daya saing ekonomi Indonesia cukup memprihatinkan. Dilihat dari peringkat kemudahan berbisnis (*Doing Business*) yang dikeluarkan Bank Dunia, Indonesia hanya menduduki peringkat 120, jauh dari Singapura yang duduk di peringkat 1 dan Malaysia di peringkat 6 (Detikfinance, 2/11/2013), kalah dari negara-negara dikawasan ASEAN lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang terkoreksi dianggap oleh pemerintah masih level aman, kepercayaan diri (*over confidence*) pemerintah terlalu tinggi, tingkat pertumbuhan triwulan III sebesar 5,62 persen masih terlalu rendah. Bahkan sebagian pengusaha menyebut dengan sarkastik pertumbuhan sebesar itu dapat dicapai tanpa pemerintah melakukan apa-apa. Jika pemerintah bekerja keras pertumbuhan ekonomi dapat dicapai sekitar 8 persen, meskipun tidak dapat dipungkiri efek pelambatan ekonomi global perlu dipandang sebagai gangguan pertumbuhan ekonomi domestik.

Berbagai prediksi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi *year on year* (YoY) akan menurun, tahun 2012 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,23 persen dan tahun 2013 ditarget sebesar 5,8 persen. Mengacu pada situasi perekonomian tahun 2013, serta dampak ekonomi global target pertumbuhan ekonomi tahun 2014 hanya sebesar 6 persen. Target ini tidak dibalang tidak ekspansif, postur belanja pemerintah yang tidak pro pertumbuhan itu terlihat dari besaran defisit anggaran. Dalam APBN-2014, defisit fiskal ditetapkan sebesar Rp. 175 triliun atau setara 1,69%. Angka defisit itu berada lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun ini sebesar Rp. 224,2 triliun.

Belum lagi alokasi anggaran sangat besar untuk komponen pengeluaran negara pada gaji pegawai dan pembayaran utang dan beban bunga, serta belanja barang, sementara belanja modal terutama sektor infrastruktur masih minim. Belanja pegawai mencapai Rp. 264 triliun, pembayaran bunga sebesar Rp. 121,3

triliun dan subsidi energi yang mencapai Rp. 282,1 triliun. Biaya bantuan sosial juga relatif menurun, ini akan berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat, selama ini konsumsi berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Menghadapi tahun politik, pelaku usaha biasanya akan cenderung menunggu hasil Pemilu, itu artinya pertumbuhan investasi akan melambat.

Kegiatan Pemilu pada dasarnya dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, karena tingkat konsumsi naik untuk membeli barang dan jasa yang terkait dengan kegiatan kampanye, tapi biaya Pemilu turun dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Melihat postur anggaran pemerintah 2014 seperti pertumbuhan ekonomi cukup rendah, maka penyerapan tenaga kerja juga tidak akan optimal. Dengan demikian, akankah target *pro growth*, *pro job* dan *pro poor* akan tercapai diakhir pemerintahan SBY? 



Paling tidak apa yang terpaparkan dalam buku ini merupakan potret perjalanan perekonomian kita. Terutama masalah-masalah regulasi dan kebijakan sepanjang tahun 2009 sampai 2013. Tentu saja ada banyak paket kebijakan atau UU maupun peraturan yang memberikan relasi terhadap perkembangan ekonomi nasional luput dari perhatian penulis.

Saya yakin bahwa pemikiran penulis yang mengaitkan landasan teori Ekonomi Politik dan Regulasi dengan fakta nyata di lapangan, akan dapat menambah perbendaharaan ilmu ekonomi khususnya yang fokus terhadap masalah regulasi (Dr. Setyanto P. Santoso, Dosen Ekonomi Politik dan Regulasi FEB Unpad Bandung).



Muhammad "Amir" Arham, lahir di Bulukumba (Sulawesi Selatan) 25 Juli 1972. Menamatkan sekolah dasar hingga menengah atas di tempat kelahirannya. Pada tahun 1998 menyelesaikan Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Manado, dan tahun 2003 gelar Magister Ekonomi diraih pada Program Pasca-sarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta-Dépok. Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Ekonomi Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad Bandung pada tahun 2013, dengan predikat Cumlaude.

Menulis buku:

- Dinamika Kebijakan Publik, Potret Pemerintahan di Era Otonomi Daerah, diterbitkan 2007. - Esai-Esai Ekonomi: Prospek dan Tantangan Perekonomian Indonesia, terbit 2008. Selain menulis buku di atas, juga telah banyak kali menjadi penyusun dan penyunting buku "best practice" otonomi daerah, diantaranya:
- Implementasi Otonomi Daerah di Kota Tarakan; Sebuah Gagasan, Wawasan, Terapan dan Renungan (2003),
- Komparasi Kebijakan Publik dan Praktek Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Bontang (2003),
- Otonomi Daerah di Provinsi Maluku; Mendesain Best Practice di Tengah Konflik (2005),
- Membangun Sulawesi Tengah Dengan Pola Terwujudnya Tatanan Masyarakat Madani; Kebijakan dan Obsesi H. Aminuddin Ponulele (2005),
- David Bobihoe Akib; Menembus Mata Hati Gorontalo, (2008).
- Menilai Sisi Lain Otonomi Daerah, Bagaimana Seharusnya?; Prisma Pemikiran dan Kebijakan Rusdy Mastura (2009).
- Chapter of Life Seorang Sahabuddin Mustapa; Aktif, Pendidik dan Pemimpin, (2011). Selain itu beberapa tulisannya telah dimuat di jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema-tema ekonomi dan kebijakan publik. Kemudian ia juga aktif diberbagai organisasi profesi, dan mendirikan Pusat Studi Kebijakan Publik Sulawesi Tengah. Saat ini tugas utamanya adalah tenaga edukatif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo (FEBUNG), disamping juga melakukan berbagai penelitian sembari memimpin penerbitan jurnal ilmiah berkala Oikos-Nomos di FEBUNG.



ISBN: 979-602-99280-1-3